



**PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR TENTANG SOSIALISME
INDONESIA TAHUN 1915-1960**

SKRIPSI

Oleh

**Tri Wulandari
NIM 130210302014**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR TENTANG SOSIALISME
INDONESIA TAHUN 1915-1960**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1), pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

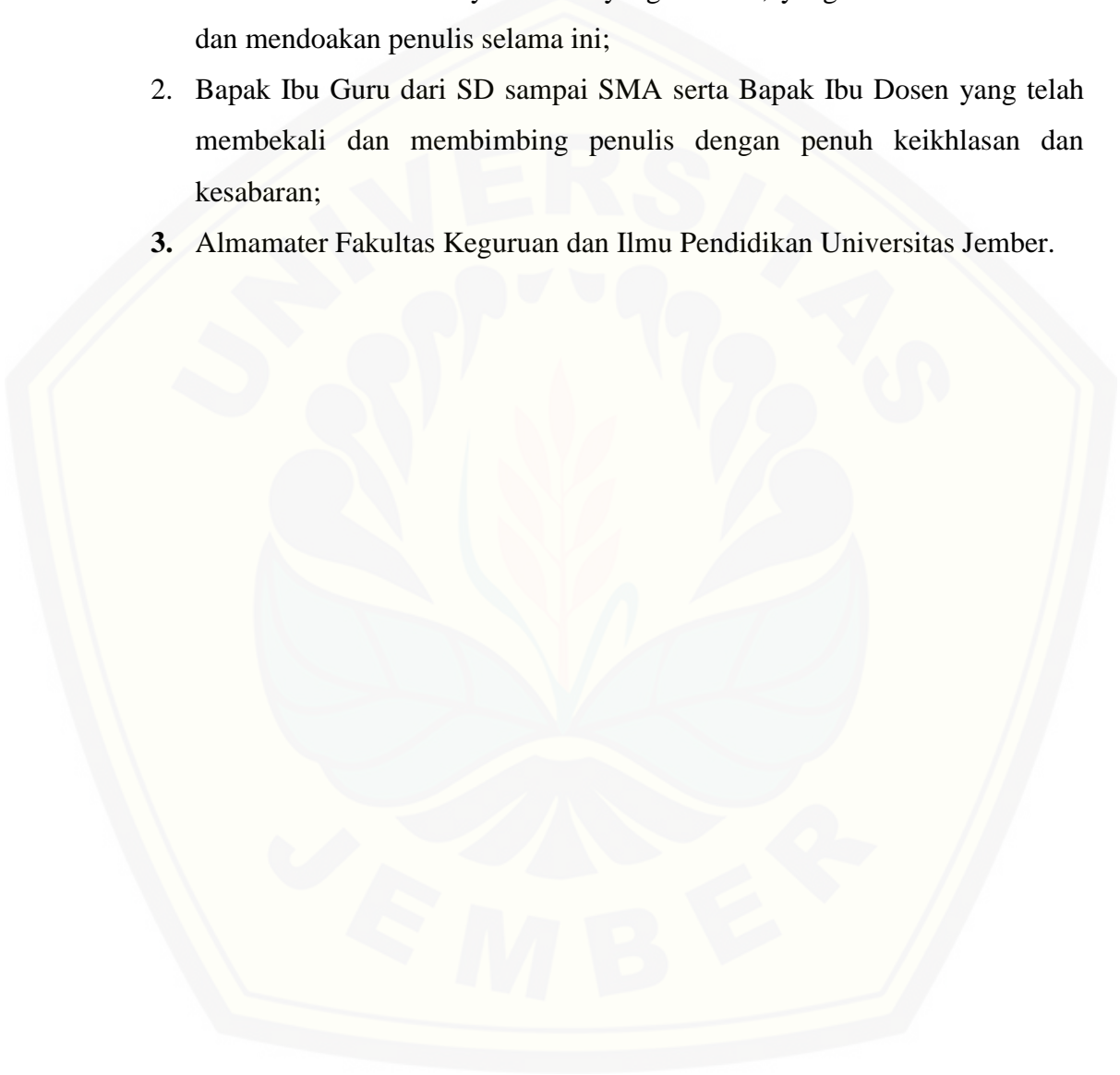
**Tri Wulandari
NIM 130210302014**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibu Siti Arofah dan Ayah Sadin yang tercinta, yang telah membesarkan dan mendoakan penulis selama ini;
2. Bapak Ibu Guru dari SD sampai SMA serta Bapak Ibu Dosen yang telah membekali dan membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
3. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.



MOTO

Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country
(Jangan tanya apa yang negara lakukan untukmu, tapi tanya apa yang kau lakukan
untuk negara) (John F. Kennedy)*



*https://www.brainyquote.com/lists/authors/top_10_john_f_kennedy_quotes

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Tri Wulandari

NIM : 130210302014

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pemikiran Sutan Sjahrir Tentang Sosialisme Indonesia tahun 1915-1960” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2018

Yang menyatakan,

Tri Wulandari
NIM 130210302014

**PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR TENTANG SOSIALISME INDONESIA
TAHUN 1915-1960**

SKRIPSI

Oleh

**Tri Wulandari
NIM 130210302014**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Kayan Swastika, M. Si.
Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Marjono, M. Hum.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pemikiran Sutan Sjahrir Tentang Sosialisme Indonesia Tahun 1915-1960” telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Senin, 15 Januari 2018

tempat : Gedung I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Kayan Swastika, M.Si.
NIP. 196702102002121002

Drs. Marjono, M.Hum.
NIP. 196004221988021001

Anggota I

Anggota II

Drs. Sugiyanto, M.Hum.
NIP.195702201985031003

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.
NIP. 196006121987021001

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D
NIP. 196808021993031004

RINGKASAN

PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR TENTANG SOSIALISME INDONESIA TAHUN 1915-1960; Tri Wulandari, 130210302014; 2017; xiii + 93; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Latar belakang penelitian ini adalah karena upaya Sjahrir untuk menghilangkan penindasan dan penghisapan yang dilakukan bangsa penjajah terhadap rakyat Indonesia. Saat kecil, Sjahrir memang tidak terlalu memperhatikan tentang penjajahan kolonial Belanda, namun lama-kelamaan sifat nasionalismenya mulai tumbuh dan mulai menyadari semangat kebangsaan. Sjahrir mulai berjuang untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan dengan memperjuangkan sosialisme Indonesia.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) apa faktor yang melatarbelakangi pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia tahun 1915-1942?, (2) bagaimana bentuk-bentuk pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia 1929-1960? (3) bagaimana usaha Sutan Sjahrir dalam mewujudkan sosialisme Indonesia 1945-1960?. Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) mengkaji faktor yang melatar belakangi pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia 1915-1942, (2) mengkaji bentuk-bentuk pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia 1929-1960, (3) mengkaji usaha Sutan Sjahrir dalam mewujudkan sosialisme Indonesia 1945-1960. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah, (1) bagi peneliti, sebagai pelatihan karya ilmiah dan pelatihan dalam melakukan penelitian, serta menambah wawasan tentang pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia, (2) bagi pembaca, dapat memberikan pengetahuan tentang pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia, (3) bagi peneliti lain, dapat memotivasi untuk melakukan penelitian yang sejenis secara lebih dalam. Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari 4 langkah yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah, (1) faktor lingkungan keluarga Sjahrir yakni keluarganya yang berkecukupan dan kebarat-baratan mempunyai peran dalam pembentukan pola pikir Sjahrir menjadi lebih terbuka dan kritis. Sedangkan budaya Minang yakni rantau membentuk pola pikir Sjahrir menjadi lebih dinamis. Lingkungan pendidikan ELS dan MULO membuat sifatnya semakin kebarat-baratan, sedangkan lingkungan pendidikan AMS membuat jiwa nasionalismenya tumbuh serta mulai tertarik dengan semangat kebangsaan. Faktor pengalaman organisasi mulai dari Jong Indonesie, PI, PNI-Baru mempengaruhi Sjahrir dalam segi politik. Sedangkan lingkungan pengasingan membuat Sjahrir lebih bisa mengembangkan daya pikir aslinya serta mampu merenungkan perkembangan politik dunia, (2) bentuk-bentuk pemikiran Sjahrir tentang sosialisme Indonesia yakni sosialisme kerakyatan yang merupakan sosialisme berdasarkan kerakyatan, serta tidak mengkhianati dasar kemanusiaan. Sosialisme politik berupa penerapan sistem multipartai dan sistem parlementer. Sosialisme ekonomi berupa penerapan sistem ekonomi campuran, yakni antara sistem ekonomi sosialis dengan tidak mengabaikan peran swasta, (3) usaha Sjahrir dalam mewujudkan sosialisme Indonesia ditempuh melalui BP-KNIP yang membawanya duduk di pemerintahan sebagai Perdana Menteri selama 3 kali berturut-turut, serta melalui partai politik.

Berdasarkan dari hasil pembahasan dalam penelitian itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) kondisi lingkungan keluarga, pendidikan dan pengalaman organisasi telah mempengaruhi pemikirannya tentang sosialisme Indonesia, (2) untuk bentuk-bentuk sosialisme Indonesia harapan Sjahrir berupa sosialisme berdasarkan kerakyatan yang terdiri dari sosialisme politik dan ekonomi, (3) usaha-usaha Sjahrir dalam meraih cita-cita sosialisme dilakukan melalui BP-KNIP dan melalui partai politik. Berdasarkan penelitian ini, saran ditujukan kepada pembaca, peneliti dan almamater.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pemikiran Sutan Sjahrir tentang Sosialisme Indonesia tahun 1915-1960”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Dr. Sumardi, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
4. Drs. Kayan Swastika, M.Si., selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai;
5. Drs. Marjono, M.Hum., selaku dosen pembimbing anggota yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sampai terselesaikannya skripsi ini;
6. Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah;
7. Prof. Bambang Soepeno, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak Ibu Dosen yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Siti Arofah dan Ayah Sadin yang telah memberikan motivasi dan doa demi terselesaikannya skripsi ini;
10. Saudara kandungku Dewi Nursita dan Intan Putri Anjelita yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;

11. Kakak Iparku Saiful serta keponakanku Zahra dan Zhafif yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Zaldi Zakaria yang telah memberikan dukungan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini;
13. Sahabat-sahabatku Toel dan Bebeb yang telah memberi doa dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini;
14. Kawan-kawanku seperjuangan Clara dan Kikis yang sama-sama saling memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi;
15. Kawan-kawan angkatan 2013 yang banyak memberi dukungan dan dorongan dalam perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini;
16. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Setiap karya yang dihasilkan manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka dari itu penulis menerima dengan tangan terbuka segala bentuk kritik yang membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 15 Januari 2018

Penulis

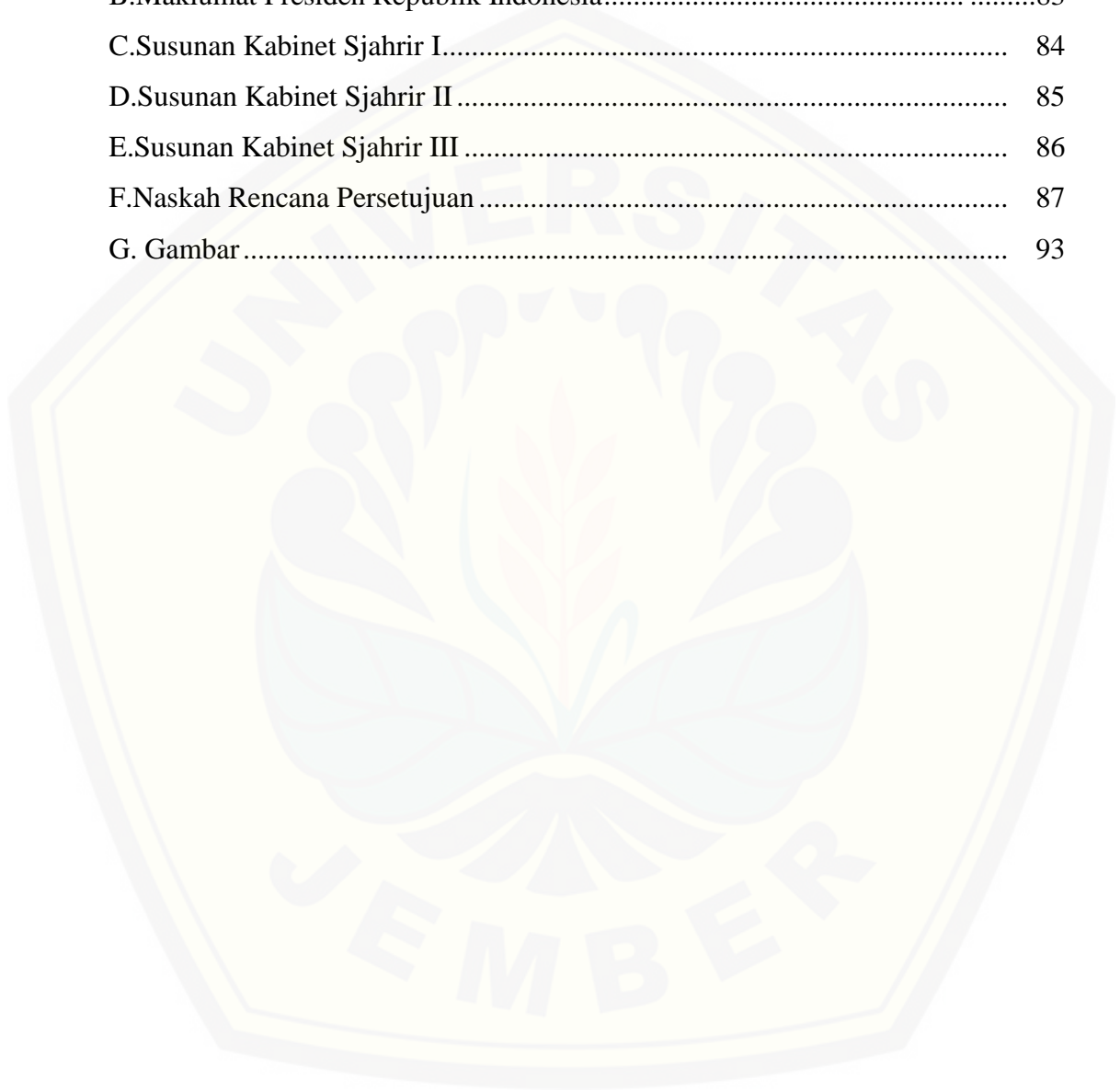
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB 3. METODE PENELITIAN	18
3.1 Prosedur Penelitian	18
3.2 Sumber Penelitian	19
BAB 4. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR	
TENTANG SOSIALISME INDONESIA TAHUN 1915-1942	22
4.1 Faktor Sosial-Budaya	23
4.1.1 Faktor Lingkungan Keluarga	23
4.1.2 Faktor Budaya Minang.....	24

4.1.3 Faktor Lingkungan Pendidikan	26
4.2 Faktor Pengalaman Organisasi	32
BAB 5. BENTUK-BENTUK PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR TENTANG SOSIALISME INDONESIA TAHUN 1929-1960	39
5.1 Sosialisme Kerakyatan	40
5.2 Sosialisme Politik	44
5.3 Sosialisme Ekonomi	46
BAB 6. USAHA SUTAN SJAHRIR DALAM MEWUJUDKAN SOSIALISME INDONESIA TAHUN 1945-1960	54
6.1 Usaha Melalui BP-KNIP	55
6.1.1 Usaha Melalui Kabinet Sjahrir	59
6.1.1.1 Kabinet Sjahrir I	59
6.1.1.2 Kabinet Sjahrir II	62
6.1.1.3 Kabinet Sjahrir III	67
6.3 Usaha Melalui Partai Politik	72
BAB 7. PENUTUP	76
7.1 Kesimpulan	76
7.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Matrix Penelitian	82
B.Maklumat Presiden Republik Indonesia.....	83
C.Susunan Kabinet Sjahrir I.....	84
D.Susunan Kabinet Sjahrir II	85
E.Susunan Kabinet Sjahrir III	86
F.Naskah Rencana Persetujuan	87
G. Gambar	93



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 1945 tidak terlepas dari perjuangan para tokoh di belakangnya seperti Sukarno, Hatta, Tan Malaka, Sutan Sjahrir, dan masih banyak tokoh lainnya. Bagi rakyat Indonesia, Sukarno-Hatta adalah dua orang yang paling berjasa besar dalam pendirian Republik Indonesia. Namun, banyak tokoh yang justru terlupakan akibat minimnya pengetahuan rakyat terhadap sejarah bangsanya sendiri. Salah satunya adalah Sutan Sjahrir, meski memiliki jasa yang besar dalam pendirian Republik Indonesia, orang awam tidak banyak yang tahu peran penting apa yang telah disumbangkannya. Sjahrir adalah salah satu tokoh yang berjuang untuk menyelamatkan Indonesia dari keinginan Belanda untuk menguasai Indonesia pasca kemerdekaan.

Sutan Sjahrir memiliki cita-cita yang besar dalam membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan penjajah melalui jalan sosialisme. Awalnya, sebagai rakyat biasa Sjahrir justru tidak suka berkumpul dengan pemberontak. Alasannya karena ayah Sjahrir bekerja sebagai pegawai Belanda. Selain itu, Sjahrir juga dibesarkan di lingkungan Belanda. Menariknya hal itu berubah ketika saat Sjahrir mendengar pidato Dr. Tjipto Mangunkusumo di Bandung, jiwa nasionalismenya menjadi tergugah (Tempo, 2017:13). Di usianya yang terbilang muda, Sjahrir sudah memiliki sifat kritis dan berani dalam berpendapat. Menurut Sastrosatomo (dalam Anwar, 1980:xii-xiii), Sjahrir sering bertukar pikiran serta mengutarakan pendapat mengenai kolonialisme di Indonesia, namun Sjahrir menyampaikannya tanpa rasa benci dan tanpa menjelek-jelekan Belanda.

Sjahrir dikenal sebagai tokoh yang menganut ideologi sosialisme. Sjahrir pertama kali mengenal sosialisme ketika bersekolah di Belanda tahun 1929. Kepergian Sjahrir ke Belanda membawanya bergabung dengan Perkumpulan Mahasiswa Sosial Demokrat Amsterdam (Amsterdam Sociaal Democratische Studenten Club). Sjahrir tidak pernah menolak segala bentuk pengetahuan yang berasal dari barat, itulah mengapa saat di Belanda Sjahrir merasakan kebebasan

karena dapat bertukar pikiran dengan berbagai golongan tanpa takut adanya penindasan.

Kepindahannya ke Belanda dianggap jauh lebih mudah daripada kepindahannya ke Bandung. Ketertarikannya dengan sosialisme karena Sjahrir terkena dampak dari *zeitgeist* atau semangat zaman pasca perang dunia I. Semangat zaman yang dimaksud adalah semangat marxisme yang menyebarkan iklim perjuangan untuk menjunjung nasib buruh yang tertindas oleh kapitalisme. Sutan Sjahrir yang merasa bahwa rakyat Indonesia juga tertindas dan menderita, berusaha untuk mempelajari sosialisme secara lebih mendalam. Menurut Tas (dalam Mrazek, 1996:101), menyatakan bahwa Sjahrir pada masa itu beranggapan bahwa sosialisme digunakan sebagai pendorong dalam merangkul seluruh manusia, terutama rakyat jelata, atau setidaknya kaum pekerja/buruh.

Tidak hanya pemikirannya yang menarik, kiprah Sutan Sjahrir di dunia politik dalam upaya mewujudkan sosialisme Indonesia juga menarik untuk dibahas. Masuk ke dunia politik tentu saja harus siap dengan segala macam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya menjadi penghalang bagi Sjahrir untuk mewujudkan cita-cita sosialisme Indonesia secara maksimal. Salah satu hambatan yang harus dihadapi adalah ketika pemikiran Sjahrir harus bersebrangan dengan beberapa tokoh pejuang lainnya. Kelompok Persatuan Perjuangan yang diketuai Tan Malaka adalah penentang keras kebijakan Sutan Sjahrir. Bagi Tan Malaka, Sjahrir terlalu banyak memberikan peluang terhadap Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Merdeka sepenuhnya adalah hal yang ingin dicapai Tan Malaka tanpa adanya embel-embel berdiskusi dengan pihak musuh. Namun Sjahrir justru berpendapat bahwa selama Belanda tidak menghancurkan kekuatan militer, maka Indonesia masih bisa bertahan meski tidak memenangkan pertempuran (Sjahrir, 1990:283).

Sjahrir ingin menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukanlah segerombolan orang brutal, pembunuh, maupun perampok seperti yang dipropagandakan Belanda (Tempo, 2017: 85). Meski cara berpikir Sjahrir sangat dipengaruhi pemikiran barat terutama Eropa, Sjahrir tetap bertindak sesuai dengan kondisi politik di Indonesia (Legge, 1993:242). Pertentangan tersebut

menyebabkan pendukung Tan Malaka melakukan penangkapan saat Sjahrir bermalam di Surakarta pada 27 Juni 1946 (Mrazek, 1996:563). Banyak yang menuduh Tan Malaka sebagai otak dibalik penculikan meskipun kondisinya berada dalam penjara. Namun, halangan-halangan yang dihadapi Sjahrir tidak pernah menciutkan niatnya untuk membuktikan pada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka dari tangan penjajah. Kemerdekaan yang didapat Indonesia bukanlah buatan Jepang melainkan perjuangan tanpa kenal lelah rakyat Indonesia.

Ideologi sosialisme cukup berkembang di Indonesia. Tidak hanya Sjahrir, beberapa tokoh besar Indonesia juga menganut ideologi sosialisme dengan ciri khasnya masing-masing. Sosialisme sendiri merupakan suatu peraturan mengenai harta benda, yang terdiri atas dua peraturan yakni (1) kepemilikan alat produksi hendaknya diberikan kepada perikatan orang hidup bersama (kepemilikan sosial) dan (2) segala peraturan tentang harta benda diatur oleh perikatan tersebut (Tjokroaminoto, 2010:18). Pengertian sosialisme (biasa disebut marhaenisme) menurut Sukarno adalah ilmu perjuangan yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat sosialis berdasarkan keadaan dan kepribadian masing-masing bangsa (dalam Melik, 1958:11-13). Sedangkan bagi Tjokroaminoto, sosialisme dan islam adalah satu kesatuan, sosialisme menghendaki cara hidup satu untuk semua dan semua untuk satu (Tjokroaminoto, 2010:15). Hal tersebut berarti manusia tidak boleh hidup secara individual melainkan harus hidup secara bersama-sama, karena semua berasal dari Allah, oleh Allah, dan kembali kepada Allah. Sosialisme setiap orang yang menganutnya memang berbeda-beda. Bagi Sjahrir sendiri, paham sosialisme yang akan diterapkannya di Indonesia harus dibedakan dengan sosialisme yang diajukan komunisme. Karena kedua paham tersebut memiliki dasar pemikiran yang berbeda, yakni terletak pada cara penafsiran terhadap pemikiran Karl Marx dan Engels (Sjahrir, 1982:80). Seperti halnya di barat, sosialisme di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dulu, namun masih dalam bentuk sosialisme utopia. Sosialisme utopia yang dimaksudkan adalah sosialisme yang masih dalam angan-angan masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Menurut Abdulgani (1964:9-45) salah satu penyebab berkembangnya sosialisme di Indonesia adalah adanya

kemiskinan luar biasa yang dialami oleh bangsa Indonesia akibat eksploitasi dari penjajah. Sosialisme sendiri memiliki dua sifat yakni, (1) adanya persamaan antar manusia; (2) sifat kemanusiaan yang merujuk pada keadilan bagi setiap manusia (Sjahrir: 1982:69-71). Dari sifat di atas, dapat diketahui bahwa sosialisme mengagungkan adanya keadilan bagi setiap individu tanpa adanya perbedaan kelas.

Bagi Sjahrir, sosialisme lebih pantas untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia karena lebih halus dalam praktek penerapannya. Selain itu, kolonialisme yang merupakan anak dari kapitalisme hanya bisa dilawan oleh sosialisme. Sjahrir memilih paham sosialisme ini untuk menjalankan revolusi sosial sebagai upaya untuk mengakhiri feodalisme dan menghancurkan benih fasisme setelah tercapainya kemerdekaan Indonesia (Anwar, 2011:xxvii). Sosialisme dapat mencegah feodalisme lama yang ditakutkan akan muncul kembali dalam wujud pemimpin politik. Selain itu, sosialisme yang menjadi harapan Sjahrir adalah sosialisme yang dicapai berkat kesadaran dan perkembangan sejarah bangsa yang mempunyai kebudayaan sendiri, tanpa menutup diri dari pertemanan antar bangsa dan perkembangan internasional (Mangandaralam, 1966:38).

Sjahrir memiliki semangat sosialisme yang terus mendahulukan setiap individu sebagai makhluk yang patut dihormati. Kemerdekaan Individu serta membuka kesempatan untuk berkembangnya intelektualitas rakyat bagi Sjahrir adalah ketentuan mutlak dalam sebuah revolusi nasional (Santoso, 2014:187). Kemerdekaan yang dimaksud Sjahrir bukan hanya sebuah kemerdekaan semata, melainkan juga kemerdekaan dalam diri rakyat itu sendiri. Menurut Wolf (dalam Anwar, 1980:289) Sjahrir memahami kekurangan-kekurangan bangsa Indonesia. Bangsa yang penuh dengan tahayul, bangsa yang miskin, dan secara politik minim pengetahuan. Namun Sjahrir justru memiliki keyakinan yang besar terhadap kemampuan rakyatnya sendiri dan selalu berjuang untuk masa depan rakyatnya yang cerah. Pada dasarnya Sjahrir adalah penganut sosialisme yang memiliki pandangan berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan sosialisme. Oleh karena

itu, banyak orang yang kagum akan kecerdasannya dan tidak sedikit pula yang membencinya.

Sosialisme di Indonesia harus dibedakan dengan sosialisme barat yang memiliki tujuan yang berbeda. Sosialisme barat terjadi karena untuk melawan adanya sistem kapitalisme dimana alat produksi didominasi oleh perseorangan. Sedangkan di Indonesia kondisinya sebagai negara jajahan yang telah ditindas berabad-abad oleh bangsa barat. Oleh karena itu, Sjahrir berpendapat bahwa sosialisme yang sesuai dengan kondisi riil Indonesia adalah sosialisme kerakyatan (Santoso, 2014:152). Sosialisme yang dimaksud adalah sosialisme yang sangat menghormati martabat kemanusiaan bukan perjuangan kelas seperti halnya sosialisme barat. Martabat kemanusiaan harus dikedepankan karena melihat dari kondisi Indonesia yang sudah ratusan tahun dijajah bangsa asing.

Berdasarkan uraian di atas, Sjahrir adalah seseorang yang memiliki cita-cita tinggi untuk mensejahterakan bangsanya, tentu dengan caranya sendiri yakni melalui jalan sosialisme. Menariknya, bukan hanya teori yang Sjahrir pelajari melainkan juga terjun langsung dalam kelas buruh atau kelas pekerja. Menurutnya, tempat terbaik untuk mendalami sosialisme adalah dengan berbaur langsung dengan kaum proletar. Selama upaya untuk mewujudkan sosialisme yang dicita-citakannya, Sjahrir harus menghadapi banyak hambatan. Pemikirannya yang jauh ke depan sulit untuk diikuti orang-orang di sekitarnya, sehingga hal ini menimbulkan banyak kesalahpahaman. Bahkan di akhir perjuangannya, Sjahrir harus menerima kenyataan bahwa sosialisme yang didambakannya belum tercapai secara maksimal. Ide atau gagasan yang sudah Sjahrir berikan untuk Indonesia seharusnya menjadi acuan bagi rakyat Indonesia untuk mengenal Sjahrir lebih jauh. Cita-cita Sjahrir untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan dengan pemikirannya, serta untuk menambah wawasan masyarakat tentang Sjahrir merupakan alasan peneliti untuk membahasnya lebih dalam dengan judul: **“Pemikiran Sutan Syahrir Tentang Sosialisme Indonesia Tahun 1915–1960”**.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Poespoprodjo (1991:174) pemikiran adalah suatu aksi yang mengakibatkan pikiran mendapat suatu pengertian yang baru dengan sebuah perantara yang telah diketahui. Jadi yang dimaksud pemikiran adalah suatu kegiatan dalam mencermati sebuah pengetahuan dan nantinya akan menghasilkan pengetahuan baru yang berupa gagasan atau ide.

Pemikiran yang dimaksud adalah pemikiran dari Sutan Sjahrir. Menurut Sutan Sjahrir (1982:84), Sosialisme Indonesia adalah paham yang menghargai kebebasan dan kedewasaan umat manusia, yakni yang bebas dari perlakuan sewenang-wenang serta penghinaan terhadap sesama manusia. Sosialisme Indonesia adalah paham yang sangat menghargai derajat dan martabat rakyat Indonesia yang berarti terbebas dari belenggu penindasan.

Jadi, yang dimaksud dengan Pemikiran Sutan Sjahrir tentang Sosialisme Indonesia adalah suatu gagasan atau ide Sutan Sjahrir tentang kebebasan dan kedewasaan rakyat Indonesia dari penindasan dan penghisapan tanpa melupakan dasar-dasar kemanusiaan.

1.3 Ruang Lingkup

Ada tiga batasan dalam ruang lingkup ini, yakni batasan waktu (temporal), batasan tempat (spasial), dan batasan materi. Batasan waktu (temporal) adalah batasan mengenai waktu yang digunakan peneliti dan didasarkan pada permasalahan yang akan dikaji. Batasan waktu yang digunakan peneliti adalah tahun 1925–1960. Alasan peneliti memilih tahun 1915 karena pada tahun tersebut Sjahrir mulai memasuki jenjang pendidikan dasar yakni ELS. ELS merupakan sekolah modern Hindia-Belanda. Masuknya Sjahrir ke ELS membuatnya sering bergaul dengan anak-anak Belanda, serta kurikulum ELS yang menuntut Sjahrir harus belajar tentang kebudayaan dan geografi negara Belanda. Kebiasaannya ini membuat Sjahrir menjadi anak yang lebih terbuka dan modern, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi Sjahrir dalam pandangannya tentang pemikiran barat di masa mendatang. Namun untuk mengetahui lebih jauh tentang pemikiran Sjahrir terhadap sosialisme Indonesia, peneliti harus meneliti tentang latar belakang sosial-budaya Sutan Sjahrir. Hal ini karena pemikiran

Sjahrir tentang sosialisme Indonesia banyak diwarnai oleh faktor kulturalnya sebagai orang Minang. Orang-orang Minang memiliki pandangan hidup yang dinamis (memiliki pandangan yang selalu ingin berubah/bergerak) dan antiparokhialisme (pandangan yang tidak mengakui/menghargai perspektif lain). Orang Minang mampu mengidealisasikan adat mereka dengan unsur-unsur dari luar sehingga tampak sesuai, tetapi juga dapat meningkatkan proses modernisasi masyarakat Minang itu sendiri. Unsur-unsur yang diambil dari luar Minang tidak berarti melemahkan, justru hal itu dapat menguatkan adat Minang itu sendiri. Sosialisme yang Sjahrir pelajari di Belanda masih dalam bentuk sosialisme secara umum. Sedangkan Sosialisme Indonesia disesuaikan dengan kondisi Indonesia karena diterapkan di negara Indonesia.

Sedangkan tahun 1960 dipilih peneliti karena pada tahun tersebut PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang diketuai Sjahrir dibubarkan oleh Presiden Sukarno. Hal tersebut terjadi karena kecurigaan Sukarno terhadap pemimpin-pemimpin pusat PSI yang dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Dengan dibubarkannya PSI, wadah Sjahrir dalam merealisasikan sosialisme Indonesia berakhir sudah. Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah Republik Indonesia. Sedangkan batasan materinya adalah faktor yang melatarbelakangi pemikiran Sutan Sjahrir, pemikiran sosialisme Sutan Sjahrir, dan upaya Sjahrir dalam mewujudkan sosialisme Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a. apa faktor yang melatarbelakangi pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia tahun 1915-1942?
- b. bagaimana bentuk-bentuk pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia 1929-1960?
- c. bagaimana usaha Sutan Sjahrir dalam mewujudkan sosialisme Indonesia 1945-1960?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji faktor yang melatar belakangi pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia 1915-1942;
- b. mengkaji bentuk-bentuk pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia 1929-1960;
- c. mengkaji usaha Sutan Sjahrir dalam mewujudkan sosialisme Indonesia 1945-1960.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. bagi peneliti, sebagai pelatihan karya ilmiah dan pelatihan dalam melakukan penelitian, serta menambah wawasan tentang pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia tahun 1915-1942;
- b. bagi pembaca, dapat memberikan pengetahuan tentang pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia 1929-1960;
- c. bagi peneliti lain, dapat memotivasi untuk melakukan penelitian yang sejenis secara lebih dalam 1945-1960.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah review atau peninjauan kembali penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas. Pada tinjauan pustaka ini peneliti juga akan membahas mengenai pendekatan dan teori yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini. Asyanto (2012) dalam skripsinya yang berjudul Peran Sutan Sjahrir dalam Politik Indonesia Tahun 1945-1947 memfokuskan pada peran Sutan Sjahrir dalam politik Indonesia baik sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya.

Pada penelitian ini Asyanto (2012) menjelaskan bahwa Sutan Sjahrir pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang menjalankan perjuangan non-kooperasi. Pada masa pemerintahan Belanda, Sutan Sjahrir mengembangkan politik non-kooperasi melalui PNI-Baru. Bersama dengan PNI-Baru, Sutan Sjahrir banyak melakukan propaganda di antaranya banyak membicarakan tentang riwayat Belanda, penderitaan rakyat akibat menjadi jajahan Belanda, serta cara-cara yang dapat memungkinkan untuk mengakhiri penjajahan. Aksinya tersebut dianggap membahayakan pihak Belanda, dan akhirnya membawa Sjahrir dibuang ke Boven Digul. Pada zaman Jepang, Sjahrir membentuk perlawanan bawah tanah. Kiprah politik Sutan Sjahrir pasca kemerdekaan adalah dengan mengubah sistem presidensiil menjadi parlementer. Perjuangannya berubah dari non-kooperasi menjadi kooperasi dengan pihak Belanda. Menurutnya peperangan tidak akan bisa menandingi persenjataan modern yang dimiliki pihak lawan. Sjahrir ingin menunjukkan pada dunia internasional meskipun Indonesia adalah bangsa baru, namun rakyat Indonesia mampu menjaga kestabilan dalam negeri dan mampu menjalin kerjasama dengan negara lain. Pada skripsi Asyanto lebih banyak membahas tentang karir politik Sutan Sjahrir baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Namun, penelitian tersebut masih belum banyak menyinggung tentang ideologi sosialisme yang mempengaruhi pemikiran Sjahrir dalam berpolitik. Sehingga penelitian ini akan memperdalam tentang ideologi sosialisme beserta bentuk-bentuknya.

Selanjutnya penelitian Badriyah (2013) yang berjudul Perbedaan Pemikiran Sutan Sjahrir dan Tan Malaka Tentang Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1927-1947 memfokuskan pada cara berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan, yakni Sutan Sjahrir secara diplomasi dan Tan Malaka secara peperangan. Menurut Badriyah (2013), bagi Sutan Sjahrir satu-satunya jalan mempertahankan kemerdekaan adalah dengan cara diplomasi. Sedangkan bagi Tan Malaka, pertempuran adalah jalan yang harus ditempuh rakyat Indonesia dalam menghadapi Belanda. Hal ini bertujuan agar Indonesia dapat merdeka 100 % dari tangan penjajah. Perbedaan pemikiran keduanya semakin lama semakin meresahkan. Keduanya memiliki argumen yang kuat dalam mempertahankan keyakinan masing-masing. Bagi Sjahrir, perundingan adalah hal yang penting dalam menghadapi Belanda. Meskipun Belanda hanya mengakui beberapa wilayah Indonesia, hal itu justru diperlukan karena dapat mengubah pandangan dunia internasional. Sebaliknya, bagi Tan Malaka diplomasi hanya sekedar cara licik Belanda dalam membohongi bangsa Indonesia. Dalam setiap perundingan yang dilakukan, Belanda pasti mengajukan banyak ketentuan dan persyaratan kepada pihak Indonesia. Hal ini bagi Tan Malaka adalah sebuah permainan yang dimainkan Belanda dalam upaya mengambil alih Indonesia. Menurut Tan Malaka, merdeka 100 % adalah kemerdekaan tanpa adanya tawar-menawar dengan pihak penjajah.

Perbedaan pemikiran Sutan Sjahrir dan Tan Malaka ada dua faktor pendorong, (1) faktor lingkungan dan (2) faktor ideologi. Implikasi dari perjuangan Sutan Sjahrir adalah menjadi Perdana Menteri sebanyak tiga kali. Dengan menjabat menjadi Perdana Menteri inilah Sjahrir dapat merealisasikan pemikirannya tentang perjuangan secara diplomasi. Sedangkan implikasi perjuangan Tan Malaka adalah menjadi ketua PKI, mendirikan PP, dan mendirikan PARI. Pada penelitian tersebut, Badriyah lebih banyak menguraikan tentang perbedaan cara pandang Sjahrir dan Tan Malaka dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Faktor ideologi yang mempengaruhi pemikiran Sjahrir masih sedikit disinggung, namun bentuk-bentuk sosialisme ala Sjahrir belum

dijelaskan sama sekali. Sehingga, peneliti akan menjelaskan secara lebih detail mengenai ideologi dan bentuk-bentuk dari sosialisme.

Penelitian Romansyah (2013) yang berjudul *Pemikiran Sutan Sjahrir dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1927-1947* terfokus pada gagasan Sutan Sjahrir dalam mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan jalan diplomasi dan beberapa kebijakan politik Sjahrir. Cita-cita Sutan Sjahrir adalah mewujudkan masyarakat sosialis namun tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini diterapkan menggunakan sosialisme Indonesia versi Sjahrir yakni Sosialisme Kerakyatan. Pemikiran Sjahrir memiliki jalur antifeodalisme, antifasisme, dan anti kolonial-kapitalisme. Sutan Sjahrir membebaskan rakyat Indonesia dalam hal berpolitik, tidak ada kata otoriter dalam kamus Sutan Sjahrir. Sjahrir mengharapkan Indonesia memiliki banyak partai dalam upaya dalam menampung aspirasi dan pendidikan politik bagi rakyat. Kabinet Parlementer adalah wadah Sjahrir dalam mewujudkan harapan tersebut.

Penelitian Romansyah juga menjelaskan bahwa kabinet Sjahrir adalah wujud perjuangan demokrasi untuk melawan fasisme. Pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, Sjahrir mengambil jalan non-kooperasi atau tidak bekerjasama dengan pemerintah. Pasca kemerdekaan hal tersebut berganti dengan perjuangan kooperasi. Implementasi politik Sutan Sjahrir dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah dengan memimpin kabinet Sjahrir dari tahun 1945–1947. Sjahrir mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan jalan diplomasi. Sutan Sjahrir telah membangun fondasi politik Indonesia yakni politik luar negeri bebas aktif. Meskipun kemajuan didapat dalam hal politik luar negeri, namun Sjahrir belum berhasil menegakkan konsolidasi perjuangan dalam wilayah Indonesia. Pada penelitian tersebut lebih banyak membahas mengenai pengaruh pemikiran Sjahrir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme memang sudah sedikit disinggung, namun bentuk-bentuk pemikiran Sjahrir tentang sosialisme sama sekali belum diuraikan. Sehingga, peneliti akan memaparkan bagaimana bentuk-bentuk pemikiran Sjahrir tentang sosialisme.

Penelitian Hidayat (2016) yang berjudul *Pemikiran Sutan Sjahrir Tentang Demokrasi Indonesia Tahun 1926-1962* terfokus pada upaya Sjahrir dalam mewujudkan pemerintahan yang berdasar kedaulatan rakyat. Hidayat (2016) mengungkapkan bahwa, berbagai macam faktor dapat mempengaruhi pemikiran Sutan Sjahrir di antaranya, kondisi lingkungan sosial-budaya, lingkungan pendidikan, serta lingkungan politik. Pemikiran Sjahrir banyak terpengaruh dari lingkungan keluarga yang berasal dari tanah Minang. Tradisi yang paling berpengaruh bagi Sjahrir adalah tradisi mufakat dan rantau. Dari faktor lingkungan pendidikan, Sjahrir tergolong orang yang beruntung karena masih dapat menikmati pendidikan bergaya barat karena berasal dari keluarga berada. Faktor lainnya adalah faktor politik, Sjahrir mulai terjun ke dunia politik ketika bergabung dengan Perhimpunan Indonesia dan PNI-Baru.

Wujud pemikiran Sutan Sjahrir tentang demokrasi adalah sosialisme kerakyatan. Sosialisme kerakyatan mengakui kebebasan berpikir dan bertindak. Selain itu juga memberikan arahan dalam mencapai demokrasi yakni dengan jalur parlementer dan bertujuan untuk mencapai masyarakat sosialis. Usaha Sutan Sjahrir dalam memperjuangkan demokrasi antara lain memimpin partai politik, BP-KNIP, dan Kabinet Sjahrir. Partai politik yang pernah dipimpin Sjahrir adalah PNI-Baru, Partai Sosialis, dan PSI. Selama menjadi pemimpin BP-KNIP, Sjahrir mengusulkan agar Indonesia merubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer. Selain itu, Sjahrir juga mengusulkan untuk membentuk partai politik. Perjuangannya juga dilakukan saat menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Sjahrir sebanyak tiga kali. Pada penelitian milik Hidayat ini, pembahasannya lebih diarahkan pada pemikiran Sjahrir tentang demokrasi. Penelitian tersebut sudah membahas mengenai sosialisme kerakyatan Sjahrir. Tetapi sama seperti penelitian yang sebelum-sebelumnya masih belum dijelaskan mengenai bentuk-bentuk sosialisme. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada sosialisme ala Sutan Sjahrir beserta bentuk-bentuknya.

Penelitian Mulyono (2010) berjudul *Pemikiran Politik Sutan Sjahrir Tentang Sosialisme Kerakyatan Untuk Mencapai Negara Kesejahteraan* memfokuskan pada perjalanan hidup Sutan Sjahrir dan konsep sosialisme

kerakyatan Sjahrir dalam mencapai negara kesejahteraan. Penelitian Mulyono mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa Sjahrir melihat sosialisme memiliki dua bentuk. Pertama, sosialisme saat kapitalisme masih muda. Pada abad 19 terjadi penjajahan dan penindasan sehingga banyak buruh menderita. Oleh karena itu sosialisme digunakan untuk memperjuangkan hak kaum tertindas. Kedua, sosialisme pada abad 20 yang dikualifikasikan oleh Sutan Sjahrir sebagai sosialisme modern. Sosialisme modern ini sudah meninggalkan pengakuan terhadap milik pribadi yang dianggap sebagai berhala dalam mempercepat kemajuan.

Sosialisme Sutan Sjahrir tidak jauh berbeda secara umum, yakni yang membawa ide untuk membentuk manusia yang ideal, rasional, bebas serta mandiri, bersifat dewasa tetapi tetap saling membantu terhadap sesama. Arti kerakyatan dalam sosialisme Sutan Sjahrir yakni sebagai penghayatan dan penegasan bahwa sosialisme tersebut menjunjung tinggi dasar serta asas persamaan derajat antar manusia. Penelitian yang dilakukan Mulyono lebih difokuskan pada konsep sosialisme Sjahrir untuk mencapai suatu negara yang sejahtera. Penelitian tersebut belum membahas mengenai bentuk-bentuk sosialisme dan bagaimana usaha Sjahrir untuk mewujudkan sosialismenya. Oleh sebab itu, peneliti akan membahas mengenai bentuk-bentuk sosialisme Sjahrir dan usaha Sjahrir dalam mewujudkannya yang memang belum dijelaskan dalam penelitian milik Mulyono.

Penelitian Hamid (2013) berjudul Pemikiran Politik Sjahrir dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1947 terfokus pada konsep sosialisme ala Sjahrir dan aktivitas politik Sjahrir sebelum dan pasca kemerdekaan. Hamid (2013) menjelaskan bahwa sosialisme memiliki dua sifat, yang pertama adalah memihak golongan melarat (kaum proletar). Sifat yang kedua adalah sifatnya yang merupakan sebuah ajaran dalam menyusun pergaulan hidup berdasar yang lain yang pernah dialami serta berlaku dalam masyarakat yang berpegang pada hak milik pribadi.

Konsep sosialisme Sjahrir banyak menginspirasi dunia internasional untuk banyak belajar dari negara Indonesia karena semangat sosialismenya dapat keluar dari belenggu penjajahan. Perkataan Sjahrir mengenai “Sosialisme adalah alat bantu perlawanan dalam melepaskan Indonesia dari tangan kolonialisme Belanda”, banyak dijadikan inspirasi untuk pemimpin negara Asia Tenggara melepaskan diri dari kolonialisme. Penelitian Hamid ini lebih diarahkan pada konsep sosialisme ala Sjahrir dan aktivitas politiknya sebelum dan sesudah kemerdekaan. Seperti penelitian lainnya penelitian tersebut masih belum membahas mengenai bentuk-bentuk sosialisme. Sehingga peneliti akan membahas mengenai bentuk-bentuk sosialisme yang memang masih belum dijelaskan.

Penelitian selanjutnya berupa jurnal penelitian yang berjudul Pemikiran Politik Sutan Sjahrir Tentang Sosialisme Sebuah Analisis Psikologi Politik. Jurnal ini terfokus pada psikologi politik Sjahrir yang mempengaruhi pemikirannya. Pramasanti, dkk (2013) menjelaskan bahwa pembentukan dan pematangan sosialisme Sutan Sjahrir terjadi ketika masa remaja, dewasa muda, dan dewasa. Semangat kebangsaan Sjahrir muncul ketika Sjahrir masih remaja. Saat masih remaja Sjahrir sudah bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda, namun Sjahrir masih tetap menjaga hubungan dengan orang-orang Belanda. Pada saat dewasa muda, Sjahrir semakin serius dalam mempelajari teori sosialisme di Belanda. Salah satu usahanya dengan mengikuti Perkumpulan Mahasiswa Sosial Demokrat Belanda. Pada masa dewasa, Sjahrir turut serta dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kemerdekaan, Sjahrir melakukan perjuangan melalui bawah tanah. Pasca kemerdekaan, perjuangan Sjahrir dibuktikan dengan adanya perjanjian Linggarjati, diplomasi beras ke India, serta Lake Succes. Jurnal milik Pramasanti, dkk, lebih banyak menjelaskan tentang psikologi Sjahrir yang mempengaruhi pemikirannya dan sedikit membahas mengenai sosialisme. Jurnal tersebut belum menyinggung tentang bentuk-bentuk dan usaha Sjahrir dalam mewujudkan sosialisme. Sehingga penelitian ini akan diarahkan pada pembahasan mengenai sosialisme dan bentuk-bentuknya, serta usaha Sjahrir dalam mewujudkannya.

Penelitian-penelitian di atas masih sebatas membahas mengenai konsep sosialisme yang digagas Sjahrir. Mengenai bentuk-bentuk sosialisme Indonesia milik Sutan Sjahrir belum dijabarkan secara detail. Jadi, posisi peneliti dalam penelitian ini adalah mengembangkan hal-hal yang sekiranya masih belum dijelaskan dalam penelitian di atas.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi pengetahuan. Pendekatan sosiologi pengetahuan adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti latar belakang pemikiran dari tokoh yang dikaji peneliti. Menurut Kartodirdjo (1993:180) dengan menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan peneliti dapat mengenali beragam-macam ideologi, dengan ini maka akan mudah dalam mengidentifikasi corak pemikirannya, ciri-ciri, serta prinsip hidup yang membentuk pemikirannya. Penerapannya dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi latar belakang dari terbentuknya pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika dan teori aksi. Teori hermeneutika adalah teori tentang penafsiran dan pemahaman text. Berdasarkan teori Hermeneutika yang dikemukakan oleh Wilhelm Dilthey (dalam Pranoto, 2010:47-48) bahwa pertimbangan sejarah terdapat dalam pemahaman atau pengertian. Menurut Dilthey (dalam Pranoto, 2010:47-48) pemahaman ada dua jenis yakni, (1) pemahaman dasar yang menggambarkan ekspresi-ekspresi individu, (2) pemahaman yang lebih tinggi yang membentuk berbagai macam ekspresi pemahaman elementer yang akan membentuk sebuah pola yang berkaitan. Sebagai upaya untuk mengerti pelaku sejarah, dapat dilakukan dengan cara menyusun imajinasi dalam pikiran peneliti tentang peristiwa, pikiran, serta emosi yang dilalui pelaku sejarah. Penggunaan teori ini, memungkinkan peneliti untuk menganalisis sumber primer yang akan digunakan dalam penelitian.

Ada tiga sumber primer yang digunakan peneliti yakni, Sosialisme Indonesia Pembangunan, Renungan dan Perjuangan, dan Perjuangan Kita. Setelah dianalisis, buku Sosialisme Indonesia Pembangunan menjelaskan mengenai bagaimana sosialisme Indonesia yang harus diperjuangkan dan tentang keadaan ekonomi dan politik Indonesia kala itu. Selain itu, Sjahrir juga memaparkan

tentang keadaan Indonesia kala itu. Analisis kedua yakni buku Renungan dan Perjuangan yang menggambarkan tentang keadaan Sjahrir yang berada dalam penjara serta kondisi Indonesia saat itu. Analisis yang ketiga yakni pamflet Perjuangan Kita yang menjelaskan tentang Sjahrir yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Jadi dengan ini peneliti dapat menafsirkan text tentang tulisan-tulisan Sutan Sjahrir dengan cara mengimajinasikan bagaimana peristiwa, pemikiran, dan emosi yang dituangkan Sjahrir dalam tulisannya.

Selanjutnya adalah teori tindakan milik Weber. Menurut Weber, tindakan yang dimaksudkan adalah tindakan individu yang memiliki makna bagi dirinya sendiri dan ditujukan kepada orang lain (dalam Ritzer, 1985:44). Tindakan tersebut dapat diarahkan kepada sekelompok orang atau hanya seorang individu. Namun, tindakan sosial tidak bisa ditujukan kepada objek mati. Cara untuk memahami tindakan seseorang adalah dengan penafsiran dan pemahaman. Peneliti harus bisa memahami tujuan si aktor yang melakukan tindakan tersebut. Sedangkan cara untuk memahami tujuan si aktor ada dua cara yakni, (1) melalui kesungguhan dan (2) dengan mengenang dan mendalami pengalaman dari si aktor (Weber dalam Ritzer, 1985:46). Jadi, pada penelitian ini peneliti harus bisa memahami dan menafsirkan tujuan dari tindakan Sjahrir dalam usaha mewujudkan sosialisme Indonesia. Upaya untuk memahami tujuan tersebut adalah dengan menempatkan peneliti dalam posisi Sjahrir, serta berusaha untuk memahami tindakan yang dilakukannya.

Berdasarkan rasionalitas tindakan sosial, Weber membaginya ke dalam 4 tipe, yakni:

1. *Zwerk Rational*

Yakni tindakan sosial murni. Aktor tidak hanya menentukan cara yang terbaik dalam mencapai tujuannya, melainkan juga menentukan nilai dari tujuan yang akan dicapainya.

2. *Werktrational Action*

Menurut tindakan ini, si aktor tidak bisa menilai apakah cara yang dipilihnya adalah cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang akan diraihinya.

3. Affectual Action

Menurut tipe ini, tindakan yang dilakukan dibuat-buat. tindakan yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh emosi dan kepura-puraan dari si aktor.

4. Traditional Action

Tindakan ini didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan di masa lalu saat dalam mengerjakan sesuatu (Ritzer, 1985:47-48).

Apabila diaplikasikan dalam penelitian ini, tipe 1 dan 2 tidak sesuai karena tindakan tersebut seringkali sebagai tanggapan yang reflek akibat rangsang dari luar. Tindakan yang dilakukan Sjahrir dalam mewujudkan sosialisme Indonesia bukan suatu tindakan yang otomatis, melainkan sudah dipikirkan secara matang dan memiliki makna yang sangat berarti. Sedangkan untuk tipe 3 juga tidak sesuai karena si aktor tidak bisa menilai apakah cara yang ditempuh dalam mencapai suatu tujuan benar atau tidak. Sedangkan Sjahrir sangat memahami dengan baik cara yang digunakannya dalam mewujudkan sosialisme Indonesia. Sehingga tipe yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah tipe 1, yakni si aktor sangat memahami bahwa cara yang dilakukannya dalam mencapai tujuan adalah cara yang benar dan baik, serta memahami bahwa tujuan yang akan diraihinya sangat bermakna. Sjahrir sebagai seorang aktor sangat memahami bahwa usaha-usaha yang dilakukannya untuk mewujudkan sosialisme Indonesia adalah cara yang benar dan tujuan tersebut demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji pemikiran Sutan Sjahrir mengenai sosialisme Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menggunakan empat langkah metode penelitian sejarah yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Gottschalck, 1986:18). Tahap yang pertama adalah heuristik yakni pengumpulan sumber-sumber sejarah (Gottschalck, 1986:18). Peneliti mengumpulkan sumber-sumber sejarah mengenai pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia. Sumber sejarah yang dimaksud ada dua jenis yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dicari peneliti berupa sumber informasi atau dokumen yang berasal dari kurun waktu yang diteliti, baik yang ditulis oleh pelaku yakni Sutan Sjahrir atau pun saksi mata (Gottschalck, 1986:35). Sumber primer yang digunakan peneliti adalah karya Sjahrir yang berjudul *Sosialisme Indonesia Pembangunan, Perjuangan Kita, serta Renungan dan Perjuangan*. Sedangkan untuk pencarian sumber sekunder, peneliti mencari karya-karya sejarah yang merujuk pada sumber-sumber primer. Salah satu sumber sekunder yang digunakan peneliti adalah karya Mrazek yang berjudul *Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia*.

Tahap kedua adalah kritik, peneliti melakukan verifikasi sumber-sumber yang didapat sebagai tujuan untuk melihat apakah sumber yang digunakan asli atau tidak (Gottschalck, 1986:18). Kritik memiliki dua macam yakni kritik eksternal dan kritik internal. Pertama adalah kritik eksternal, peneliti melihat keaslian suatu sumber melalui pengamatan secara fisik. Kritik fisik ini dapat dilakukan dengan cara melihat jenis kertas pada sumber sejarah, kualitas kertas, bahan kertas, gaya tulisan, pengarang, dan gaya bahasa Sutan Sjahrir. Peneliti menilai keadaan fisik dari sumber-sumber yang digunakan terutama sumber primer karya Sutan Sjahrir. Setelah didapat bahwa sumber yang digunakan peneliti adalah sumber yang otentik, maka selanjutnya adalah kritik internal. Peneliti melakukan kritik internal dengan menilai keabsahan isi sumber. Peneliti

membandingkan sumber satu dengan sumber yang lain untuk mengetahui secara mendalam apakah isi sumber tersebut dapat dijadikan pedoman untuk mengungkap fakta-fakta sejarah tentang pemikiran Sutan Sjahrir. Setelah melakukan kritik eksternal dan kritik internal, sumber-sumber yang telah dikumpulkan peneliti dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah mengenai Pemikiran Sutan Sjahrir mengenai Sosialisme Indonesia Tahun 1915–1960.

Tahap yang ketiga adalah tahap interpretasi. Interpretasi dilakukan peneliti untuk menyusun fakta sejarah menjadi sebuah alur yang harmonis. Setiap sejarawan dapat menginterpretasikan suatu peristiwa secara berbeda-beda. Hal tersebut akan memunculkan pandangan yang objektif. Namun akan dapat melengkapi peristiwa yang satu dengan yang lain. Tugas peneliti dalam hal ini adalah menyatukan fakta-fakta yang ditulis oleh sejarawan untuk mendapatkan sebuah alur cerita. Awalnya peneliti mencari fakta-fakta pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia, kemudian fakta-fakta yang ada disatukan agar menjadi rangkaian yang sesuai yakni pemikiran Sutan Sjahrir.

Setelah melaksanakan tiga tahap di atas yakni heuristik, kritik, dan interpretasi, tahap terakhir yang dilakukan peneliti adalah tahap historiografi. Peneliti dalam tahap ini menyusun fakta-fakta sejarah yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber agar menjadi sebuah cerita sejarah (Gottschalck, 1986: 33). Tahap terakhir ini peneliti merangkai fakta sejarah secara sistematis sehingga dapat tersusun menjadi sebuah karya tulis yang berjudul Pemikiran Sutan Sjahrir Tentang Sosialisme Indonesia Tahun 1915-1960.

3.2 Sumber Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber-sumber primer berupa karya-karya Sutan Sjahrir dan beberapa sumber primer sebagai penunjang. Sumber-sumber primer tersebut di antaranya Sosialisme Indonesia Pembangunan, Renungan dan Perjuangan, serta Perjuangan Kita. Dalam hal pengumpulan sumber, peneliti mencari berbagai sumber dari berbagai tempat. di antaranya Perpustakaan Universitas Jember dan situs jual beli buku online. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber sekunder. Sumber sekunder yang digunakan

peneliti di antaranya, buku karya Rosihan Anwar yang berjudul *Mengenang Sjahrir dan Sutan Sjahrir: Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului zamannya*. Ada pula buku dari Rudolf Mrazek yang berjudul *Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia*, serta beberapa sumber sekunder lainnya.

Penelitian ini terdapat dari tujuh bab yakni Bab I Pendahuluan yang memiliki sub bab latar belakang masalah, penegasan pengertian judul, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2 berisi tinjauan pustaka yang berupa review penelitian terdahulu, dan teori serta pendekatan. Bab 3 berisi metode penelitian sejarah yang berupa heuristik, kritik, interpretasi, historiografi serta rancangan sistematika skripsi.

Pada bab 4 membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pemikiran Sutan Sjahrir, dalam bab ini terdapat dua sub bab yakni faktor sosial budaya dan faktor pengalaman politik. Faktor sosial budaya berisi mengenai faktor lingkungan keluarga, lingkungan budaya Minang dan lingkungan pendidikan yang mempengaruhi pemikirannya tentang sosialisme. Faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhi pemikiran Sutan Sjahrir adalah lingkungan keluarga yang berkecukupan dan kebarat-baratan sehingga membuatnya pemikirannya menjadi lebih terbuka dan lebih kritis. Faktor budaya Minang membuat pemikiran Sjahrir menjadi dinamis (selalu ingin berubah). Budaya Minang mampu melewati gerusan arus modernisasi dengan cara memasukkan unsur-unsur dari luar yang dianggap baik. Oleh karena itu, Sjahrir mempelajari sosialisme barat kemudian diterapkannya di Indonesia sehingga menjadi sosialisme Indonesia.

Faktor pendidikan yang mempengaruhi pemikiran Sutan Sjahrir salah satunya ketika Sjahrir berada di Bandung, jiwa nasionalismenya tumbuh karena terpukau dengan pidato Dr. Tjipto Mangunkusumo. Lingkungan pendidikan yang berbau barat, membuatnya banyak mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari luar salah satunya sosialisme. Sub bab kedua berisi mengenai beberapa organisasi yang pernah diikuti Sjahrir. Sewaktu Sjahrir masih muda, Sjahrir banyak mengikuti perkumpulan-perkumpulan pemuda untuk saling bertukar pikiran tentang permasalahan politik. Selain itu, selama berkuliah di

Belanda Sjahrir juga mengikuti Perhimpunan Indonesia bersama dengan rekannya Mohammad Hatta.

Bab 5 adalah bentuk-bentuk pemikiran Sutan Sjahrir mengenai sosialisme, bab ini berisi sosialisme kerakyatan Sjahrir, sosialisme politik, sosialisme ekonomi. Sosialisme kerakyatan Sjahrir adalah sosialisme yang mengutamakan kebebasan dan menghargai setiap individu-individu itu sendiri. Sosialisme politik dalam penelitian ini berupa kebebasan bagi rakyat Indonesia dalam belajar politik dan terjun dalam kancah politik Indonesia. Sedangkan sosialisme ekonomi yang dimaksud adalah kebebasan Indonesia dalam menentukan perekonomiannya sendiri.

Pada bab 6, peneliti membahas mengenai usaha Sutan Sjahrir dalam mewujudkan sosialisme Indonesia. Sub bab berisi usaha melalui BP-KNIP dan usaha melalui partai politik. Usaha dalam mewujudkan sosialisme Indonesia Sjahrir adalah dengan mengubah sistem presidensiil menjadi parlementer melalui BP-KNIP. Perubahan sistem pemerintahan tersebut membawa Sjahrir menuju kursi Perdana Menteri dan menjabat selama tiga kali berturut-turut. Usaha yang terakhir adalah usaha melalui partai politik mulai dari Paras yang kemudian bergabung dengan Parsi menjadi Partai Sosialis. Hingga pada akhirnya golongan Sjahrir memisahkan diri dan membentuk PSI pada 1948. Bab 7 berisi tentang penutup. Penutup berisi kesimpulan dari pembahasan di atas dan juga berupa saran.

**BAB 4.FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PEMIKIRAN
SUTAN SJHRIR TENTANG SOSIALISME INDONESIA
TAHUN 1915-1942**

Pada bab empat ini, peneliti akan memaparkan mengenai faktor-faktor apa saja yang telah mempengaruhi pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia. Sutan Sjahrir adalah salah satu tokoh yang sangat berjasa dalam membangun negara Indonesia. Sjahrir sudah mengerahkan waktu dan tenaganya untuk membangun Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan bangsa asing, bukan lagi negara yang ditindas seperti zaman penjajahan. Namun, perannya yang begitu besar tidak sebanding dengan apresiasi yang harusnya didapatkan dari masyarakat Indonesia. Rakyat masih sangat minim pengetahuan akan tokoh besar satu ini.

Sutan Sjahrir merupakan salah satu tokoh yang memiliki kemampuan intelektual yang besar dan selalu berpandangan jauh ke depan. Kepintarannya tersebut bahkan diakui serta diperhitungkan oleh lawan-lawan politiknya. Meski memiliki kemampuan tersebut, justru membuat rakyat kadang kala tidak paham dengan jalan pikiran Sjahrir. Hal itu membuat Sjahrir dianggap sebagai seorang pemikir yang mendahului zamannya.

Selain cara berpikirnya yang cerdas, Sutan Sjahrir juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang menganut ideologi sosialisme. Sjahrir mengharapkan agar Indonesia menjadi negara yang terbebas dari ketidakadilan dan penghinaan yang dilakukan bangsa asing. Sosialisme Indonesia digunakan Sjahrir sebagai jalan dalam mewujudkan cita-citanya tersebut.

Sebelum membahas pemikiran Sjahrir tentang sosialisme Indonesia, alangkah baiknya membahas tentang faktor yang melatarbelakangi pemikirannya. Pada dasarnya pemikiran seseorang tidak mungkin terbentuk dengan begitu mudahnya tanpa ada faktor yang melatarbelakangi. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh besar dalam membentuk pola pemikiran seseorang. Begitu juga

dengan Sjahrir yang pemikirannya sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya serta faktor politik.

4.1 Faktor Sosial Budaya

4.1.1 Faktor Lingkungan Keluarga

Sutan Sjahrir lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ayah Sjahrir bernama Mohamad Rasad yang berasal dari Kota Gadang, Sumatera Barat. Mohamad Rasad memiliki gelar Maharaja Soetan yang bekerja sebagai Jaksa Kepala *Landraad* di Pengadilan Negeri Medan (Anwar, 2011:9). Profesi jaksa sangat dihormati dan dimuliakan karena menjadi pembuka gerbang untuk menuju dunia yang lebih luas. Hal itu dibuktikan dengan sering berpindahannya keluarga Sjahrir ke luar daerah Minangkabau. Kepindahan Sjahrir dari satu daerah ke daerah lain tentu berpengaruh pada pola pikirnya untuk selalu beradaptasi dan menemukan hal-hal baru untuk dipelajari.

Ibu Sjahrir bernama Poetri Siti Rabiah yang berasal dari Natal, Sumatera Utara. Sjahrir dapat digolongkan berasal dari keluarga yang mapan. Orang tuanya masih memiliki garis keturunan bangsawan. Ibunya yakni Siti Rabiah adalah seorang cucu dari Tuanku Besar Si Intan, raja ketujuh kerajaan Natal. Bila melihat garis keturunannya, Siti Rabiah masih bersaudara dengan ibu dari Sutan Takdir Alisjahbana (sastrawan dan budayawan Indonesia). Keduanya adalah keturunan dari putra Tuanku Besar Si Intan, yakni Sutan Kabidun. Nenek Sjahrir yang bernama Puti Johar Maligan dan nenek Sutan Takdir yang bernama Puti Malelo merupakan kakak beradik putri dari Sutan Kabidun.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa keluarga Sjahrir merupakan keluarga yang mampu. Selain karena silsilah keluarganya yang berasal dari keturunan bangsawan, pekerjaan Ayah Sjahrir yang merupakan seorang jaksa membuat keluarganya semakin disegani. Hal ini menjadi salah satu alasan Sutan Sjahrir dapat berkesempatan mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah terbaik. Gaya dan pemikirannya yang kebarat-baratan nyatanya telah didapat Sjahrir sejak kecil. Keluarganya yang merupakan orang terpandang, tinggal di kawasan Belanda. Ibu Sjahrir adalah orang yang kebarat-baratan, salah satu sisi kebaratannya yang paling menonjol adalah kecintaannya pada komedi stambul.

Komedi ini merupakan teater keliling yang bergaya Istanbul dan hampir mirip seperti pertunjukan sirkus Eropa. Karena sifatnya yang bergaya barat ini tentu mempengaruhi pola asuh terhadap Sjahrir. Itulah sebabnya Sjahrir muda tidak pernah berkumpul dengan para pemberontak, sehingga pemikirannya tentang perjuangan melawan kolonial masih belum terbentuk sepenuhnya.

Lingkungan keluarga Sjahrir yang kebarat-baratan sangat mempengaruhi pemikirannya sehingga menjadi kebarat-baratan di antaranya menjadi lebih kritis, lebih terbuka, serta rasionalis. Pemikirannya itu menjadikan Sjahrir lebih mudah untuk menerima pemikiran-pemikiran barat namun tidak dicerna secara mentah-mentah. Sehingga ketika Sjahrir mempelajari sosialisme, ideologi tersebut tidak serta-merta diterapkan di Indonesia. Tentu dengan pemikirannya yang kritis, Sjahrir mampu memformulasikan sosialisme dengan kondisi Indonesia kala itu, yang kemudian menjadi sosialisme kerakyatan.

4.1.2 Faktor Budaya Minang

Sutan Sjahrir dibesarkan dalam keluarga yang masih memegang teguh adat Minang. Adat Minang dikenal sebagai adat yang tidak mudah tergerus dengan arus modernisasi. Orang-orang Minang yang memiliki sifat ingin terus bergerak/berubah sesuai dengan perkembangan zaman menjadi alasan kuat bagi mereka untuk tetap eksis. Pandangan hidup yang dinamis inilah yang membuat masyarakat Minang mampu mengidealisasikan unsur-unsur kebudayaan mereka dengan unsur-unsur dari luar. Unsur-unsur dari luar inilah yang digunakan masyarakat Minang untuk memodernisasikan kebudayaannya. Tentu saja unsur yang dimaksud adalah unsur-unsur yang dianggap baik bagi masyarakat Minang. Unsur-unsur tersebut tidak akan melemahkan apalagi merusak adat Minang itu sendiri.

Salah satu jalan yang digunakan orang Minang untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan merantau. Tugas merantau ini hanya ditujukan kepada kaum lelaki. Ibu berperan sebagai inti dari kebudayaan Minang itu sendiri, sedangkan ayah hanya bergerak di sekitarnya dan tidak terlalu terikat pada inti tersebut (Mrazek, 1996:10). Di daerah lain, faktor ekonomi menjadi alasan utama seseorang untuk pergi merantau. Merantau dianggap cara yang efektif untuk

meningkatkan perkonomian si perantau. Sedangkan di Minang, merantau sudah menjadi bagian dari kebudayaan Minang. Alasan utama orang Minang merantau adalah untuk mencari pengalaman, mencari jati diri, serta mencari unsur-unsur baik yang berasal dari daerah rantau untuk diterapkan di daerah asalnya. Meskipun pada akhirnya faktor ekonomi juga turut menentukan sukses tidaknya seorang perantau saat kembali ke tanah Minang.

Menurut Alfian, dalam visi falsafah Minangkabau rantau dapat membuka mata orang-orang Minang untuk lebih mengenal dunia luar sehingga mereka akan menemukan hal-hal baru yang kemudian dapat dibawa kembali ke Minang (dalam Abdullah, 1983:137-145). Orang yang merantau dituntut untuk mampu membandingkan dunia Minangkabau dengan dunia rantaunya agar dapat menyimpulkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kebiasaan orang-orang Minang dalam merantau, merupakan kebiasaan yang teratur untuk bermigrasi ke daerah luar Minang dan kemudian kembali untuk menjamin berlangsungnya suatu penyesuaian antara kebiasaan setempat dengan kebiasaan yang telah dipelajari si perantau (Legge, 2003:52). Perantau yang tidak sukses akan dipandang sebelah mata, sedangkan perantau yang sukses akan dibanggakan karena dianggap telah berprestasi besar. Hal ini membuat para laki-laki Minang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kesuksesan agar menjadi kebanggaan kampung halamannya. Oleh karena itu tak sedikit orang-orang Minang yang pada akhirnya memiliki pengaruh besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Beberapa tokoh tersebut di antaranya Sjahrir, Hatta, Tan Malaka, Chairil Anwar, Agus Salim, dan masih banyak tokoh besar lainnya.

Tradisi rantau ini menuntut Sjahrir untuk cepat memahami lingkungan barunya. Tradisi rantau ini sangat mempengaruhi pemikirannya untuk selalu berpandangan dinamis (selalu ingin berubah/bergerak), dimana pandangannya ini akan sangat berpengaruh terhadap keinginan Sjahrir untuk merubah nasib masyarakat Indonesia. Keinginan untuk mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia dilakukannya dengan mewujudkan cita-cita sosialisme kerakyatan.

4.1.3 Faktor Lingkungan Pendidikan

Sutan Sjahrir tidak terlalu lama tinggal di Minangkabau. Sang ayah yang bekerja sebagai Jaksa menuntutnya untuk sering berpindah tempat, mulai dari pindah ke Jambi sampai pindah ke Medan. Di Medan inilah Sutan Sjahrir memulai aktivitas pendidikannya. Beruntungnya, Sjahrir lahir pada saat Belanda sedang gencar-gencarnya menerapkan politik etis. Politik etis merupakan politik balas budi karena pemerintah kolonial dianggap memiliki hutang besar pada rakyat Indonesia. Hal ini karena pemerintah kolonial telah menguras kekayaan Indonesia baik dalam bentuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu hal yang mulai diperhatikan pihak Belanda dengan adanya politik etis adalah pendidikan bagi rakyat Indonesia.

Pendidikan mendapatkan sambutan yang cukup luar biasa di tempat Sjahrir tinggal. Di pulau Sumatera khususnya Padang saja, terdapat sekitar 23 sekolah yang didirikan. Bahkan angka tersebut lebih banyak dibandingkan dengan kawasan Jawa dan Madura yang secara keseluruhan hanya terdapat 53 sekolah saja. Hal tersebut dikarenakan daerah luar Jawa lebih diprioritaskan dalam membangun ekonomi baru.

Setelah berumur satu tahun, Sjahrir berpindah ke daerah Jambi mengikuti ayahnya yang dipindah tugaskan. Di Jambi pun, Sjahrir tidak lama tinggal. Saat berumur empat tahun, Sjahrir pindah ke Medan. Sejak kecil Sjahrir merupakan anak yang pandai, bahkan dapat dikatakan bahwa Sjahrir adalah anak terpandai di keluarganya. Hanya saja satu kelemahannya yakni tidak bisa menulis dengan rapi. Maklum saja kalau Sjahrir pandai, hal ini karena memang berasal dari keluarga terpelajar. Sjahrir juga tinggal di lingkungan elite sehingga dapat mendapatkan akses pendidikan dengan mudah.

Pada usia enam tahun, Sjahrir bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS). Pada saat itu, ELS merupakan sekolah rendah Eropa yang terbaik dan termasuk sekolah yang modern. Sekolah ini juga merupakan sekolah dasar berbahasa Belanda. Kurikulum sekolah ini terdiri dari mata pelajaran menghitung, menulis, membaca, sejarah, ilmu bumi, bahasa Belanda (Nasution, 1995:92). Berdasarkan peraturan yang berlaku, kurikulum dapat diperluas dengan mata

pelajaran yang lebih tinggi tingkatannya seperti sejarah umum, matematika, pertanian, menggambar tangan, ilmu alam, pendidikan jasmani, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, menjahit serta pekerjaan tangan bagi para wanita (Nasution, 1995:92). Melihat dari kurikulum ELS, dapat disimpulkan bahwa waktu Sjahrir dihabiskan untuk mempelajari budaya dan geografis Belanda, sehingga semangat kebangsaannya masih belum tumbuh pada masa-masa tersebut. Hal positifnya adalah Sjahrir menjadi semakin terbuka dan terbiasa dengan pemikiran barat yang nantinya akan mempermudah Sjahrir dalam mempelajari sosialisme. Selain pendidikan formal yang dijalannya, Sjahrir tidak lupa dengan pendidikan agamanya. Bahkan ketika sore tiba, Sjahrir belajar mengaji. Meskipun begitu, pendidikan agama islam ini tidak terlalu mempengaruhi Sjahrir dalam pembentukan pola pikirnya.

Setelah lulus ELS pada 1920, Sjahrir melanjutkan sekolah ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Kurikulum MULO berupa program yang terdiri atas 4 bahasa yakni Belanda, Inggris, Jerman dan Prancis, setengah dari waktu pelajaran digunakan untuk mempelajari bahasa, sepertiga untuk ilmu pengetahuan alam dan matematika, seperenam mempelajari ilmu pengetahuan sosial (Nasution, 1995:123). Tidak jauh berbeda dengan ELS, MULO juga hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran bergaya barat.

Sjahrir remaja memiliki hobi yang sama seperti halnya anak laki-laki lainnya yakni sepak bola. Selain sepak bola, Sjahrir juga piawai memainkan biola. Menurut Anwar (2011:10) Sjahrir sering mengamen di Hotel de Boer, Medan, untuk memberi hiburan pada orang-orang asing. Imbalan yang didapatkannya digunakan untuk menambah uang saku. Hal ini menandakan bahwa Sjahrir sedari muda sudah menunjukkan sikap yang mandiri. ELS dan MULO merupakan sekolah yang modern dan memiliki murid-murid dari kalangan yang berada. Masuknya Sjahrir ke ELS dan MULO membuatnya lebih sering bergaul dengan banyak kalangan termasuk anak-anak Eropa. Meskipun bersekolah dengan anak-anak Eropa, Sjahrir tidak pernah merasa tertindas atau terkucilkan karena riwayat keluarganya yang memang sudah kebarat-baratan. Sering berkumpulnya Sjahrir dengan anak-anak Eropa membuat pikirannya lebih terbuka terhadap pemikiran-

pemikiran barat. Oleh karena itu, Sjahrir tidak pernah merasa minder apabila dihadapkan dengan lingkungan berbau Eropa.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di MULO, Sjahrir disarankan oleh keluarganya untuk meneruskan pendidikan ke Algemeene Middelbare School (AMS) di daerah Bandung, Jawa Barat. AMS merupakan sekolah multiras yang terdiri dari anak-anak bumiputra, Eropa serta Cina. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Sjahrir tidak pernah merasakan diskriminasi dari anak-anak Eropa karena hal itu dinetralisir oleh sifatnya yang kebarat-baratan. Pindah ke Bandung Sjahrir menumpang di rumah Radena yang merupakan saudara tirinya. Ayahnya yang memiliki lebih dari satu istri memungkinkan Sjahrir memiliki banyak saudara tiri. Sjahrir mengambil jurusan A II atau jurusan Budaya Barat Klasik. Kurikulum AMS terdiri dari mata pelajaran umum berupa bahasa Melayu, bahasa Belanda, bahasa Inggris, geografi, sejarah, matematika, zoologi, undang-undang negara, botani serta pendidikan jasmani (Nasution, 1995:138). Sedangkan mata pelajaran khusus pada jurusan A II terdiri dari bahasa Latin, etnologi Indonesia, menggambar tangan, kimia, fisika, dan bahasa Jerman (Nasution, 1995:138). Karena AMS merupakan jembatan untuk menempuh pendidikan di Belanda, maka mata pelajarannya berorientasikan barat dan bahasa Belanda sebagai pengantar. Oleh karena itu, Sjahrir dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Amsterdam pada 1929.

Menurut Hamdani (dalam Anwar, 1980:71), Sjahrir orang yang sedikit kaku dan jarang bergaul bersama temannya, bahkan saat jam istirahat Sjahrir lebih sering berjalan-jalan sendirian atau hanya sekedar berdiam diri di bawah sinar matahari. Pandangan kawan-kawannya mulai berubah ketika Sjahrir mulai menunjukkan kecerdasannya. Lama kelamaan Sjahrir juga mulai menunjukkan sikap yang ramah dan gampang bergaul.

Sejak muda Sjahrir sudah memperlihatkan sikapnya yang kritis. Saat belajar, Sjahrir tidak hanya menghafal namun juga mengutamakan pengertian yang terkandung di dalamnya. Pada tahun 1926, terjadi pemberontakan PKI melawan kolonial Belanda. Kejadian ini mulai mempengaruhi pemikirannya tentang perkembangan rakyat Indonesia, yakni tentang bagaimana rakyat mulai

memperjuangkan untuk mencari keadilan atas penindasan dan penghisapan yang dilakukan pihak kolonial. Hal tersebut ditambah dengan pidato Dr. Tjipto Mangunkusumo tentang semangat kebangsaan yang didengarnya ketika di alun-alun Bandung (Tempo, 2017:13). Pidato itu semakin mempengaruhi pemikirannya tentang nasionalisme. Semenjak saat itu Sjahrir mulai menenggelamkan diri dalam semangat kebangsaan dan mulai mengikuti perkumpulan-perkumpulan pemuda.

Kepedulian Sjahrir terhadap rakyat Indonesia mulai dibuktikan dengan mendirikan sebuah perguruan nasional “Tjahja Volksuniversiteit” atau Universitas Rakyat “Tjahja” yang bertugas untuk memberantas buta huruf dan ditujukan bagi anak-anak pribumi (Anwar, 2011:11). Guru yang dipekerjakan untuk sekolah ini berasal dari pemuda-pemudi yang masih berstatus pelajar. Kegiatan belajar-mengajar dilakukan pada waktu sore hari, karena saat pagi hari para guru masih harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Menurut Hamdani (dalam Anwar, 1980:75), orang tua dari anak-anak yang bersekolah di sana tidak perlu membayar uang bulanan, hanya perlu memberikan sepiring nasi beserta lauknya kepada para pengajar setiap bulannya. Biaya yang dibutuhkan untuk membuka sekolah tidaklah kecil, butuh dana untuk menyewa tempat, menyediakan buku-buku serta bangku-bangku untuk anak-anak belajar bukanlah perkara mudah. Kadangkala dana yang didapat berasal dari luar sekolah serta usaha yang dilakukan oleh beberapa anggota Pemuda Indonesia. Salah satunya dengan mendirikan sebuah klub sandiwara yang diberi nama Batovis. Meski pada akhirnya sekolah ini diserahkan pada Taman Siswa karena kekurangan dana dan pengajar. Kegiatan tersebut semakin menyadarkan Sjahrir bahwa rakyat benar-benar menderita dengan adanya kolonialisme Belanda. Rakyat kelas bawah yang semestinya juga mendapatkan pendidikan layak harus menerima kenyataan bahwa pendidikan masih diperuntukkan untuk kalangan menengah atas. Walaupun Sjahrir sangat memahami penderitaan rakyat akibat kolonialisme, namun Sjahrir tidak pernah melontarkan kebencian terhadap bangsa Belanda. Hal ini cukup wajar mengingat Sjahrir dibesarkan dengan pengaruh barat.

Pada 1929, Sjahrir dinyatakan lulus dari AMS dengan nilai yang memuaskan. Di tahun yang sama, Sjahrir berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan (Gambar 1). Di Negara Kincir Angin tersebut, Sjahrir tinggal bersama dengan kakaknya yang bernama Sjahrizal Djoehana yang kebetulan suaminya yakni Djoehana Wiradi Karta sedang melanjutkan pendidikan pasca sarjana jurusan Ilmu Kedokteran. Siti Rabiah memang sudah mempercayakan Sjahrir kepada Djoehana mengingat peran perempuan Minang yang menjadi pengatur segala urusan keluarga. Mengikuti keinginan keluarga, Sjahrir masuk ke Fakultas Hukum Gemeente Universiteit van Amsterdam (Anwar, 2011:13). Kepindahannya dari Bandung ke Belanda jauh lebih mudah daripada kepindahannya dari Medan ke Bandung. Di Bandung pergaulan Sjahrir terbatas, diskusi yang dilakukan dengan teman-temannya hanya seputar kondisi politik dan kolonialisme Belanda. Sedangkan di Belanda, dimana orang-orang dengan berbagai macam pengetahuan berkumpul, fasilitas lengkap, serta tidak adanya kelas sosial membuat Sjahrir lebih mudah bertukar pikiran dengan orang-orang dari segala penjuru, serta bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru. Jiwa dan pemikirannya yang kebaratan menjadi semakin berkembang. Perlakuan diskriminatif yang didapat rakyat Indonesia benar-benar tidak nampak di negara Belanda. Hal ini semakin membuat Sjahrir tenggelam dalam iklim barat yang maju dan modern.

Tak berselang lama di Belanda, Sjahrir mulai menunjukkan ketertarikan dengan sosialisme. Setelah perang dunia I, Eropa terutama sedang dilanda semangat zaman atau yang biasa disebut dengan *zeitgeist*. Zaman yang dipenuhi dengan semangat pembebasan kaum buruh dari penindasan, keterbelakangan, kemiskinan, serta perjuangan menaikkan derajat setiap kaum buruh tanpa terkecuali. Sjahrir juga turut terkena dampak dari *zeitgeist*. Oleh karena itu, Sjahrir terpicu untuk mempelajari sosialisme lebih mendalam. Sjahrir segera mengirim sepucuk surat kepada Salomon Tas yang merupakan ketua dari Amsterdamsche Sociaal Democratische Studenten Club (Perkumpulan Mahasiswa Sosial Demokrat Amsterdam). Baginya, sosialisme merupakan ideologi yang cocok

untuk diterapkan di Indonesia. Ideologi yang dianggap ampuh untuk melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda yang sudah terjadi selama ratusan tahun.

Kolonialisme merupakan sebuah permasalahan yang menjadi perhatian utama dalam SDAP (partai sosialis) maupun perkumpulan mahasiswa sosial demokrat pada waktu itu. Menurut Tas (dalam Anwar, 1980:233), mereka hanya memiliki sedikit komunikasi dengan orang-orang Indonesia di Belanda yang cenderung menghindari kelompok politik Belanda. Mengetahui keinginan Sjahrir untuk bergabung dengan perkumpulan yang diketuai Tas tersebut, membuat Sal Tas tidak berpikir panjang untuk segera bertemu dengan Sjahrir.

Meski kuliah di Universitas terkemuka, Sjahrir tidak pernah kehilangan niatnya untuk menjelajahi dunia luar. Sjahrir bahkan lebih sering berada di luar kampus untuk keluyuran daripada hanya duduk manis mengikuti kegiatan perkuliahan. Tempat yang sering Sjahrir datangi adalah tempat perkumpulan mahasiswa serta pusat-pusat budaya Amsterdam. Kecintaannya pada teater sedari muda membuatnya cukup sering mengunjungi sebuah gedung teater tua bernama Standsschouwburg dan gedung bioskop Cinema Turchinski (Tempo, 2017:22).

Sal Tas pernah kehilangan kontak dengan Sjahrir. Selain membaca berbagai macam buku tentang sosialisme, Sjahrirmemang berkelana mencari kawan radikal, yakni kaum anarkis kiri. Kaum anarkis tersebut sangat mengharamkan semua yang berbau kapitalisme. Mereka bahkan menghindari bekerja dalam sistem kapitalisme, serta membagi segalanya berdasar prinsip sama rata sama rasa. Berdasarkan pergaulannya dengan kaum anarkis, pengetahuan Sjahrir tentang sosialisme menjadi semakin bertambah. Pengalaman Sjahrir tersebut membuatnya mampu untuk menganalisis sosialisme seperti apa yang harus diterapkannya di Indonesia.

Setelah keluarga Djoehana kembali ke Indonesia, Sjahrir menumpang tinggal di rumah Tas. Mengikuti jejak kawan-kawannya dalam mendalami sosialisme, Sjahrir pindah kuliah dari Amsterdam ke Leiden, mendaftar di Leiden School of Indology (Santoso, 2014:28). Kiriman uang yang biasa diberikan ayahnya mendadak berhenti. Akhirnya Sjahrir bekerja pada sekretariat Federasi Buruh Transport International. Selain untuk mendapatkan uang saku, Sjahrir

memang berencana untuk mempelajari sosialisme lebih dalam dengan cara terjun langsung dalam gerakan sarekat pekerja. Berbeda dengan orang lain yang mempelajari sosialisme hanya melalui buku, Sjahrir justru berpikir akan lebih mudah untuk mempelajari sosialisme apabila turut mencemplungkan diri dengan sarekat buruh. Walaupun kenyataannya federasi tersebut bukan sarekat buruh yang sesungguhnya. Masuknya Sjahrir ke federasi tersebut sedikit banyak menambah wawasan Sjahrir mengenai pergerakan sosialis di Eropa. Selain itu, Sjahrir juga sering membaca buku-buku yang menjelaskan tentang teori-teori sosialisme di antaranya buku karya Rosa Luxemburg dan Hilferding yang berisi mengenai imperialisme, buku karya Otto Bauer, Karl Kautsky, dan Hendrik de Man yang membahas mengenai polemik menghisab pergerakan sosialisme waktu itu (Anwar, 1980:238).

Lingkungan pendidikan ELS, MULO, dan AMS membuat pemikiran Sjahrir semakin condong ke barat. Kurikulumnya yang memang bercorak Belanda membuat pemikirannya lebih banyak diisi pengetahuan-pengetahuan barat. Namun, hal tersebut diimbangi dengan nasionalisme yang mulai tumbuh saat bersekolah di Bandung. Pemikirannya yang kebarat-baratan itu menjadikan Sjahrir lebih mudah dalam mengenyam pendidikan di Belanda. Bersekolah di Belanda mengantarkan Sjahrir kepada paham sosialisme yang digunakannya sebagai cara untuk menghilangkan penindasan dan penghisapan rakyat Indonesia.

4.2 Faktor Pengalaman Organisasi

Saat bersekolah di Bandung, rasa nasionalisme Sjahrir mulai tumbuh dan mulai menenggelamkan diri ke dunia politik. Menurut cerita Des Alwi, Sjahrir mulai menunjukkan semangat nasionalisme ketika mendengar pidato dari tokoh pergerakan yakni Dr. Tjipto Mangunkusumo di alun-alun Bandung (Tempo, 2017:13). Sjahrir benar-benar terpukau mendengar semangat kebangsaan yang dilontarkan oleh Dr. Tjipto. Berawal dari situlah Sjahrir mulai aktif dalam perkumpulan pemuda. Sjahrir bahkan sempat membentuk “Jong Indonesie” serta majalah perhimpunan. Berdasarkan statuta tahun 1927, Jong Indonesie memiliki tujuan untuk mendorong sebuah ide berupa kesatuan nasional Indonesia dengan melalui gerakan pramuka, jurnal, olahraga, pertemuan, maupun selebaran

(Mrazek, 1996:69). Jong Indonesie sebenarnya bukan perkumpulan yang didasarkan pada kegiatan politik, namun hanya sekedar mempelajari tentang politik sebagai sebuah pengertian. Meski dalam prakteknya sebagian besar kegiatan akan bergerak pada debat politik serta banyak pertunjukan teater yang bermuatan politik. Pada Desember 1927, nama Jong Indonesie yang merupakan Bahasa Belanda diubah menjadi Pemuda Indonesia, hal ini karena Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah Bahasa Indonesia bukan Bahasa Belanda.

Kegiatan Sjahrir dalam “Jong Indonesie” di antaranya menemui aktivis pergerakan yang berada di Bandung, seperti Sukarno, Ir. Anwar, dll. Kegiatan lainnya yakni menjalin hubungan lisan dan tertulis dengan pemuda-pemuda dari Jogja, Surabaya, Medan, Padang, dan beberapa kota lainnya (Anwar, 1980:73). Tujuan dari kegiatan tersebut selain untuk mendapat dukungan serta sambutan juga bertujuan untuk menyatukan gerakan-gerakan pemuda yang bersifat kedaerahan yang nantinya akan digabungkan dalam sebuah gerakan yang lebih nasional. Meski penggabungan tersebut baru terlaksana ketika Sjahrir sudah meninggalkan Jawa untuk melanjutkan sekolah ke Belanda.

Tak hanya mendirikan Jong Indonesie dan majalah perhimpunan, Sjahrir beserta teman-temannya juga mendirikan sebuah studi klub bernama Patrie Scientiaequae. Menurut Hamdani (dalam Anwar, 1980:74), studi klub ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi terutama dari murid AMS yang tergabung dalam klub, serta bersama-sama untuk belajar menelaah persoalan-persoalan masyarakat yang terjadi pada waktu itu.

Pada 1929, Sjahrir telah menamatkan masa studinya di AMS. Pada tahun yang sama pula Sjahrir berangkat ke Belanda untuk meneruskan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di Belanda inilah, Sjahrir bertemu dengan Mohamad Hatta yang juga sedang melakukan studi di SekolahTinggi Ekonomi di Rotterdam. Hatta memang sudah berada di Belanda delapan tahun lamanya. Hatta kala itu merupakan seorang pemimpin dari organisasi mahasiswa Perhimpunan Indonesia yang sudah berdiri sejak 1908.

Pada 1929, Hatta berpikir sudah waktunya untuk berhenti sebagai ketua PI dan segera kembali ke Indonesia. Beberapa calon yang dilatih Hatta untuk memegang jabatan tersebut di antaranya yakni Abdullah Sjukur, Rusbandi serta Sutan Sjahrir. Pada akhirnya Abdullah Sjukur yang dipilih sebagai ketua menggantikan Hatta, dan Sjahrir menjadi orang penting ketiga setelah Sjukur dan Rusbandi. Pada Mei 1930, Rusbandi melepaskan jabatannya sehingga Sjahrir terpilih menjadi sekretaris PI. Di tahun 1931, golongan komunis di PI semakin mendominasi, di antaranya Roestam Effendi dan Abdoelmadjid. Hatta bahkan ditendang dari PI, Sjahrir yang saat itu menjabat sebagai sekretaris juga dikeluarkan karena membela Hatta.

Keadaan semakin kacau ketika Belanda melakukan penangkapan terhadap Sukarno dan beberapa tokoh PNI, di antaranya Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriadinata dengan tuduhan penghasutan massa. Saat itu memang santer terdengar bahwa PNI akan melakukan pemberontakan seperti halnya yang dilakukan PKI. Oleh karena itu, pemerintah kolonial melakukan pengeledahan di rumah pemimpin PNI. Sartono yang notabene adalah tokoh PNI yang dianggap berbahaya, tidak ditangkap seperti halnya Sukarno. Meskipun dianggap berbahaya, Sartono bukan orang propagandis seperti yang dituduhkan pada Sukarno dan tokoh lainnya. Selain itu, alasan utama Sartono tidak pernah ditangkap karena merupakan kerabat keraton/pura Mangkunegara, gelar Raden Mas hanya bisa diadili oleh Peradilan Darah Dalem, sehingga pemerintah kolonial tidak punya hak untuk melakukan penangkapan apalagi mengadili Mr. Raden Mas Sartono (Daradjadi, 2014:72).

Penangkapan Sukarno tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Hatta dan Sjahrir mengingat Sukarno adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam pergerakan. Belum lagi seluruh kegiatan PNI yang dibekukan oleh Sartono agar para anggotanya tidak terkena hukuman karena menjadi anggota dari sebuah perkumpulan yang dianggap melakukan kejahatan. Pada akhirnya, dilakukan kongres luar biasa pada 25 April 1931, setelah melakukan voting didapat hasil yang berupa pembubaran PNI dan akan didirikan partai baru namun dengan tujuan yang sama seperti PI.

Keputusan dari kongres tersebut berbunyi:

1. vonis Landraad Bandung melukai perasaan seluruh rakyat Indonesia;
2. Sukarno dan tiga pemimpin lainnya serta PNI tidak bersalah;
3. vonis Landraad Bandung yang juga diperkuat oleh Raad Van Justitie tidak hanya berdampak pada keempat pemimpin, namun juga pada PNI;
4. vonis tersebut membunuh PNI;
5. karena keadaan darurat, PNI dibubarkan (Daradjadi, 2014:74).

Akhirnya pada 29 April 1931 terbentuklah Partindo (Partai Indonesia) yang bertujuan untuk menggantikan posisi PNI. Menurut Hatta (dalam Anwar, 1980:12), menyatakan bahwa pembubaran PNI dapat melemahkan semangat pergerakan serta menandakan bahwa mereka tidak siap berkorban demi Indonesia. Beberapa anggota PNI berpendapat bahwa Sartono beserta para pengurus PNI bertindak secara otoriter, Sartono dan para pengurus PNI memaksakan pembubaran PNI tanpa terlebih dahulu mendengar keinginan anggota (Kahin, 2013:127-128). Intinya mereka menginginkan agar PNI tetap berjalan apapun risikonya demi Indonesia merdeka.

Golongan yang tidak menyetujui pembubaran PNI mendirikan suatu kelompok bernama Golongan Merdeka. Pada Februari 1932, Golongan Merdeka mengadakan kongres untuk pertama kalinya dan hasil yang dicapai adalah pendirian PNI-Baru yang diketuai Sukemi. Sjahrir dan Hatta sepakat bahwa Sjahrir akan kembali ke Indonesia untuk membantu PNI-Baru, sedangkan Hatta akan menyelesaikan studinya yang memang hampir selesai. Pendidikan Sjahrir akan diteruskan ketika sudah tiga tahun berada di Indonesia, meski pada akhirnya Sjahrir tidak pernah kembali ke Belanda karena ditangkap oleh pihak kolonial.

Pada Desember 1931, Sjahrir tiba di Bandung dalam misinya untuk mengembangkan PNI-Baru. Saat kongres PNI-Baru yang pertama pada Juni 1932, Sjahrir diangkat menjadi ketua dan Sukemi sebagai wakil. PNI-Baru sangat berbeda dengan Partindo bentukan Sartono. Partindo lebih mengandalkan pengerahan massa, sedangkan PNI-Baru lebih fokus pada pembentukan kader. Sjahrir dan Hatta percaya bahwa apabila rakyat dididik dengan tujuan memiliki pemikiran politik yang matang, dapat dipastikan bahwa pergerakan nasional akan

bersifat jangka panjang (Kahin, 2013:129). Pada Agustus 1932, Hatta tiba di tanah air dan segera menggantikan Sjahrir menjadi ketua PNI-Baru. Keterlibatan Sjahrir pada PNI-Baru semakin dikurangi, terlebih pada 1933 Sjahrir hanya berperan sebagai penasehat umum. Sjahrir memang sudah merencanakan untuk kembali ke Belanda demi meneruskan studinya. Namun, kedatangan Gubernur Jenderal baru bernama Jonkheer B.C. de Jonge membuat rencana Sjahrir gagal total. de Jonge yang reaksioner menangkap 13 aktivis PNI-Baru pada 1934 termasuk di dalamnya Sjahrir yang dipenjara di Cipinang, Batavia (Anwar, 2011:21).

Pada 23 Januari 1935, Sjahrir dan beberapa tahanan lainnya termasuk Hatta diasingkan ke Boven Digul yang merupakan tempat bagi orang-orang politik yang tidak sejalan dengan pemerintah kolonial. Tuduhan yang diberikan kepada Sjahrir dianggap tidak masuk akal olehnya, karena Sjahrir merasa tuduhan tersebut tidak pernah dilakukannya. Berikut kesimpulan dari tuduhan yang dilepamparkan pada Sjahrir

Karena menyebarkan kebencian dan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, menurut pasal 37 Indische Staatsregeling, dan bersesuaian dengan Dewan Hindia (Raad van Indie), ditunjuk sebagai tempat tinggal: ibu kota onderafdeling sementara Boven Digul, afdeling Amboina, Goebnemen Maloekoe (Sjahrir, 1990:39).

Pada 1936, mereka dipindahkan ke Banda Neira yang lingkungannya jauh lebih nyaman daripada Boven Digul. Perjuangan Sjahrir untuk melepaskan bangsanya dari tangan penjajah sepertinya memang harus berhenti sementara. Meski begitu cita-cita sosialisme Indonesia yang ada dalam diri Sjahrir tetap tidak pernah padam. Berada di pengasingan tidak pernah meruntuhkan niat Sjahrir untuk tetap berjuang demi mewujudkan keinginannya. Sjahrir rajin menulis tentang renungannya serta pengamatannya terhadap situasi politik pada istrinya Maria Duchateau yang berada di Belanda. Kegiatannya tersebut berlangsung sampai Sjahrir dibebaskan dari pengasingan pada 1942 ketika Jepang menguasai Indonesia. Pengasingannya dari Digoel ke Banda mempengaruhi pemikiran Sjahrir sebagai berikut:

1. Boven Digoel adalah contoh fasisme yang sudah dulu dijalankan Belanda

Kondisi Digoel yang bertempat di hutan belantara menyulitkan orang-orang buangan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Digoel, membuat

orang-orang pengasingan menjadi putus asa dan pikirannya menjadi kacau. Bahkan sampai ada mencoba bunuh diri karena tidak tahan dengan kondisi Digoel. Hal tersebut menyadarkan Sjahrir beberapa tahun setelahnya bahwa praktek fasisme sudah dilaksanakan Belanda jauh sebelum Hitler melaksanakannya.

2. Mengikuti serta merenungkan perkembangan politik dunia

Di pengasingan, Sjahrir selalu mengikuti perkembangan politik dunia, salah satunya adalah perkembangan perang Spanyol. Perang Spanyol terjadi antara kaum loyalis dan kaum nasionalis atau fasisme dan kebebasan. Perang tersebut membuat Sjahrir menjadi semakin waspada terhadap fasisme yang mulai menyebarkan pengaruhnya. Di Asia, Jepang juga sudah mulai melakukan penyebaran fasisme yang ditakutkan tidak lama lagi akan sampai ke Indonesia. Oleh karena itu, benih-benih fasisme yang memang sudah lama tumbuh di Indonesia harus dimusnahkan dengan cara mewujudkan cita-cita sosialisme.

3. Mengkritisi Timur.

Sjahrir sering kali mengkritik Timur yang dianggapnya kurang bersifat dinamis dibanding dengan barat. Saat di Banda, Sjahrir merasa bahwa Timur yang kata orang damai dan tenang, ternyata masih banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat feodal. Sifat feodal yang dimaksud adalah masih banyaknya pengangguran dan kemiskinan yang merajalela. Anehnya, orang-orang yang miskin tersebut tidak berusaha untuk menghilangkan sifat feodalisme itu. Orang-orang tersebut justru terlihat pasrah, waktu luang yang harusnya digunakan untuk bekerja justru digunakan untuk melamun. Salah satu sifat yang memang sulit dirubah dari orang-orang Timur adalah tidak mau merubah nasibnya untuk menjadi lebih baik lagi. Selain itu, sifat Timur terutama di Banda yang membuat Sjahrir heran adalah bagaimana orang-orang dengan mudahnya terpengaruh dengan omongan orang lain yang belum tentu benar. Salah satu contoh adalah ketika terjadi rumor musim culik, bagaimana masyarakat Banda terpengaruh dengan rumor-rumor palsu bahkan sampai membuat mereka ketakutan. Melihat hal itu, membuat Sjahrir sadar

betapa mudahnya orang-orang dibodohi dengan hal-hal yang tidak masuk di akal itu. Meskipun banyak hal tentang Timur yang dikritisi Sjahrir, namun ada pula hal positif yang membuatnya kagum yakni betapa sifat toleransi dan kemampuan beradaptasi masyarakat yang begitu besar.

Faktor pengalaman berorganisasi terutama di PNI-Baru membuat Sjahrir berpikir tentang pentingnya pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. Bagi Sjahrir, partai massa hanya akan menyuburkan tindakan-tindakan totaliter pemimpinya. Partai tidak harus beranggotakan banyak orang, melainkan cukup dengan sedikit anggota yang berpengetahuan luas. Hal tersebut juga menjadi acuan bagi Sjahrir untuk mengubah sistem partai tunggal menjadi sistem multipartai dengan alasan pentingnya pendidikan politik yang harus dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia. Sedangkan pada saat pengasingan, Sjahrir menjadi lebih fokus untuk mempelajari kondisi dan situasi politik baik dalam maupun luar negeri. Sjahrir juga menyoroti bahaya fasisme yang sudah mulai menyebar ke seluruh dunia dan dikhawatirkan akan segera sampai ke Indonesia. Sehingga, jalan yang ditempuh Sjahrir untuk menghalangi tumbuhnya fasisme adalah dengan mewujudkan cita-cita sosialisme kerakyatan.

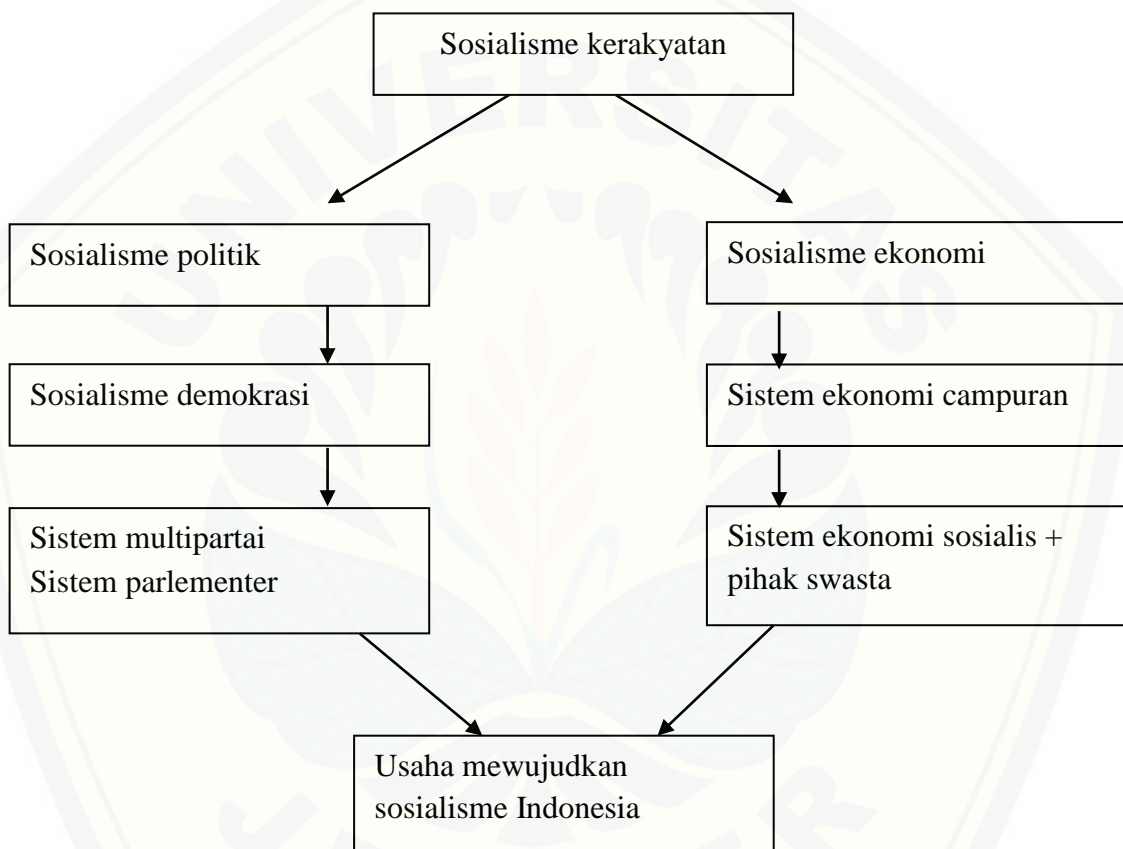
BAB 5. BENTUK-BENTUK PEMIKIRAN SUTAN SJAHRIR TENTANG SOSIALISME INDONESIA TAHUN 1929-1960

Pada bab lima ini peneliti akan membahas mengenai bentuk-bentuk pemikiran Sutan Sjahrir tentang Sosialisme Indonesia. Sebelum membahas hal tersebut peneliti akan membahas mengenai sejarah sosialisme terlebih dahulu. Bila melihat dari sejarahnya sulit untuk mengetahui secara pasti kapan tepatnya sosialisme muncul. Meski demikian, banyak yang mengatakan bahwa sosialisme muncul sejak zaman Yunani-Romawi, tetapi sosialisme yang dimaksud masih dalam bentuk sosialisme Utopia. Untuk penggunaan kata sosialisme, Robert Owen (1771-1858) dikenal sebagai orang yang pertama kali menggunakan kata sosialisme (Ebeinsten 1994:211). Sosialisme sendiri lahir akibat adanya ketidakadilan yang diterima oleh rakyat. Ketidakadilan tersebut memunculkan kemiskinan yang luar biasa sehingga mendorong perkembangan paham sosialisme secara pesat.

Seperti halnya di barat, sosialisme sudah ada sejak Belanda menjajah nusantara. Wilayah nusantara yang awalnya makmur berubah sebaliknya karena penindasan yang dilakukan bangsa penjajah. Penindasan yang berakibat pada kemiskinan menyebabkan munculnya sosialisme yang masih bersifat angan-angan. Masuknya paham sosialisme ke Indonesia tidak terlepas dari peran orang-orang Belanda yakni Sneevliet, Baars, Dekker, Bransteder, dan C. Hartogh (Abdulgani, 1964: 23-24). Sosialisme yang dibawa oleh orang-orang Belanda tersebut masih cenderung ke arah radikal serta revolusioner, sehingga tidak cocok diterapkan di Indonesia karena kondisi rakyat yang masih dalam keadaan menderita dan tertindas, berbeda dengan orang-orang di negeri Belanda (Sjahrir, 1982:73). Oleh karena itu, sosialisme pada waktu itu tidak bisa berkembang karena masih bersifat kolonial.

Di Indonesia, sosialisme cukup mengalami perkembangan yang pesat. Banyak tokoh yang menganut paham sosialisme di antaranya Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan masih banyak lagi. Salah satu tokoh yang cukup tegas dalam menjalankan paham sosialisme adalah Sutan Sjahrir. Sosialisme yang dianut

Sjahrir tentu saja berbeda dengan sosialisme yang ada di barat dan sosialisme yang diajukan komunis. Sosialisme versi Sjahrir disesuaikan dengan kondisi rakyat Indonesia saat itu yakni sebagai negara yang sudah dijajah selama ratusan tahun. Oleh karena itu, sosialisme yang dianut Sjahrir adalah sosialisme kerakyatan yang selalu mengedepankan persamaan dan kesamaan derajat umat manusia. Berikut kerangka pemikiran Sjahrir tentang sosialisme Indonesia



5.1 Sosialisme Kerakyatan

Kemunculan sosialisme berawal dari penindasan dan penghisapan terhadap suatu bangsa dan sudah terjadi selama kurun waktu yang lama, sehingga mengakibatkan berbagai macam penderitaan rakyat salah satunya yakni kemiskinan. Di Indonesia sendiri, penindasan dan penghisapan telah terjadi selama ratusan tahun lamanya. Kedatangan penjajah adalah faktor yang membuat ketentraman dan kejayaan rakyat Nusantara menjadi sebuah penderitaan yang

berkepanjangan. Rakyat yang semula berjaya berubah menjadi melarat dan tertindas. Itulah mengapa cita-cita sosialisme sebenarnya sudah ada sejak kedatangan para penjajah. Namun, masih belum terformulasikan seperti sosialisme saat ini. Berbagai macam penderitaan yang didapat rakyat Indonesia selama masa penjajahan itulah yang mendorong semangat perjuangan bangsa menuju hidup yang lebih baik.

Sjahrir adalah salah satu tokoh yang benar-benar mempelajari sosialisme dengan sungguh-sungguh. Namun, Sjahrir tentu saja tidak menelan mentah-mentah sosialisme yang dipelajarinya. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan agar sosialisme dapat dipergunakan di Indonesia. Penghisapan dan penindasan bangsa Indonesia selama ratusan tahun itulah yang membuat Sjahrir bertekad untuk mewujudkan cita-cita sosialisme yang sebenarnya memang sudah ada sejak dahulu. Sosialisme yang diperjuangkannya tentu harus dibedakan dengan sosialisme-sosialisme yang saat itu sedang berkembang di dunia yakni sosialisme di barat dan sosialisme yang disodorkan komunis.

Meskipun harus dibedakan antara sosialisme di luar dan di Indonesia, namun cita-cita dari penganut sosialisme adalah sama yakni menuju masyarakat yang sosialis. Hal yang membedakan adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut serta kondisi dari negara yang menerapkan paham sosialisme itu. Walaupun Sjahrir mempelajari sosialisme di negara barat, namun kondisi barat dan Indonesia yang jauh berbeda membuat sosialisme di barat dan di Indonesia juga harus dibedakan. Perbedaan yang paling menonjol antara barat dan Indonesia adalah negara barat sudah jauh lebih maju daripada Indonesia. Bangsa barat sudah mengenal adanya industri sedangkan di Indonesia sektor industri masih dalam tahap perkembangan. Sosialisme di barat digunakan untuk melepaskan kaum proletar dari ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum borjuis dan menghapuskan sistem kapitalisme. Sedangkan di Indonesia sosialisme digunakan untuk menghilangkan penindasan dan penghisapan yang dilakukan penjajah serta untuk mendewasakan setiap rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Berbeda dengan negara barat, komunis menawarkan sosialisme yang hanya dapat dicapai dengan jalan kekerasan dan paksaan. Dasar tindakan mereka berlandaskan dalil perjuangan kelas tanpa ampun serta kediktatoran proletar digunakan sebagai jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sosialis (Sjahrir, 1982:15). Perbedaan-perbedaan ini sebenarnya berawal dari cara penafsiran pemikiran Marx dan Engels yang berbeda-beda. Golongan komunis memang memperjuangkan hak-hak kaum buruh namun mereka melupakan dasar-dasar kemanusiaan. Mereka menghalalkan tindakan paksaan serta kekerasan untuk menuju masyarakat sosialis, yang sebenarnya tindakan tersebut telah mengkhianati cita-cita sosialisme itu sendiri. Salah satu alasan yang membuat komunisme begitu berkembang di Asia adalah kegiatan propaganda mereka tentang pengembangan sektor industrialisasi yang begitu pesat. Kebutuhan rakyat Asia yang menginginkan pertumbuhan industri secara cepat untuk mengejar ketertinggalan dengan kaum barat membuat rakyat mudah terjerumus dengan propaganda komunis. Kemajuan bagi setiap bangsa dan negara memang sangat diperlukan, tetapi harus dengan cara yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang baik pula. Oleh karena itu, Sjahrir sangat menentang sosialisme yang diajukan komunis karena mengabaikan kemanusiaan dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Bagi Sjahrir, sosialisme yang akan diterapkan di Indonesia harus menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dan harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Sosialisme Indonesia tidak pernah menganggap adanya perjuangan suatu kelas, melainkan perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan untuk keluar dari belenggu penindasan dan penghisapan, serta perjuangan untuk mendewasakan setiap rakyat Indonesia. Sjahrir menganggap bahwa sosialisme Indonesia tidak berdiri di atas kekerasan dan paksaan karena sosialisme Indonesia berlandaskan kerakyatan, sesama rakyat Indonesia diharapkan tidak akan menindas dan menghisap rakyat Indonesia lainnya. Itulah kenapa sosialisme yang diperjuangkan Sutan Sjahrir dikenal dengan istilah Sosialisme Kerakyatan. Penambahan kata “kerakyatan” memiliki makna yang mendalam yakni sosialisme yang bepegang teguh pada asas persamaan derajat umat manusia, sehingga

menolak adanya suatu golongan yang merasa lebih unggul dari pada golongan yang lain. Berikut penjelasan Sjahrir dalam bukunya *Sosialisme Indonesia Pembangunan*

Perjuangan sosialis kita adalah perjuangan untuk kerakyatan di dalam segala lapangan sesuai dengan idam-idaman dan jiwa Marx dan Engels ketika mereka mengarang *Manifesto Komunis*. Bagi kita sosialisme yang tidak berpegang pada asas kerakyatan, yaitu tidak memihak rakyat terbanyak, adalah sama dengan sosialisme yang tidak berjiwa kemanusiaan (Sjahrir 1982:85).

Setelah rakyat Indonesia terbebas dari penindasan dan penghisapan, langkah selanjutnya yang harus ditempuh untuk menuju cita-cita rakyat sosialis adalah mendewasakan setiap rakyat Indonesia. Seperti yang dijelaskan Sjahrir dalam pamfletnya *Perjuangan Kita*

Bagi rakyat jelata nyata bahwa semboyan “merdeka” itu tidak saja berarti Negara Indonesia yang berdaulat, pun tidak pula saja bendera merah-putih baginya berarti simbol persatuan dan cita-cita bangsa dan negara, akan tetapi terutama kemerdekaan dirinya sendiri dari sewenang-wenang, dari kelaparan dan kesengsaraan, dan merah putih baginya terutama simbol perjuangannya itu yaitu perjuangan kerakyatan (Sjahrir, 2010:1).

Setelah kemerdekaan Indonesia tercapai, kemerdekaan lain yang harus diperjuangkan adalah kemerdekaan individu. Rakyat berhak mendapatkan hak-hak kemanusiaannya dan rakyat berhak mendapatkan jaminan bahwa mereka tidak akan diperlakukan sebagai budak seperti pada masa penjajahan. Semua rakyat juga harus diperlakukan sama, terutama karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, ras dan budaya. Sehingga, sosialisme Indonesia yang Sjahrir perjuangkan tidak bertentangan dengan Pancasila terutama sila ke-2 dan sila ke-5 yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Jadi, sosialisme Indonesia yang diperjuangkan Sjahrir sangat berbeda dengan sosialisme di barat dan sosialisme komunis. Meskipun memiliki tujuan akhir yang sama yakni menuju masyarakat yang sosialis, namun sosialisme Indonesia tidak pernah mengkhianati dasar-dasar kemanusiaan. Sosialisme Indonesia ala Sutan Sjahrir disebut sebagai sosialisme kerakyatan karena memiliki

makna bahwa sosialisme yang diperjuangkan Sjahrir sangat menjunjung tinggi persamaan derajat umat manusia.

5.2 Sosialisme Politik

Sosialisme Indonesia tidak melulu tentang pembebasan rakyat dari penindasan dan penghisapan, tapi juga suatu pendewasaan bagi setiap rakyat Indonesia. Pendewasaan terhadap rakyat dimaksudkan agar rakyat tidak hanya merdeka secara nama saja, tapi juga merdeka secara individu. Melakukan pendewasaan bagi rakyat Indonesia berarti pula harus menghilangkan sisa-sisa feodalisme dan benih-benih fasisme. Di zaman Belanda sisa-sisa feodalisme di Indonesia digunakan sebagai tameng untuk menahan modernisasi rakyat. Sebagai bangsa yang merdeka, modernisasi sangat diperlukan agar negara Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Oleh karena itu, sifat-sifat feodalisme harus dihilangkan agar tidak menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Sama halnya seperti feodalisme, fasisme juga merupakan musuh terbesar bagi kemajuan bangsa. Fasisme yang dibawa Jepang sudah mulai merasuki jiwa rakyat Indonesia terutama para pemuda. Pemuda Indonesia selalu diajarkan untuk tunduk dan mematuhi perintah pemimpinnya, tidak pernah diajarkan bagaimana caranya untuk memimpin dan bertanggungjawab sendiri (Sjahrir, 2010:2-3). Seperti dasar fasisme bahwa perintah dari pemimpin bersifat mutlak dan tidak bisa disanggah dengan alasan apapun. Penyebaran fasisme yang begitu cepat ini karena rakyat mengindahkan kedatangan Jepang dan menaruh kepercayaan besar terhadap Jepang. Kepercayaan bahwa Jepang akan mengeluarkan Indonesia dari segala penindasan dan penghisapan kolonial Belanda. Orang Indonesia juga beranggapan bahwa orang Jepang memiliki etika yang baik dan berbicara sopan, tidak seperti orang Belanda yang bersifat kasar. Kesalahan inilah yang menjadi awal dari tumbuhnya benih-benih fasisme yang ditabur Jepang di Indonesia. Sehingga menghilangkan sifat feodalisme dan fasisme menjadi sangat penting agar tujuan untuk mendewasakan rakyat Indonesia mudah dicapai.

Pendewasaan rakyat Indonesia dapat dilakukan dalam berbagai bidang di antaranya di bidang politik dan bidang ekonomi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberi pendidikan terhadap rakyat melalui pengetahuan-

pengetahuan tentang berbagai macam bidang. Terutama pendidikan politik yang selama penjajahan benar-benar mendapat kekangan dari pihak penguasa. Seperti yang Sjahrir ungkapkan dalam pamfletnya sebagai berikut

Pendidikan politik yang di waktu zaman penjajahan Belanda telah begitu tipis, di dalam zaman Jepang sama sekali tidak ada, jiwa pemuda dibentuk untuk dapat menerima perintah saja, untuk tunduk dan mendewa-dewakan, seperti orang Jepang tunduk kepada Tenno dan mendewa-dewakannya (Sjahrir, 2010:2).

Oleh karena itu, warisan yang sudah turun-temurun tersebut harus dihilangkan dari pikiran rakyat Indonesia. Rakyat tidak hanya berhak mendapatkan pendidikan politik tapi juga berhak dalam kegiatan-kegiatan politik. Bangsa Indonesia harus disadarkan dan diikutsertakan berbagai kegiatan politik, perhatian terhadap politik haruslah di pelihara dengan baik (Sjahrir, 1990:229). Sehingga negara tidak boleh dikuasai oleh golongan-golongan tertentu saja karena dapat mengakibatkan suatu pemerintahan yang totaliter. Sjahrir sangat mengecam Lenin yang menghalalkan berdirinya partai tunggal dan tidak mengakui adanya partai buruh lainnya. Hal inilah yang membuka jalan bagi Stalin untuk melancarkan kediktatorannya terhadap rakyat Soviet. Negara yang berpartai tunggal dikhawatirkan akan senasib dengan rakyat Soviet yang terkekang karena kediktatoran penguasanya.

Oleh karena itu, Sjahrir menganjurkan agar Indonesia menganut sistem multipartai untuk menghindari perilaku sewenang-wenang dari pemimpinnya. Sistem multipartai membuat rakyat dapat dengan mudah mempelajari politik serta dapat pula menyampaikan aspirasinya tanpa kekangan dari pihak manapun. Kelebihan lain dari sistem multipartai adalah rakyat dapat mendirikan partai politik sendiri atau hanya sekedar mengikuti partai yang disenanginya, sehingga rakyat dapat dilibatkan berbagai macam kegiatan politik. Sjahrir memang menghendaki sistem multipartai, namun Sjahrir tidak senang dengan partai massa karena menurutnya tingkat intelektualitas setiap anggota jauh lebih penting daripada jumlah anggota partai. Seperti yang disampaikan dalam pamflet Perjuangan Kita, yakni sebuah partai tidak perlu beranggotakan banyak cukup memiliki disiplin tinggi, memiliki efisiensi yang modern, serta berideologi kuat dan berpengetahuan yang luas (Sjahrir, 2010:11). Sjahrir menyatakan bahwa partai massa dikhawatirkan akan menuju ke arah fasisme atau totaliterisme bentuk lain

karena pemimpinnya terbiasa mengambil keputusan sendiri (Kahin dalam Anwar, 1980:301-302).

Sama halnya dengan penolakan terhadap partai tunggal, Sjahrir juga mempermasalahkan sistem presidensiil. Sistem presidensiil yang monolitik akan menghambat kesadaran rakyat akan politik dan ditakutkan akan berubah menjadi otoriter. Sistem pemerintahan yang terlalu otoriter akan mempermulus jalannya totaliterisme yang menjadi salah satu ancaman terbesar Indonesia setelah kemerdekaan. Oleh karena itu, Sjahrir menganjurkan agar sistem presidensiil diganti dengan sistem parlementer. Rakyat memiliki hak untuk memerintah diri mereka sendiri berdasarkan kedaulatan rakyat. Di sini terlihat bahwa Sjahrir menggabungkan sosialisme dengan demokrasi. Sosialisme dan demokrasi dapat berjalan bersama-sama untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat dan martabat kemanusiaan. Pelaksanaan demokrasi harus didahului dengan adanya revolusi nasional, karena kadangkala demokrasi tidak memperhatikan penindasan dan penghisapan dari suatu golongan. Jadi, sosialisme politik yang diharapkan Sjahrir adalah penerapan sistem multipartai dan sistem parlementer.

5.3 Sosialisme Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah negara. Terutama bagi negara yang baru merdeka, keadaan ekonomi tentu sangat menentukan masa depan negara tersebut. Perekonomian Indonesia sudah lama hancur akibat eksploitasi besar-besaran yang dilakukan para penjajah. Mengembalikan perekonomian tentu dibutuhkan perencanaan yang matang. Sebagai seorang sosialis, Sjahrir tentu menginginkan Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah segala penghasilan dikelola dan diatur berdasarkan keperluan masyarakat, sehingga tidak akan ada eksploitasi yang dilakukan oleh suatu golongan tertentu (Sjahrir, 1982:43). Namun, Sjahrir menyatakan bahwa mustahil apabila Indonesia menerapkan sistem ekonomi sosialis secara utuh, pasti akan ada suatu sistem ekonomi campuran untuk mengembangkan perekonomian Indonesia (Kahin dalam Anwar, 1980:30).

Situasi dan kondisi Indonesia yang baru merdeka menyulitkan pemerintah dalam mengelola perekonomian Indonesia meskipun hanya sebagian saja. Modal pemerintah tidak mencukupi untuk mendidik banyak tenaga administratif dalam waktu yang singkat. Sehingga dibutuhkan campur tangan pihak swasta. Di dunia yang didominasi oleh kekuatan modal, maka Indonesia harus menghindari segala macam bentuk pertentangan dengan penguasa kapitalis. Seperti dalam tulisan Sjahrir pada pamflet Perjuangan Kita

...jika pemerintah Republik Indonesia tidak dapat menghindari kekacauan yang akan mengancam keinginan dan kemungkinan modal luar negeri, pasti ia akan dimusuhi oleh modal luar negeri itu...(Sjahrir, 2010:5).

Menurut Sjahrir kapitalisme Indonesia tidak akan bertambah besar, sehingga tindakan tersebut akan menghasilkan beberapa keuntungan sebagai berikut:

- a. karena pemerintahan masih kekurangan tenaga administratif, maka kaum kapitalisme akan mengisi kekosongan tersebut sehingga akan menguntungkan dalam upaya pengembangan perekonomian Indonesia;
- b. kapitalisme akan melahirkan orang-orang yang cakap dalam bidang administratif untuk mengelola sebagian sektor ekonomi bersama dengan pemerintah (Kahin dalam Anwar, 1980:304-305).

Jadi, jika pemerintah dapat memanfaatkan kaum kapitalisme dengan baik, pengembangan perekonomian Indonesia akan berjalan dengan mudah.

Sjahrir dalam tulisannya menyatakan bahwa ada 10 cara untuk membangun perekonomian negara Indonesia (Sjahrir, 1982:236-295). Berikut kesepuluh cara tersebut:

1. Membangun masyarakat

Terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa. Faktor internal menjadi sangat penting karena untuk memulai suatu perubahan harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Sedangkan permasalahan yang dihadapi setiap rakyat Indonesia adalah selalu mengeluh tentang keadaan yang kacau balau. Di sektor ekonomi, rakyat seakan-

akan sudah kehilangan semangat dalam memperjuangkan hidupnya, seolah-olah tenaga mereka habis dikuras untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Namun, setelah kemerdekaan itu tercapai, rakyat justru semakin loyo dan hanya mengeluh tentang berbagai hal seperti mahalnya harga barang, korupsi yang merajalela, dan berbagai macam keluhan lainnya. Keluhan seharusnya juga dibarengi dengan usaha untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, sebelum membangun sektor ekonomi, alangkah lebih baiknya untuk membangun manusianya terlebih dahulu. Membangun manusia yang cakap, yang memiliki jiwa yang kuat, dan memiliki cita-cita besar dalam memajukan perekonomian bangsa agar tidak menjadi tempat penindasan bagi bangsa lain.

2. Mengurangi ketergantungan modal asing

Pada zaman penjajahan, wajar apabila penjajah sangat bergantung pada modal asing. Meskipun Indonesia sudah merdeka, pemerintah dan rakyat masih bergantung pada modal asing warisan penjajah. Mulai dari pertambangan, perbankan, perkebunan, bahkan ekspor-impor dikuasai oleh orang-orang asing. Meski modal asing juga diperlukan, namun menjadi ketergantungan dengan hal tersebut sama seperti Indonesia dijajah dengan cara yang halus. Untuk mengatasi ketergantungan tersebut, pemerintah harus berhemat dalam hal belanja negara. Penghematan dilakukan untuk menghindari hutang negara yang dapat menghambat perkenomian negara. Pemborosan merupakan hambatan terbesar bagi Indonesia dalam upaya untuk memajukan sektor perekonomian. Hasil yang didapat dari penghematan dapat digunakan untuk memperkuat dan menyokong perekonomian bumiputera sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap modal asing.

3. Penyediaan lapangan kerja

Penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar rakyat Indonesia bekerja sebagai petani, penduduk yang semakin banyak berdampak pada lahan pertanian yang semakin sedikit. Orang-orang yang tidak punya lahan dan skill yang mumpuni akan menjadi pengangguran. Bisa saja pemerintah mencanangkan program transmigrasi, namun hal tersebut tentu akan membutuhkan biaya yang

tidak sedikit. Alangkah lebih baiknya apabila pemerintah memfokuskan pembangunan sektor industri terlebih dahulu. Rakyat yang tidak memiliki pekerjaan dapat diarahkan untuk bekerja pada sektor industri.

Sektor industri menjadi salah satu daya ukur maju tidaknya sebuah negara. Negara maju dapat dipastikan memiliki sektor industri yang maju pula, begitupun sebaliknya. Untuk menjadi masyarakat industri, rakyat harus menghindari cara-cara produksi kapitalis dan menggunakan cara produksi sosialis, yakni dengan menggabungkan unsur pokok yang berasal dari dalam negeri ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang berasal dari luar negeri (Abdulgani, 1964:89). Rakyat yang tidak memiliki tanah atau pengangguran dapat bekerja di sektor industri.

4. Penanaman modal oleh masyarakat

Masyarakat Indonesia yang bertambah banyak membuat tingkat kebutuhan juga ikut bertambah. Oleh karena itu, untuk menjamin taraf hidup mereka diperlukan tambahan penghasilan. Salah satu cara untuk menambah penghasilan yakni dengan melakukan penanaman modal. Penanaman modal ini dapat digunakan rakyat untuk membuka usaha atau membeli alat-alat produksi yang dapat berguna untuk melipatgandakan produksi pertanian. Untuk melakukan penanaman modal tersebut rakyat bisa memulainya dengan berhemat. Meskipun rakyat Indonesia berpenghasilan pas-pasan, apabila mereka mau berhemat dan menabung, maka mereka dapat mendapat modal sendiri. Penghematan tersebut dapat digunakan untuk penanaman modal di masa-masa yang akan datang. Berhemat dan menyimpan ini harus dibarengi dengan contoh yang diberikan pemerintah. Apabila pemerintah terus bersikap boros, rakyat juga akan bersikap sama. Sehingga sangat dibutuhkan kebijakan dan sikap pemerintah untuk memperlancar rencana penanaman modal bagi rakyat Indonesia sendiri.

5. Menghilangkan sifat feodal dan boros

Salah satu sifat yang sulit dihilangkan dari bangsa Indonesia adalah sifat feodal dan boros. Kedua sifat tersebut terutama dimiliki oleh kalangan atas. Mereka suka menghambur-hamburkan uang dan tidak mau ambil pusing tentang cara menghasilkan uang-uang tersebut. Mereka juga sering memamerkan rumah

mewahnya, mobil, perhiasan dan berbagai macam barang lainnya. Apabila mereka kehabisan uang, mereka akan berhutang kepada bank-bank atau orang kaya Tionghoa dan Arab. Setelah itu mereka kembali melanjutkan gaya hidupnya yang foya-foya itu. Perilaku seperti ini tentu menjadi penyakit yang menggerogoti perekonomian bangsa Indonesia. Sektor perekonomian tidak akan pernah maju apabila rakyat sendiri masih suka bersikap malas-malasan dan boros. Sikap seperti ini harus diubah dan mulai melakukan penghematan untuk mencapai perekonomian yang lebih menjanjikan.

6. Pembentukan modal oleh pemerintah

Tidak hanya pembentukan modal oleh rakyat, pembentukan modal juga harus dilakukan oleh pemerintah. Namun, pembentukan modal yang dilakukan pemerintah harus dibedakan dengan pembentukan modal di negara-negara komunis. Di negara-negara komunis, pemerintah yang mengatur semua alam perekonomian dalam masyarakat secara diktator. Di Indonesia hal tersebut tidak akan cocok karena pemerintah berperan sebagai pemberi contoh dan menjamin kepentingan umum. Pemerintah bertugas mengelola kepentingan-kepentingan umum yang ditujukan hanya untuk kepentingan rakyat seperti yang tercantum dalam pasal 33. Kegiatan tersebut diimbangi dengan penghematan dan penyimpanan yang nantinya akan diakumulasikan sehingga dapat menambah modal serta kekayaan negara.

7. Pengendalian ekspor dan impor

Selain karena ekspor impor yang banyak dikuasai asing, kedua kegiatan tersebut banyak menimbulkan kerugian karena tidak dimanfaatkan dengan benar. Permasalahan yang dihadapi adalah impor yang terlalu berlebihan. Sebagian besar barang-barang yang diimpor adalah barang konsumsi, sedangkan barang-barang modal seperti traktor, diesel, kapal hanya sekitar 30% saja. Perilaku seperti ini akan membawa rakyat Indonesia menjadi rakyat yang konsumtif. Barang-barang yang tidak diperlukan sebaiknya ditekan pembeliannya agar rakyat tidak menjelma menjadi rakyat yang konsumtif. Alangkah baiknya uang yang digunakan untuk mengimpor barang-barang konsumsi digunakan untuk meningkatkan produksi barang dalam negeri yang berkualitas impor. Selain untuk

meningkat perekonomian, juga dapat mengajarkan kepada rakyat untuk mencintai produk-produk dalam negeri. Untuk meningkatkan produksi, pemerintah perlu meningkatkan sektor industri terlebih dahulu.

8. Kebijakan pemerintah dalam menengahi kaum buruh dan majikan

Kebijakan pemerintah dalam menangani masalah-masalah perekonomian menjadi cermin bagi perekonomian Indonesia di masa depan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah permasalahan kaum buruh dan majikan. Keduanya mengalami keadaan yang dilema. Di satu sisi, kaum buruh kurang mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan tempatnya bekerja, seperti gaji yang tidak sesuai. Bahkan setelah kemerdekaan sekalipun nasib mereka tidak jauh berbeda dengan nasib kaum buruh zaman penjajahan. Bedanya hanya jam kerja yang hanya sekitar 7 jam sehari. Mereka terus menuntut adanya kenaikan gaji. Namun, buruh kadangkala melakukan pekerjaan dengan malas-malasan. Pekerjaan yang biasanya diselesaikan oleh satu buruh kini harus dua atau tiga buruh. Jadi, tuntutan mereka kadangkala tidak selaras dengan cara mereka bekerja. Di sisi majikan, mereka sering mendapatkan masalah tentang hasil produksi yang tidak layak ekspor, atau uang hasil ekspor yang tidak seberapa karena mata uang rupiah yang sedang merosot. Belum lagi buruh yang melakukan pemogokan membuat produksi menjadi berhenti dan majikan mengalami kerugian. Keadaan seperti ini harus pemerintah yang menangani, bagaimana agar kedua pihak tidak saling merugi dan mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya. Penyelesaian masalah ini tentu bergantung pada benar tidaknya kebijakan yang diambil pemerintah.

9. Menaikkan upah buruh pertanian dan buruh pertambangan/perkebunan milik asing

Kaum buruh di Indonesia biasanya bekerja pada bidang pertanian, pertambangan dan perkebunan. Waktu kerja kaum buruh pertanian biasanya hanya musiman saja. Mereka hanya bekerja pada waktu tertentu seperti pada saat panen tiba atau waktu tanam. Sehingga ketika tidak memasuki kedua waktu tersebut, buruh pertanian hanya menjadi pengangguran atau mencari pekerjaan lain yang upahnya tidak seberapa. Upah yang didapat pun hanya digunakan untuk makan sehari-hari. Sedangkan di pertambangan atau perkebunan buruh dapat

bekerja setiap waktu dan hasil panennya merupakan kualitas ekspor. Upah yang didapat tentu berbeda dengan upah buruh pertanian. Buruh-buruh di Indonesia sebagian besar bekerja pada sektor pertambangan dan perkebunan. Karena untuk sektor pertanian biasanya dikerjakan sendiri atau jika memiliki lahan yang luas barulah menyewa buruh. Pertambangan dan perkebunan rata-rata dimiliki oleh asing. Sangat sedikit sekali buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan atau pabrik. Karena sektor industri belum banyak mengalami perkembangan. Meski kaum buruh perkebunan dan pertambangan memiliki skill yang rendah, setidaknya kehidupan mereka jauh lebih baik dibanding buruh pertanian. Gaji yang diperoleh buruh perkebunan dan pertambangan sedikit lebih baik dari buruh pertanian. Namun, dibandingkan dengan negara barat upah buruh di Indonesia relatif sangat rendah. Upah yang murah tentu akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan buruh di Indonesia. Oleh karena itu, upah buruh harus lebih diperhatikan agar buruh mendapatkan nasib yang lebih baik.

10. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan manajemen

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan perekonomian. Jika hal itu tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja dan manajemen, maka tidak akan sepenuhnya berhasil. Setiap orang harus dilatih sesuai dengan skillnya masing-masing dan dipekerjakan sesuai dengan bidang keahliannya. Rakyat yang sudah dilatih dengan yang belum tentu memiliki hasil kerja yang berbeda. Peningkatan tenaga kerja dan manajemen dapat menentukan apakah negara benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengembangkan sektor industri.

Berdasarkan kesepuluh cara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sjahrir menghendaki agar pemerintah memberi contoh kepada rakyat dalam hal menghemat dan menabung. Berhemat dan menabung merupakan cara yang ampuh untuk membangun negara Indonesia menjadi sebuah negara industri. Rencana seperti ini tentu harus dibarengi tekad yang sungguh-sungguh agar mudah terwujud. Oleh karena itu, sebelum melakukan perubahan pada sektor perekonomian, perubahan harus dimulai dari diri pemerintah dan rakyat itu

sendiri. Sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan rakyat agar tujuan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia menjadi terwujud.



BAB 6. USAHA SUTAN SJAHRIR DALAM MEWUJUDKAN SOSIALISME INDONESIA TAHUN 1945-1960

Pada bab 5 peneliti telah membahas mengenai bentuk-bentuk pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia. Sedangkan untuk bab 6 ini, peneliti membahas mengenai usaha-usaha Sutan Sjahrir dalam mewujudkan sosialisme Indonesia tahun 1909-1960. Ketika melanjutkan ke Belanda, Sutan Sjahrir mulai mempelajari sosialisme lebih mendalam. Sutan Sjahrir memiliki keyakinan bahwa sosialisme dapat mengangkat martabat rakyat Indonesia menjadi lebih baik. Karena alasan itulah, Sjahrir mengkritik komunisme yang tidak menghargai kemanusiaan dan juga dianggap mengkhianati sosialisme. Komunisme dianggap telah menghilangkan semangat nasionalisme dan tidak sejalan dengan tujuan yang akan diraihinya. Namun, sosialisme barat juga belum sesuai dengan kondisi Indonesia yang saat itu sedang dijajah. Sehingga sosialisme yang telah dipelajarinya diotak-atik kembali agar sesuai dengan kondisi riil Indonesia.

Angan-angan Sjahrir tentang penerapan sosialisme Indonesia tentu saja dibarengi dengan banyak usaha-usaha yang dilakukannya. Bahkan hal tersebut sudah dilakukannya sejak zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang bahkan sampai Indonesia merdeka. Usaha sejak zaman penjajahan dimaksudkan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penderitaan dan penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Sedangkan usaha yang dilakukan setelah kemerdekaan dimaksudkan untuk meningkatkan intelektualitas masyarakat Indonesia serta untuk mencegah Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali.

Banyak yang berpendapat bahwa Sutan Sjahrir tak memiliki peran penting seperti halnya tokoh-tokoh lain, namun tak sedikit yang berpendapat bahwa Sjahrir adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh menjelang kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Sutan Sjahrir merupakan aktor dibalik bergesernya sistem presidensiil menjadi sistem parlementer. Kecakapan Sjahrir dalam melakukan perundingan demi mendapat pengakuan dari Belanda juga patut

diperhitungkan. Untuk lebih mengetahui mengenai usaha Sutan Sjahrir dalam mewujudkan sosialisme Indonesia, berikut akan diuraikan secara lebih mendalam.

6.1 Usaha Melalui BP-KNIP

Pada 17 Agustus 1945 akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaannya setelah kekalahan Jepang pada perang dunia II. Sutan Sjahrir justru memilih menghilang pada momen penting itu untuk sementara waktu. Sjahrir dikabarkan mengelilingi Jawa untuk meninjau situasi lapangan serta untuk melihat revolusi yang dipimpin Sukarno (Anwar, 2011:51). Sjahrir melihat bahwa rakyat benar-benar terpengaruh oleh semangat kemerdekaan. Pada akhirnya Sjahrir tidak bisa mengingkari pengaruh Sukarno yang begitu besar bagi bangsa Indonesia. Sekalipun Sjahrir ingin terjun ke dunia politik pada masa awal-awal kemerdekaan, Sjahrir memiliki kelemahan yakni basis politiknya yang kurang tersusun. Berikut alasannya:

1. pengasingan oleh Belanda pada 1930-an;
2. kurangnya perhatian pada kegiatan organisasi;
3. kurang meluasnya gerakan bawah tanah pada masa pendudukan Jepang (Anderson, 1988:119).

Pada 18 Agustus, PPKI mengadakan sidang dan salah satu keputusannya yakni pengangkatan Sukarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Selain itu, didapat pula sebuah kesepakatan untuk membentuk badan baru yakni KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Anggota dari KNIP terdiri dari anggota PPKI yang telah dibubarkan, dan beberapa anggota tambahan yang dipilih presiden. Pada 29 Agustus 1945, KNIP diresmikan dengan 135 anggota. Sutan Sjahrir didorong oleh golongan muda untuk menjadi pemimpin KNIP, tetapi Sjahrir menolak dengan alasan ingin melihat kinerja KNIP terlebih dahulu. Untuk sementara waktu, tugas KNIP adalah sebagai dewan yang membantu presiden.

Pada 7 Oktober 1945, sebanyak 40 anggota Komite Nasional menandatangani sebuah petisi yang ditujukan kepada presiden Sukarno agar mengubah fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden menjadi badan legislatif (Tempo, 2017:78). Beredar kabar bahwa orang-orang dibalik petisi

tersebut adalah orang yang tidak puas dengan kinerja presiden. Selain alasan itu, KNIP juga dianggap sebagai badan yang sangat lamban dan dianggap terlalu besar apabila hanya bertugas untuk mengurus urusan sehari-hari (Legge, 2003:181). Pada 16 Oktober 1945, diadakan rapat Komite Nasional yang berlangsung cukup ricuh antara kelompok yang pro-Jepang dan yang kontra Jepang. Namun, kedua kelompok tersebut sama-sama menyadari untuk menghadapi kubu sekutu bukanlah hal mudah. Apalagi keadaan Indonesia yang baru saja merdeka, masih harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merobohkan pondasi republik yang sedang dibangun.

Di awal-awal kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang berada dipihak Jepang. Keadaan ini membuat sekutu selaku pemenang perang dunia II, tidak mau mengakui Republik Indonesia. Mereka menganggap bahwa berdirinya Republik Indonesia ada campur tangan dari pihak Jepang, dan menganggap bahwa pemimpin republik masih berada di bawah kendali Jepang. Ditambah dengan Belanda yang menganggap bahwa Indonesia masih menjadi negara jajahannya.

Sjahrir memang sudah mempredikisi hal ini, dan berpendapat bahwa menghadapi bangsa barat tidak bisa dilakukan dengan senjata, melainkan dengan perundingan/diplomasi (Tempo, 2017:79-80). Pada rapat KNIP tersebut juga merundingkan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak akan bisa dibentuk secara terburu-buru tanpa persiapan yang matang. Pada akhirnya sidang Komite Nasional memutuskan bahwa kekuasaan legislatif dialihkan dari Presiden Sukarno ke Komite Nasional sembari menunggu Majelis dan Dewan terbentuk. Atas putusan tersebut maka dikeluarkan sebuah Maklumat No. X yang berisi tentang penyerahan kekuasaan legislatif pada KNIP yang ditandatangani wakil presiden Moh. Hatta (Lampiran B). Meski Sukarno tidak hadir dalam rapat tersebut, Sukarno menyetujui usulan itu karena memang MPR dan DPR tidak mungkin untuk dibentuk secara mendadak. Maklumat yang dikeluarkan bernomor X karena pada waktu itu sekretaris negara tidak mengingat nomor yang harus dicantumkan, sedangkan situasi cukup mendesak (Anwar, 2011:54).

Setelah pengalihan kekuasaan legislatif tersebut, Presiden Sukarno tidak memiliki wewenang dalam membuat undang-undang. Komite Nasional yang semula hanya sebagai badan yang membantu presiden, berubah menjadi badan penyusun Undang-Undang dan Garis Besar Haluan Negara (Tempo, 2017:80). Selain keputusan pengalihan kekuasaan, diperoleh pula keputusan untuk membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. BP-KNIP diketuai oleh Sutan Sjahrir dan wakilnya adalah Amir Sjarifoeddin. Sjahrir dan amir mendapat tugas untuk menyusun anggota BP-KNIP, yang sebagian besar terdiri dari golongan bawah tanah. Tugas BP-KNIP yakni menyusun peraturan-peraturan serta mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, meski nantinya BP-KNIP semkain lama justru berfungsi seperti pemerintah yang sesungguhnya (Sjahrir, 1990:280). Anggota-anggota dari BP-KNIP adalah sebagai berikut:

1. ketua : Sutan Sjahrir
2. wakil : Amir Sjarifoeddin
3. penulis : Suwandi
4. anggota : Sudarsono, Syarifuddin Prawiranegara, Sunaryo Kolopaking, Adam alik, Hendromartono, Dr. Tajuludin, Supeno, Subadio, Mngunsarkoso, Dr. Halim, Wakhid Hasyim, Tang Lie Djie (Nasution, 1977:110).

Sukarno pernah mengusulkan untuk membentuk partai negara yakni PNI, yang bertujuan untuk mewakili pendapat dari seluruh rakyat. Sukarno berpendapat bahwa sebuah negara yang memiliki lebih dari satu partai akan mudah terjadi konflik antarpartai satu dengan yang lainnya, hal ini tentu akan menjadi sebuah malapetaka bagi Republik yang masih baru berdiri (Legge, 2003:181). Sjahrir yang memang tidak menyetujui adanya partai tunggal sangat menentang keputusan tersebut. Partai tunggal dikhawatirkan tidak bisa menampung aspirasi rakyat dan hanya akan bertindak sebagai pengontrol rakyat. Sehingga pada 30 Oktober 1945, BP-KNIP mengusulkan adanya sistem multipartai sebagai wadah untuk menampung aspirasi rakyat. Akhirnya pada awal November 1945, usulan Badan Pekerja dikabulkan pemerintah dengan mengeluarkan maklumat untuk membentuk partai-partai politik, tujuan lain disetujuinya usulan tersebut adalah

untuk mencari kader-kader terkait pembentukan DPR pada awal tahun 1946 (Santoso, 2014:105). Sebelum meresmikan sistem multipartai, sebenarnya partai-partai sudah menjamur di daerah di luar Jakarta, namun belum memiliki pengaruh apapun terhadap kondisi politik saat itu (Anderson, 1988:205). Peresmian sistem multipartai ini secara jelas menggambarkan terwujudnya usaha Sjahrir dalam memperjuangkan sosialisme politik yang dikehendakinya.

Tak berselang lama saat Sekutu dan Belanda tiba di Indonesia, terjadi banyak pertempuran di berbagai daerah. Presiden Sukarno dan Sjahrir mengalami keadaan yang dilema. Presiden Sukarno menyadari bahwa meyakinkan pihak Sekutu tentang kemerdekaan Indonesia yang bukan buatan Jepang benar-benar diperlukan. Selain faktor eksternal yang menekannya, faktor internal cukup membuat presiden khawatir. Banyak pihak-pihak yang ingin menyingkirkannya dari kursi presiden. Sjahrir juga turut dilema, eksistensi Sukarno di kalangan rakyat Indonesia bukan jaminan Sukarno akan diterima pihak Sekutu. Salah satu cara untuk menyelamatkan Presiden Sukarno tentu dengan memisahkan aspek simbolik dari aspek eksekutif presiden (Legge, 2003:186).

Pimpinan Sekutu yang saat itu berada di Jakarta, memberikan tekanan kepada pihak Republik, karena situasi yang sudah diluar kendali. Pada 14 November, Sjahrir diminta untuk membentuk sebuah pemerintahan baru, meski hal itu menyimpang dari UUD yang menjelaskan Presiden memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi (Sjahrir, 1990:281). Sjahrir diberi tugas untuk membentuk kabinet yang bertanggung jawab terhadap parlementer. Akhirnya KNIP mengadakan rapat pleno dan Sjahrir diangkat Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Keputusan ini membuat Republik Indonesia berganti dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer. Sistem presidensiil yang dianggap akan menumbuhkan sifat totaliterisme pemimpinnya menjadi alasan bagi Sjahrir untuk menyarankan pergantian sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Selain itu, jalan yang paling efisien untuk mewujudkan sebuah gagasan adalah dengan memegang tampuk kekuasaan.

Sekali lagi, usaha Sjahrir untuk mewujudkan sosialisme politik benar-benar terwujud, meskipun nantinya akan mendapatkan banyak rintangan. Walaupun bertentang dengan Undang-Undang Dasar, perubahan sistem pemerintahan tersebut masih dianggap wajar mengingat Republik Indonesia yang baru berdiri masih belum memiliki pondasi yang kuat dan kokoh. Pemilihan Sjahrir sebagai Perdana Menteri tentu bukan tanpa alasan, selain karena mendapat banyak dukungan, Sjahrir dikenal dengan penghubung antar dua generasi. Sjahrir juga memiliki wawasan luas mengenai pengaturan konstitusional pada sistem parlementer yang dipelajarinya di Belanda (Legge, 2003:183). Sjahrir memegang jabatan tersebut sebanyak tiga kali berturut-turut sampai tahun 1947.

6.1.1 Usaha Melalui Kabinet Sjahrir

6.1.1.1 Kabinet Sjahrir 1

Belanda yang awalnya menolak untuk melakukan perundingan dengan RI, tidak bisa lagi menghindari rencana perundingan tersebut. Presiden Sukarno memang dianggap sebagai penjahat perang dan kolaborator Jepang, sehingga Belanda menolak melakukan perundingan. Sedangkan Sjahrir sama sekali bukan kolaborator Jepang. Jabatan Sjahrir kala itu tidak hanya sebagai Perdana Menteri saja melainkan juga merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Sedangkan Amir Sjarifoeddin diangkat menjadi Menteri Keamanan Umum serta Menteri Penerangan.

Susunan kabinet Sjahrir I sebagian besar berisi orang-orang sosialis, hal ini diharapkan dapat menarik perhatian dari Partai Buruh Belanda yang memang memiliki pengaruh kuat dalam pemerintahan Belanda (Santoso, 2014:118). Menteri-menteri yang ditugaskan tidak pernah bekerja di bawah Jepang. Selain itu, jajaran menteri kabinet Sjahrir I tidak memasukkan orang-orang Pendidikan (Lampiran C). Lima hari setelah pengumuman kabinet Sjahrir, para tokoh PNI-Baru berkumpul di Grand Hotel Cirebon guna memberi dukungan kepada Sjahrir, di antaranya Hamdani, Soebagio, Sastra, Leon Salim, dsb (Mrazek, 1996:506). Pada tanggal 17 November diumumkan program kerja kabinet Sjahrir I, yakni:

1. menyempurnakan birokrasi di setiap daerah yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat;

2. mengkoordinasi semua tenaga rakyat untuk mengkokohkan RI serta membangun masyarakat yang dilandaskan pada keadilan dan perkemanusiaan;
3. memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui berbagai macam cara, salah satunya dengan pembagian makanan;
4. mempercepat pembuatan uang Republik Indonesia (Rabily dalam Santoso, 2014:115).

Pada 17 November pula, Sjahrir bertemu dengan van Mook dan Letnan Jenderal Sir Philip Christison (Panglima Tentara Sekutu) untuk membahas mengenai keamanan di Jawa. Namun, pertemuan ketiganya tidak membawa hasil. Di berbagai daerah banyak terjadi teror yang dilakukan NICA, sampai-sampai membuat Sjahrir jengkel. Serdadu Belanda bahkan melakukan penembakan terhadap Mr. Roem pada 21 November 1945. Sjahrir bahkan sempat menyatakan untuk menghentikan perundingan karena sikap Belanda yang seperti kawan Barbar. Akhirnya, pada 3 Desember 1945 Menteri Logeman bersedia melakukan perundingan dengan Indonesia agar permasalahan segera terselesaikan. Namun, Sjahrir mengajukan syarat yakni pengakuan adanya Republik Indonesia.

Meski kedua belah pihak sepakat untuk berunding kembali, kekacauan yang disebabkan Belanda tidak tampak berkurang. Bahkan Sutan Sjahrir sempat ditodong pistol oleh seorang opsir Belanda. Amir juga menjadi sasaran bagi pihak musuh, untungnya Amir masih bernasib baik, peluru yang ditembakkan hanya memecahkan kaca mobil dan bersarang disela pintu mobil. Kejadian-kejadian tersebut tentu membuat rakyat semakin bertambah marah. Setelah bertubi-tubi kejadian yang menimpa pemimpin Republik, pemerintah tetap bersikeras untuk melanjutkan perjuangan diplomasinya. Pemerintah mencoba untuk menenangkan hati rakyat yang memanas untuk terus mengikuti jalan yang telah dipilih pemerintah.

Pertengahan Desember, Sjahrir mengeluarkan kebijakan militer. Sjahrir memerintahkan agar pasukan bersenjata keluar dari Jakarta karena kota tersebut dianggap sebagai kota internasional (Tempo, 2017:85). Untuk menarik perhatian dunia internasional, Sjahrir mengadakan pameran kesenian yang diliput oleh

media asing. Kegiatan ini tentu dimaksudkan agar dunia internasional menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang aman meski baru saja merdeka.

Tak berselang lama kabinet Sjahrir dibentuk, banyak tokoh-tokoh yang tidak setuju dengan upaya Sjahrir untuk melakukan perundingan dengan Belanda. Beberapa yang menolak keras kebijakan tersebut adalah Tan Malaka, Chaerul Saleh, Adam Malik, Sukarni, dsb. Tan Malaka pernah mengajak Sjahrir untuk bekerjasama menyingkirkan Sukarno-Hatta mengingat kinerja keduanya yang dianggap tidak memuaskan. Tapi, Sjahrir berpikir akan lebih baik bila Sukarno-Hatta tetap dipertahankan sebagai simbol negara karena keduanya yang sangat berpengaruh bagi rakyat Indonesia. Pada akhirnya kerjasama keduanya tidak pernah terjadi. Tan Malaka dan Sjahrir memilih jalan yang berbeda, Tan Malaka memilih garis radikal dan Sjahrir memilih garis moderat. Tan Malaka yang merupakan veteran revolusi serta propagandis hebat yang memiliki pengaruh besar, memutuskan untuk mengundang berbagai badan, laskar, serta partai untuk membentuk kerjasama yang dinamakan Persatuan Perjuangan (Nasution, 1996:67-68).

Sebelum kemerdekaan, Sjahrir berada dikubuk para pemuda yang mendesak Sukarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, setelah kemerdekaan Sjahrir mulai bergeser di pihak Sukarno-Hatta dengan mengambil jalan diplomasi. Sjahrir saat itu harus berpikiran realistis dengan keadaan militer Indonesia yang masih belum kuat untuk menghadapi Belanda. Keputusan Sjahrir tersebut tentu membuat banyak golongan kecewa, yang membuat Sjahrir banyak mendapat kritikan pedas.

Pada Februari 1946, pimpinan Masyumi menyatakan ketidaksabarannya pada kabinet Sjahrir dalam melakukan perundingan. Awalnya, Sjahrir tidak menggubris tindakan mereka. Lama-kelamaan rival-rivalnya semakin menjadi, salah satunya Tan Malaka yang beberapa kali melakukan aksi massa. Akhirnya pada 23 Februari 1946, Sjahrir memberikan surat pemberhentian rahasia kepada Sukarno di Yogyakarta (Ibid dalam Mrazek, 1996:557). Pada Maret 1996, Sjahrir berhenti dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan kabinet Sjahrir I dibubarkan. Sebelumnya, van Mook menyampaikan usulan kepada pemerintah

RI, yang berisi bahwa Belanda akan mengakui RI namun harus dalam bentuk serikat dan menjadi bagian dari Kerajaan Belanda, dan RI hanya berkuasa atas dua wilayah yakni Jawa dan Madura (Santoso, 2014:125). Sebelum menjawab usulan tersebut, Sjahrir sudah meletakkan jabatannya.

6.1.1.2 Kabinet Sjahrir II

Sukarno berencana menyusun kabinet baru dengan anggotanya berisi golongan Sjahrir dan Persatuan Perjuangan. Sukarni, sebagai perwakilan dari Persatuan Perjuangan mendiskusikan hal ini dengan Sukarno. Karena tidak tercapai kesepakatan, maka Persatuan Perjuangan akan melanjutkan perjuangan dengan jalan mereka sendiri. Sjahrir diberi kepercayaan kembali untuk membentuk kabinet Sjahrir II. Pada kabinet Sjahrir II, ada beberapa orang baru yang masuk kabinetnya mewakili PNI dan Masyumi (Lampiran D). Wakil-wakil tersebut bukan orang yang anti-Sjahrir, Partai Sosialis tetap mendominasi susunan kabinetnya.

Pada kabinet Sjahrir II ini, Sjahrir tetap melanjutkan kebijakan politik diplomasinya dengan melanjutkan perundingan bersama Belanda guna mempertahankan keutuhan Republik Indonesia. Berikut program kabinet Sjahrir II:

1. berunding berdasar pengakuan kepada Republik Indonesia merdeka 100%;
2. mempersiapkan rakyat disegala bidang mulai dari politik, ekonomi, militer hingga sosial demi mempertahankan Republik Indonesia;
3. menyempurnakan program pembagian pakaian dan makanan pada rakyat;
4. perusahaan dan perkebunan hendaknya pemerintah mengambil tindakan seperlunya seperti yang tercantum dalam UUD pasal 33 (Nasution, 1996:90-91).

Tan Malaka yang sebelumnya melakukan pemberontakan, ditangkap di Surakarta beserta pengikutnya. Penangkapan tersebut diteken oleh Menteri Ketahanan Umum Amir Sjarifoeddin. Amir mengatakan bahwa penangkapan Tan Malaka tersebut dilandasi atas surat perintah yang ditandatangani Sjahrir, tapi surat tersebut tidak pernah ada yang melihatnya (Mrazek, 1996:561). Meski Tan Malaka telah ditangkap dan dipenjarakan, pihak oposisi masih terus bergerak.

Surakarta menjadi target utama pihak oposisi untuk dijadikan markas utama. Karena waktu itu ibukota pindah ke Jogja, oleh karena itu Surakarta sebagai saingan Jogja dianggap cocok untuk dijadikan markas. Pihak oposisi Surakarta dipimpin oleh Dr. Muwardi dengan kelompoknya bernama Barisan Banteng. Pada bulan April, kelompok Barisan Banteng berhasil menguasai Surakarta dan menjadi satu-satunya kekuasaan riil di sana (Ricklefs, 2010:468). Pemerintah Sjahrir harus menyaksikan Surakarta jatuh ke tangan pihak oposisi pada 1 Juni 1946.

Meski menghadapi banyak tekanan dari luar maupun dalam negeri, Sjahrir berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan perundingan untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Pada 12 Maret 1946, pemerintah Republik Indonesia menyampaikan memorandum kepada Belanda untuk menjawab usulan van Mook pada bulan Februari 1946. Memorandum tersebut didasarkan pada Maklumat Wakil Presiden pada 1 November 1945 yang menyatakan tentang penentuan nasib sendiri namun tetap bersedia bekerjasama dengan Belanda. Memorandum yang dikirimkan terdapat 12 pokok penting, yakni:

1. RI harus diakui berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia;
2. UUD akan dirombak atau ditambah sesuai kebutuhan, terutama yang membahas tentang kaum minoritas;
3. membuka kesempatan kewarganegaraan seluas-luasnya, namun warga asing tidak akan dibendung apabila ingin tetap menjadi WNA;
4. akan dilaksanakan politik “pintu terbuka” untuk bangsa serta kapital asing, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat;
5. sebelum 8 Maret 1942 hutang Hindia-Belanda akan dioper oleh RI;
6. perjanjian yang dilakukan dengan Belanda tentang jaminan layak terhadap kepentingan Belanda di berbagai bidang akan diindahkan;
7. Federasi Indonesia-Belanda akan dibentuk dan akan dibentuk pula badan Federasi yang mengurus urusan luar negeri;
8. badan tersebut juga akan mengawasi pelaksanaan perundingan kedua negara;
9. tentara Belanda harus segera ditarik dari RI dan bila perlu diganti TRI;

10. orang-orang yang menerima hukuman atas tindakan politiknya akan diampuni;
11. Belanda akan menjadi penunjang Indonesia sebagai bagian dari PBB;
12. selama perundingan Indonesia-Belanda pemindahan pasukan harus dihentikan, Indonesia akan melakukan pengawalan serta pengungsian terhadap kaum interniran (Nasution, 1996:30-31).

Namun, pemerintah RI berubah pikiran dan mundur selangkah untuk menyelesaikan konflik terhadap Belanda. Hal ini dipicu adanya persetujuan antara negara penjajah yakni Prancis dan negara terjajah Vietnam yang menunjukkan saling kerjasama meski awalnya bermusuhan. Akhirnya tuntutan RI yang sebelumnya disampaikan kepada pihak Belanda sedikit mengalami perubahan. Berikut tuntutan yang mengalami perubahan:

1. pengakuan de facto terhadap RI meliputi wilayah Jawa dan Sumatra, kerjasama Indonesia-Belanda dapat membentuk Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia-Belanda;
2. RI akan membantu serta menerima pasukan sekutu;
3. setelah persetujuan tercapai, permusuhan harus segera dihentikan;
4. wakil-wakil daerah di luar Republik turut serta dalam perundingan, hal ini untuk menunjukkan bahwa keduanya diatur oleh Indonesia-Belanda;
5. apabila ada daerah yang tidak ingin masuk RI, daerah tersebut diberi kedudukan istimewa terhadap Indonesia maupun Belanda, namun dalam waktu tiga tahun harus segera diputuskan hubungan yang tetap, melalui jalan referendum (Nasution, 1996:32-33).

Tuntutan-tuntutan yang sudah dirubah tersebut, diharapkan akan mempercepat terlaksananya perundingan dengan Belanda. Pada 30 Maret 1946, Sjahrir, van Mook, dan Clark Kerr mengadakan sebuah pertemuan, pihak Belanda merasa belum puas karena ada beberapa hal pada usulan Februari 1946 yang masih belum dipenuhi. Perundingan selanjutnya diadakan di Hoge Veluwe, Belanda, pada bulan April – Mei 1946 yang tetap belum menghasilkan hasil yang memuaskan, ditambah Belanda berada dalam posisi pemilihan umum (Anwar,

2011:63). Belanda berdalih ingin menunggu pemerintah baru terbentuk untuk membuat komitmen yang pasti.

Sebagai upaya dalam menarik perhatian dunia internasional, pada akhir April 1946 Sjahrir membuat keputusan yang kontroversial, yakni pengiriman setengah juta ton beras kepada India yang dilanda bencana kelaparan (Tempo, 2017:93). Alasan India mengalami kelaparan parah di antaranya karena perang dunia II mengakibatkan pasokan beras dari Birma ke India menjadi terputus serta beras yang jumlahnya sedikit justru diberikan pada pasukan Inggris, keadaan tersebut mengakibatkan wilayah Bengal mengalami bencana kelaparan yang parah (Mani, 1989:116). Sjahrir mengatakan bahwa India telah berjasa dalam memperkaya budaya Indonesia, selama ratusan tahun India telah menjalin hubungan ekonomi dengan Indonesia, dan bangsa Indonesia telah belajar banyak mengenai perjuangan yang dilakukan India dalam melawan imperialisme Inggris (Mani, 1989: 122).

Setengah juta ton beras yang dikirimkan Sjahrir ke India ditukarkan dengan obat-obatan serta tekstil. Sjahrir menginginkan pihak India yang mengurus pengiriman-pengiriman tersebut. Meski Indonesia baru saja merdeka, namun kesediaan pangan dirasa masih cukup aman untuk rakyat Indonesia sendiri. Panen tahun 1946 diperkirakan mencapai hasil tertinggi kurang lebih 7 juta ton, sedangkan hasil terendah kurang lebih 5 juta ton. Sehingga memberikan 500 ribu ton beras untuk India tidak akan mengganggu kesediaan pangan nasional. Belanda tentu sangat marah dengan diplomasi beras yang dilakukan Sjahrir, blokade ekonomi ditempuh Belanda untuk menggagalkan upaya tersebut. Kedatangan kapal dari India untuk mengangkut beras menjadi pukulan keras bagi Belanda yang melakukan blokade ekonomi (Mani, 1989: 117). Namun, Belanda tidak bisa melakukan apa-apa karena India pada waktu itu sudah hampir merdeka. Pihak Inggris juga tidak bisa menghalangi karena ditakutkan tentara India yang berada di Indonesia kemungkinan akan berontak (Salim, 1966:24). Pada 27 Juli 1946, Sekretaris Urusan Pangan India menandatangani serta bertukar surat perjanjian dengan Sjahrir, isi perjanjian tersebut adalah Indonesia harus mengirimkan sebanyak 700.000 ton beras kepada India sebanyak barang yang diminta

Indonesia dengan nilai yang sama (Mani, 1989: 124). Meski mendapat beberapa penolakan, strategi pengiriman beras ini berjalan lancar dan Indonesia mendapatkan “kawan” tak berapa lama setelah kemerdekaan.

Tanggal 17 Juni 1946, Sjahrir mengirim surat kepada van Mook secara rahasia yang berisi kemungkinan untuk melakukan perundingan secara sungguh-sungguh. Keesokan harinya, surat rahasia tersebut justru dibocorkan oleh media Belanda. Pada peringatan Isra' Mi'raj 27 Juni 1946, Hatta menyampaikan pidato yang berisi dukungannya terhadap Sjahrir. Hal ini tentu saja membuat pihak oposisi marah dan menganggap Sjahrir sebagai penghianat yang menjual tanah airnya. Pada malam itu juga, Sjahrir yang bermalam di Javasche Bank setelah kepulangannya dari Banyuwangi, tiba-tiba diculik oleh Mayor Abdul Kadir Yusuf (Tempo, 2017:87-88). A.K. Yusuf beranggapan bahwa menangkap Sjahrir bukan untuk merampas kebebasannya, sebagai warga negara yang baik A.K. Yusuf menganggap bahwa Sjahrir telah banyak merugikan negara, sehingga Sjahrir harus ditangkap dan diserahkan ke Mahkamah (Nasution, 1996:331).

Setelah mendengar penculikan Sjahrir, Sukarno berpidato di radio Jogja, dalam pernyataannya Sukarno menegaskan bahwa pada sidang 28 Juni 1946 yang disetujui kabinet, presiden akan mengambil alih seluruh kekuasaan pemerintah (Mrazek, 1996:564). Pada 30 Juni, Sukarno berpidato kembali yang isinya menuntut pembebasan Sjahrir. Sukarno menyatakan bahwa pihak oposisi tidak bisa menjaga kestabilan negara, penculikan tersebut membuat celah untuk Belanda bisa berkata pada dunia internasional bahwa Indonesia tidak sanggup memerintah dirinya sendiri serta banyak terjadi kekacauan dimana-mana (Anderson, 1988:425). Malam harinya Sjahrir dibebaskan dan dibawa kembali ke Jakarta. Peristiwa penangkapan Sjahrir telah membuat keadaan RI kacau balau, terutama di wilayah Solo yang menjadi tempat penculikan. Pengikut Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin bergerak ke Jogja dan Surakarta untuk melindungi pemerintah dari kaum oposisi. Keadaan yang kacau itu dapat dengan mudah memicu perang saudara. Belum lagi upaya-upaya kaum oposisi yang berencana menggantikan posisi Sjahrir.

Setelah pembebasan tersebut, pemerintah menangkap beberapa anggota oposisi di antaranya Malik, dan beberapa orang lainnya, Yamin justru berhasil lolos dalam penangkapan ini. Giliran para tentara yang menuntut pembebasan tawanan tersebut. Pada 3 Juli 1946, mereka dibebaskan dan pada hari itu juga mereka mengirim delegasi pada Sukarno untuk membubarkan kabinet. Moh. Yamin yang menjadi bagian dari delegasi telah menyiapkan maklumat untuk mengganti kabinet Sjahrir dengan alasan desakan dari rakyat (Tempo, 2017:88-89). Para delegasi ini justru ditangkap dan dibui.

Pada hari itu juga, Sukarno menyatakan akan terus memimpin pemerintah dibantu dengan Dewan Pertahanan Negara. Namun, sebulan setelah kekuasaan yang dipegang Sukarno, Sjahrir diminta kembali untuk membentuk kabinet Sjahrir III (Lampiran E). Pada 2 Oktober 1946, Sjahrir kembali menjabat sebagai Perdana Menteri RI selama tiga kali berturut-turut. Dewan Pertahanan Negara yang dibentuk pada 3 Juli 1946, tetap dipertahankan dan kekuasaannya setingkat dengan kabinet.

6.1.1.3 Kabinet Sjahrir III

Setelah pemilihan umum di Belanda selesai, Belanda membentuk sebuah “Komisi Umum” untuk melaksanakan perundingan. Komisi ini dipimpin oleh Schermerhorn yang merupakan anggota Partai Buruh Belanda. Pada 7 Oktober 1946 akhirnya perundingan antara Indonesia-Belanda dimulai kembali dan dilaksanakan di Kantor Konsul Jenderal Inggris, Jakarta. Pada perundingan kali ini, diperantarai oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan yakni pada 14 Oktober 1946 akan dilakukan gencatan senjata. Perundingan juga membahas mengenai pertemuan selanjutnya yang akan dilakukan di daerah Linggarjati, dekat Cirebon.

Indonesia dan Belanda telah melakukan banyak pertemuan sejak tahun 1945 namun tidak mencapai hasil yang diinginkan. Perundingan Linggarjati inilah yang akhirnya membuahkan hasil setelah perundingan panjang antara Indonesia-Belanda. Perundingan ini berlangsung pada pertengahan November 1946 dan pamarafan dilakukan pada 15 November. Perundingan Linggarjati terdapat 17 pasal yang masing-masing telah disepakati demi tercapainya hubungan baik

antara kedua belah pihak (Lampiran E). Pada perundingan Linggarjati ini, Lord Killlearn selaku delegasi Inggris bertindak sebagai mediator. Belanda diwakili tim Komisi Jenderal yakni Schermerhorn, van Mook, van Poll serta DeBoer, sedangkan Indonesia diwakili Sjahrir, Gani, Amir Sjarifoeddin, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, dan Mr. Roem (Santoso, 2014:130-131).

Perundingan antara dua belah pihak tidak berlangsung mulus. Pasal yang menjadi perdebatan adalah pasal yang berisi tentang pembentukan Negara Indonesia Serikat. Namun, Sukarno menyetujui pasal tersebut setelah Schermerhorn mengunjunginya yang berada di Kuningan. Tentu Sjahrir merasa terkejut karena dengan persetujuan tersebut Belanda hanya mengakui Indonesia secara *de jure*, hal ini membuat Sjahrir menambahkan pasal arbitrase (Tempo, 2017:104-105). Apabila Indonesia dan Belanda terlibat perselisihan tentang isi perjanjian Linggarjati maka permasalahan tersebut akan dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Akhirnya setelah melalui perundingan yang panjang, perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia (Gambar 2).

Sehari setelah penandatanganan perjanjian, Belanda justru menduduki Bogor, tentara-tentara KNIL melakukan penahanan, pemerintah Republik di wilayah Bogor disingkirkan, Mr. Roem akhirnya menemui tentara Inggris untuk memulihkan keadaan (Tobing, 1986:1). Meski keadaan berhasil pulih, hal ini tentu mencoreng kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Rasa untuk bersikap baik dengan Belanda menjadi ragu-ragu. Rakyat kecewa dengan Belanda karena sehari setelah perjanjian Belanda sudah mengkhianati pokok-pokok persetujuan Linggarjati. Hal ini tentu membuat pemerintah meningkatkan kesiagaannya, namun pemerintah masih terus berusaha mempertahankan hubungan yang sudah dijalin Indonesia-Belanda.

Di negara Belanda sendiri, perundingan Linggarjati mendapat banyak protes di kalangan pemerintah. Perjanjian tersebut dianggap tidak sesuai dengan UUD Belanda. Komisi Jenderal yang menjadi delegasi Belanda, dituduh telah melampaui batas-batas kekuasaan yang telah ditentukan. Berikut kekuasaan Komisi Jenderal yang tercantum dalam pasal 3:

1. Komisi Jenderal harus menaati pemerintah;
2. mempersiapkan dasar-dasar hubungan Hindia-Belanda dalam Uni Kerajaan Belanda;
3. melaksanakan perundingan berdasar ketentuan yang telah ada (Tobing, 1986:18).

Oleh karena itu, perundingan dianggap tidak sah karena Komisi Jenderal melanggar ketentuan di atas. Meski banyak yang menolak perjanjian tersebut, banyak pula kelompok yang menyetujui perjanjian tersebut bahkan sampai mendesak pemerintah untuk segera mensahkan isi perjanjian Linggarjati. Permasalahannya adalah kelompok yang menyetujui naskah perjanjian bukan berasal dari pemerintahan, sehingga tuntutan mereka hanya dianggap sebagai angin lalu. Di Indonesia, setelah peristiwa pendudukan Bogor, Belanda terus melaksanakan aksi brutal di beberapa wilayah RI dimaksudkan agar Indonesia menolak persetujuan Linggarjati. Kendati demikian, pemerintah masih tetap bertahan dan berharap Belanda segera merubah sikapnya.

Pada sidang KNIP yang diadakan di Malang, pada hari pertama Sukarno berpidato menyampaikan tentang Peraturan Presiden No.6. Kelompok gabungan menolak rencana tersebut karena menganggap pemerintah mencoba memanipulasi situasi agar perjanjian Linggarjati dapat diterima. Hari kedua sidang, tetap banyak kritik yang dialamatkan pada Peraturan Presiden No.6 yang berisi tentang penambahan anggota yang berasal dari seluruh Indonesia. Hari ketiga, Wakil Presiden berpidato yang isinya memberikan alternatif pilihan yakni pembubaran KNIP yang mustahil dilakukan atau Presiden dan Wakil Presiden akan mengundurkan diri dari jabatannya. Peserta yang hadir tentu saja terkejut dengan pernyataan Hatta yang di luar dugaan. Akhirnya, mereka yang awalnya menolak berubah menjadi menerima Peraturan Presiden no.6. Pada 28 Februari 1947, persetujuan Linggarjati disahkan oleh KNIP.

Pada 25 Maret 1947, Sjahrir, van Mook, Schermerhorn menandatangani perjanjian Linggarjati di bawah foto Ratu Belanda kala itu. Meski pada akhirnya perjanjian ini dianggap gagal dan Belanda melanggar perjanjian, tapi hal ini merupakan langkah awal Indonesia dalam mempertahankan Republik. Pada 31

Maret 1947, Sjahrir bertolak ke India untuk menghadiri Asian Relations Conference yang diprakarsai Jawaharlal Nehru. Sjahrir justru datang terlambat pada konferensi tersebut, tapi delegasi dari Indonesia cukup banyak yang datang pada konferensi itu meski tidak semuanya pilihan Sjahrir. Sjahrir bahkan sempat mengkritik Nehru yang hidup terlalu mewah padahal situasi India yang belum stabil. Saat perjalanan pulang, Sjahrir mampir ke beberapa negara seperti Burma yang dikuasai Buddhisme dan dianggap terlalu sederhana, Siam yang juga negara Buddhisme, serta Singapura yang dianggap sebagai kota pemberi harapan (Mrazek, 1996:598-599).

Setelah penandatanganan perjanjian Linggarajati, Belanda memang tidak memperluas wilayah kedudukannya, melainkan justru memperkuat militernya yang pada bulan Mei 1947 meningkat sangat drastis. Pada 27 Mei 1947, Komisi Jenderal memberikan ultimatum kepada pemerintah Indonesia yang berisi agar RI menerima wewenang Belanda sampai kedaulatan diserahkan kepada RI. Mereka mengirim nota kepada pemimpin RI yang berisi:

1. Indonesia-Belanda bersama-sama membentuk pemerintahan peralihan;
2. mengadakan garis demiliterisasi;
3. sebagian AD, AU, AL Kerajaan Hindia-Belanda sebaiknya tinggal di Indonesia dalam upaya membangun sebuah pertahanan yang modern;
4. pembentukan alat kepolisian guna melindungi kepentingan luar maupun dalam negeri (Santoso, 2014:135).

Pada 8 Juni 1947, Sjahrir menyampaikan sebuah nota untuk membalas nota yang dikirimkan pihak Belanda, berikut isi notanya:

1. RI setuju untuk membentuk negara Indonesia Timur meski tidak sesuai dengan perjanjian Linggarajati;
2. RI juga menyetujui demiliterisasi antardaerah demarkasi dari dua belah pihak;
3. Untuk pertahanan Indonesia Serikat, pemerintah menolak *gendarmerie* (pertahanan bersama) karena harus dilaksanakan oleh tentara nasional (Santoso, 2014:135-136).

Nota yang diberikan pemerintah dianggap Belanda telah menolak seluruh isi nota yang dikirimkan sebelumnya. Mereka menyimpulkan bahwa RI tidak memaknai isi perjanjian Linggarjati, karena telah menolak hak kedaulatan Kerajaan Belanda dan tidak mengindahkan negara bagian yang tertera pada persetujuan (Tobing, 1986:67-68). Selama masa transisi, Belanda menganjurkan untuk membentuk lembaga politik federal dan pasukan keamanan bersama (Anwar, 2011:71). Sjahrir hanya mempertimbangkan ide federalisme dan menolak ide keamanan bersama. Pernyataan Sjahrir ini membuat kekacauan di seluruh negeri. Banyak yang menolak ide Sjahrir tersebut meski sebenarnya sudah dibicarakan dengan Sukarno-Hatta (Tobing, 1986:75-77). Tokoh-tokoh komunis seperti Setiadjit, Tan Ling Djie, Abdul majid bahkan Amir Sjarifoeddin turut mengkritik keputusan Sjahrir dan mereka juga tidak bersedia mendukung Sjahrir. Akhirnya Sjahrir menyerahkan kekuasaannya pada 27 Juni 1947 karena memang banyak yang menentangnya bahkan dari partainya sendiri. Kemudian Sukarno mengambil alih seluruh kekuasaan pemerintah.

Akhirnya pada 27 Juni 1947 Sjahrir melepaskan jabatannya sebagai Perdana Menteri, kabinet Sjahrir diganti dengan kabinet Amir. Pada 3 Juli 1947, Amir Sjarifoeddin membentuk kabinet baru dan menjadi Perdana Menteri menggantikan Sjahrir. Sedangkan Sjahrir diangkat menjadi penasehat pemerintah. Setelah perubahan tersebut, pemerintah kembali fokus pada balasan nota yang disampaikan kepada Belanda terkait nota 15 Juli 1947. Lagi-lagi jawaban yang diberikan pemerintah RI dianggap tidak memenuhi syarat. Pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan aksi militernya yang pertama.

Pada Agustus 1947, Sjahrir yang baru mengundurkan diri dari Perdana Menteri, mewakili Indonesia dalam sidang PBB di Lake Success melawan E.N. van Kleffens seorang Menteri Luar Negeri Belanda (Anwar, 2011:72). Sjahrir dengan tegas mengatakan bahwa Belanda melanggar perjanjian Linggarjati. Sjahrir juga menepis tuduhan Belanda yang membeberkan kelakuan buruk bangsa Indonesia. Kedatangan Sjahrir di Lake Success memberi banyak kesan bagi dunia internasional. Akhirnya, PBB membentuk KTN (Komisi Tiga Negara) yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Hal ini terjadi tidak lepas dari

pasal arbitrase yang ditambahkan Sjahrir pada perjanjian Linggarjati. Selama tiga kali menjabat sebagai Perdana Menteri, sosialisme Indonesia yang berhasil diwujudkan adalah sosialisme politik, sedangkan sosialisme ekonomi masih belum dapat terwujud secara maksimal karena faktor keadaan yang sedang kacau balau akibat keinginan Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali.

6.2 Usaha Melalui Partai Politik

Pada masa revolusi, terdapat dua partai yang beraliran sosialis yakni Paras (Partai Rakyat Sosialis) yang diketuai Sjahrir dan Parsi (Partai Sosialis Indonesia) yang diketuai Amir Sjarifoeddin. Tak berselang lama, kedua partai tersebut bergabung menjadi satu dengan alasan sama-sama beraliran sosialis. Gabungan kedua partai ini dinamakan dengan Partai Sosialis yang memiliki peran penting dalam mendukung Sjahrir di pemerintahan. Meski sama-sama sosialis, Amir lebih condong ke komunis sedangkan Sjahrir sendiri anti-komunis. Berikut perbedaan antara golongan dan golongan Sjahrir:

1. Partai Sosialis golongan Amir : orang-orangnya sederhana, kurang berpendidikan barat, golongan gerakan bawah tanah Surabaya, ideologi Marxismenya kurang teoritis serta kurang akademis;
2. Partai Sosialis golongan Sjahrir : keturunan keluarga berada, berpendidikan barat yang tinggi, sebagian bekas dari aktivis PNI-Baru (Anderson, 1988:235-236).

Kerjasama keduanya dilakukan untuk menghadapi kelompok oposisi Tan Malaka yang ingin menggulingkan pemerintahan. Partai Sosialis terus memberi dukungan kepada Sjahrir selama menjabat sebagai Perdana Menteri. Meski awalnya penyatuan kedua partai berjalan mulus, tetapi pada pertengahan 1947 Partai Sosialis mulai menunjukkan keretakan. Hal ini didasarkan atas perjanjian Linggarjati yang hasilnya dianggap mengecewakan. Perjanjian ini banyak mendapat kecaman banyak pihak karena dianggap menguntungkan pihak Belanda. Partai Sosialis kecewa dengan sikap yang diambil Sjahrir, bahkan Amir juga ikut mengkritik Sjahrir. Banyaknya kritikan yang ditujukan pada Sjahrir membuatnya menaruh jabatan Perdana Menteri.

Amir Sjarifoeddin ditunjuk untuk membentuk pemerintahan baru menggantikan Sjahrir. Naiknya Amir sebagai Perdana Menteri, membuatnya harus meneruskan perundingan dengan Belanda. Perundingan Renville yang dipimpin Amir justru dianggap lebih gagal dibanding dengan Linggarjati. Tidak berbeda dengan Sjahrir, Amir juga kehilangan dukungan. Permasalahan ini bertambah dengan adanya perpecahan pada Partai Sosialis. Setelah Amir mengundurkan diri, Hatta didaulat untuk membentuk pemerintahan baru, pengikut Amir di Partai Sosialis tidak setuju dengan hal ini, sedangkan pengikut Sjahrir justru mendukung langkah yang dilakukan pemerintah (Legge, 2003:201). Perpecahan Partai Sosialis terjadi juga akibat dari golongan yang lebih condong ke komunis memilih untuk berada di barisan Soviet ketika perang dingin terjadi (Sjahrir, 1982:76).

Akhirnya Sjahrir dan pengikutnya memutuskan untuk memisahkan diri dari Partai Sosialis dan membentuk Partai Sosialis Indonesia pada 28 Februari 1948. Sedangkan Amir memilih untuk membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat). Partai Sosialis Indonesia bentukan Sjahrir tidak memiliki banyak anggota. PSI memang bukan partai massa yang memiliki banyak anggota, melainkan hanya partai kader. Bahkan pada kongres PSI yang pertama pada Januari 1952, mereka hanya memperdebatkan tentang ideologi, yakni apakah mempertahankan ajaran Marx dan Engels sebagai suatu acuan dalam ajaran partai atau tidak (Mintz, 2003:186). Pada akhirnya mereka tetap mempertahankan ajaran Marx-Engels sebagai acuan, namun bukan digunakan sebagai obat permasalahan melainkan hanya sebagai solusi. Setelah Sjahrir mundur dari pemerintahan, orang-orang sosialis juga berperan kecil dalam pemerintahan. Tercatat pada kabinet Hatta, Natsir dan Sukiman, PSI tidak turut andil, pada kabinet Wilopo ada 2 orang menteri dari PSI, kabinet Ali juga tidak ada wakil PSI, dan pada kabinet Harahap terdapat 2 menteri dari PSI itupun karena pemilu pertama yang diselenggarakan (Anwar, 2011:93-94).

Sjahrir menekankan bahwa PSI bukan partai yang mengikuti angin, PSI harus konsekuen untuk memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia, PSI juga harus terus mengabdikan bukan untuk nama, golongan apalagi kemewahan,

melainkan hanya untuk rakyat Indonesia (Salim, 1966:37). Peran Sjahrir pada politik terus merosot, pengaruh PSI juga tidak terlihat mengingat PSI hanya sebuah partai kader dengan sedikit anggota. Pada 1955, pemilihan umum yang pertama dilaksanakan dan PSI mengalami kekalahan total, hanya mendapat sekitar 2 persen suara (Anwar, 2011:98).

Kemerosotan PSI tidak hanya sampai di situ, keadaan di Indonesia yang bertambah parah semakin memperkeruh keadaan. Korupsi terjadi dimana-mana, perkenomian semakin terpuruk, dan beberapa masalah yang sampai membuat ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. PRRI/Permesta muncul di daerah untuk menentang pemerintah pusat. Beberapa oknum PSI terlibat salah satunya Sumitro Djojohadikusumo. Sjahrir bahkan sampai mengirim Djair Muhammad untuk membujuk para pemberontak, namun upaya tersebut gagal yang mengakibatkan Djair ditangkap. PSI memang tidak pernah setuju dengan aksi pemberontakan tersebut. PRRI/Permesta dapat mencetuskan perang saudara dan memecah persatuan bangsa. Namun, Sjahrir juga tidak melempar semua kesalahan kepada pemberontak, terjadinya pemberontakan harus dicari penyebabnya agar dapat dicari solusi yang tepat untuk menyelesaikannya (Salim, 1966:38).

Karena pemberontakan tersebut, PSI dan Masyumi dibubarkan pemerintah. Alasan pembubaran kedua partai itu karena dicurigai turut serta dalam pemberontakan, sehingga melalui putusan Presiden no. 200 tahun 1960 PSI dan Masyumi resmi bubar. PSI memang tidak menyangkal bahwa beberapa anggotanya turut serta dalam pemberontakan, namun keterlibatan mereka tidak ada sangkut-pautnya dengan PSI. Pembubaran PSI ini menjadi akhir bagi Sjahrir dalam memperjuangkan sosialisme Indonesia. Dua tahun setelah pembubaran, Sjahrir ditangkap dengan alasan terlibat dalam teror di Makassar (1961) terhadap Presiden Sukarno. Hatta bahkan menyatakan bahwa Sjahrir sangat menentang teror dalam politik, hal tersebut karena sangat bertentangan dengan sosialisme, terutama kemanusiaan (Mangandaralam, 1966:9). Penangkapannya ini membuat perjuangan Sjahrir benar-benar berakhir sampai kematian menjemputnya. Seperti yang disampaikan Hatta pada pemakaman Sjahrir, yakni Sjahrir berjuang untuk

Indonesia merdeka, Sjahrir melarat dalam memperjuangkan Indonesia merdeka, Sjahrir turut serta dalam membina Indonesia merdeka, serta sakit dan meninggal sebagai tahanan Indonesia yang merdeka (Mangandaralam, 1966:25).



BAB 7. PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 4, 5, dan 6 dapat ditarik kesimpulan serta jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan yang pertama, faktor sosial-budaya yang terdiri faktor lingkungan keluarga, lingkungan budaya Minang dan lingkungan pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemikiran Sutan Sjahrir tentang sosialisme Indonesia. Lingkungan keluarganya yang berbau barat sangat mempengaruhi pembentukan pola pemikiran Sjahrir yang lebih terbuka dan kritis. Lingkungan budaya Minang berpengaruh pada cara berpikir Sjahrir yang dinamis. Hal tersebut membuat Sjahrir mampu menyerap unsur-unsur dari luar (contohnya sosialisme) namun disesuaikan dengan kondisi Indonesia agar nantinya mampu diterapkan di Indonesia. Lingkungan pendidikan terutama saat Sjahrir di Belanda membuatnya mengenal sosialisme secara lebih mendalam. Di Belanda, Sjahrir juga lebih bisa memahami sosialisme seperti apa yang pantas untuk diterapkan di Indonesia. Faktor yang kedua adalah pengalaman organisasi yang dimulai dari keikutsertaan Sjahrir dalam Perhimpunan Indonesia (PI). Setelah kembali ke tanah air Sjahrir bergabung dengan PNI-Baru yang merupakan partai kader. Setelah PNI-Baru, Sjahrir dibuang ke Digoel lalu ke Banda Neira. Di masa pengasingan, Sjahrir sering memperhatikan kondisi politik luar negeri terutama tentang pengaruh fasisme yang mulai menyebar. Sjahrir juga lebih memahami bagaimana kekurangan dan kelebihan Timur yang membuatnya berbeda dengan Barat.

Kesimpulan kedua, yakni mengenai bentuk-bentuk sosialisme Indonesia ala Sutan Sjahrir. Sosialisme ala Sjahrir dikenal dengan sosialisme kerakyatan yang berarti perjuangan untuk kebebasan dan kedewasaan rakyat Indonesia namun tidak melupakan dasar-dasar kemanusiaan. Sosialisme politik yang diharapkan Sutan Sjahrir yakni penerapan sistem multipartai. Sistem partai tunggal dikhawatirkan akan membuka jalan bagi perkembangan totaliterisme di Indonesia. Untuk sistem pemerintahan rakyat menghendaki sistem pemerintahan parlementer

menggantikan sistem pemerintahan presidensiil. Sedangkan sosialisme ekonomi yang diharapkan Sjahrir adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi sosialis adalah kepentingan ekonomi suatu negara yang dikelola dan diatur oleh pemerintah dan dimaksudkan untuk kemakmuran rakyat. Namun, karena Indonesia baru merdeka rasanya mustahil pemerintah bisa mengelola perekonomian seorang diri. Oleh karena itu, Sjahrir menghendaki adanya bantuan dari pihak swasta.

Kesimpulan ketiga mengenai usaha-usaha Sjahrir dalam mewujudkan sosialisme Indonesia yakni melalui BP-KNIP dan melalui partai politik yang didirikannya yakni PSI. Melalui BP-KNIP, Sjahrir merubah sistem presidensiil menjadi sistem parlementer. Perubahan tersebut membawa Sjahrir menduduki kursi Perdana Menteri dalam kabinet Sjahrir tiga kali berturut-turut. Kabinet Sjahrir I, Sjahrir melakukan berbagai pertemuan dengan pihak Belanda namun tidak menghasilkan apa-apa. Pada masa jabatannya ini Sjahrir diguncang dengan penolakan dari pihak oposisi mengenai kebijakan berunding dengan Belanda. Kabinet Sjahrir II, Sjahrir berhasil menerobos blokade ekonomi Belanda untuk mengirim beras ke India yang ditukar dengan obat-obatan. Kali ini pihak oposisi semakin menjadi yakni penculikan Sjahrir yang dilakukan pada Juni 1946 dan dibebaskan setelah pidato yang dikumandangkan Sukarno. Kabinet Sjahrir III, Sjahrir berhasil melaksanakan perundingan dengan Belanda dalam bentuk Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada November 1946. Perjanjian Linggarjati dianggap merugikan Indonesia ditambah Belanda tidak mengikuti isi perjanjian, sehingga Sjahrir harus melepaskan jabatannya. Pada saat masih menjabat sebagai Perdana Menteri, Sjahrir mengetuai Paras yang kemudian bergabung dengan Parsi menjadi Partai Sosialis. Partai Sosialis menjadi partai pendukung bagi Sjahrir dan Amir saat duduk di pemerintahan. Karena perbedaan prinsip, golongan Sjahrir dan golongan Amir akhirnya mengakhiri kerjasama. Tidak berselang lama, Sjahrir mendirikan PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang merupakan partai kader. Pada pemilu 1955, PSI hanya mendapat 2% dari total suara. Semakin lama PSI semakin kehilangan pengaruhnya. Akhirnya pada 1960, PSI dibubarkan paksa oleh presiden karena dicurigai terlibat dalam

PRRI/Permesta. Peristiwa inilah yang membuat Sjahrir kehilangan wadah dalam mewujudkan sosialisme Indonesia.

7.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

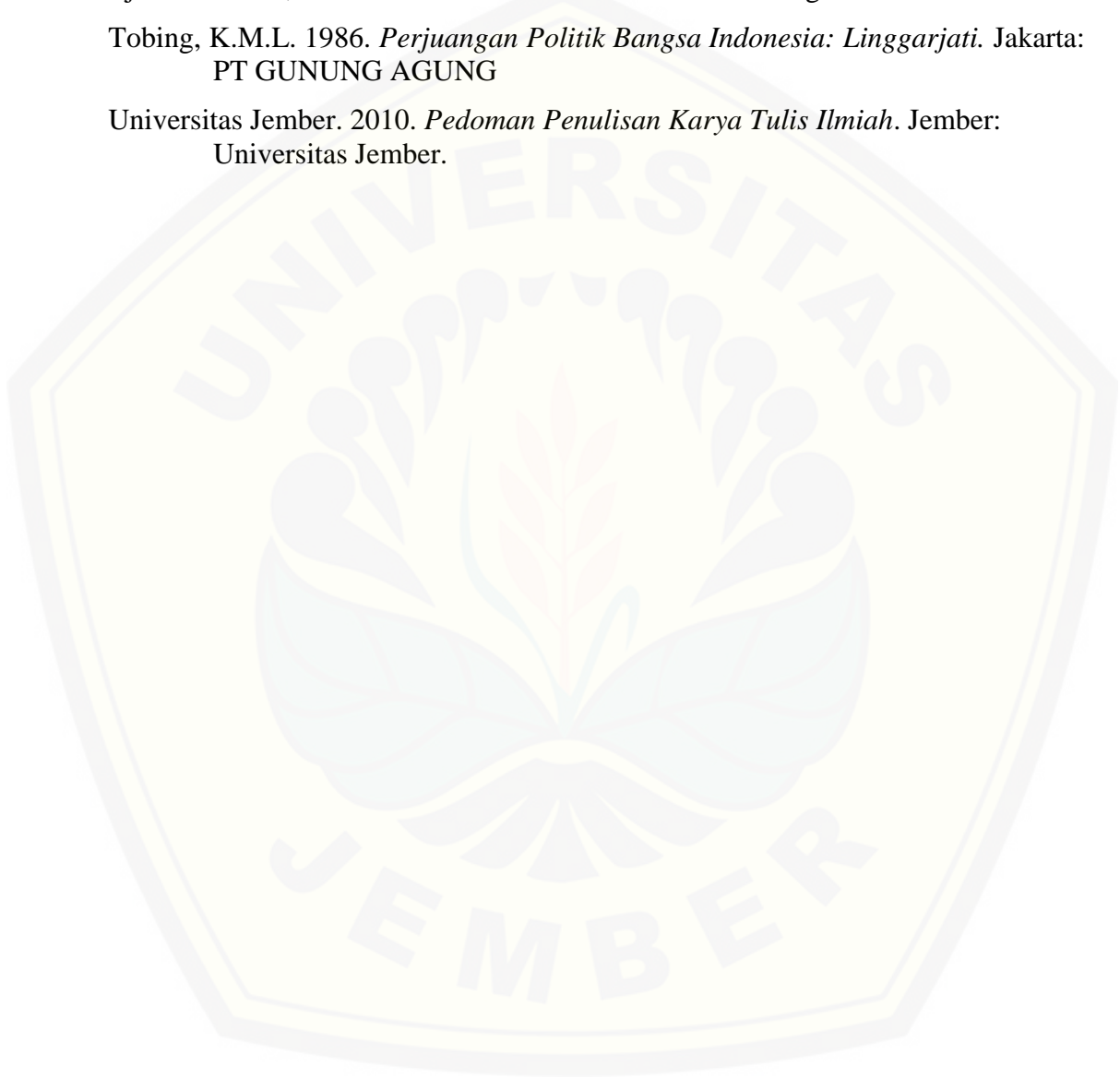
1. bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan tentang Sutan Sjahrir, namun perlu dikembangkan lagi;
2. bagi peneliti, penelitian ini masih banyak kekurangan, diharapkan bagi pembaca untuk mengembangkan lagi penelitian mengenai Sejarah Indonesia;
3. bagi almamater, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan dan menambah informasi dalam upaya untuk mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, R. 1964. *Sosialisme Indonesia*. Jakarta: Jajasan Prapantja
- Abullah, T.,dkk. 1983. *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LB3ES
- Anderson, B. 1988. *Revoloesi Pemoeda*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Anwar, R. 1980. *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: PT Gramedia
- Anwar, R. 2011. *Sutan Sjahrir: Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului zamannya*. Jakarta: Kompas Gramedika
- Asyanto, O. 2012. Peran Sutan Sjahrir Dalam Politik Indonesia Tahun 1945 – 1947. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember: UNEJ.
- Badriyah, Q. 2013. Perbedaan Pemikiran Sutan Sjahrir dan Tan Malaka Tentang Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember: UNEJ.
- Daradjadi. 2014. *Mr. Sartono: Pejuang Demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Ebenstein, W. 1965. *Isme-Isme Dewasa ini*. Jakarta: Penerbit Swada
- Gottschalk, L. 1986. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia
- Hamid , E.M. 2013. Pemikiran Politik Sjahrir dalam Perjuangan Kerdekaan Indonesia Tahun 1945-1947. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya
- Hidayat, N. 2016. Pemikiran Sutan Sjahrir Tentang Demokrasi Indonesia Tahun 1926–1962. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember: UNEJ.
- Kahin, G.M. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Terjemahan Tim Komunitas Bambu. Depok: Komunitas Bambu
- Kartodirdjo, S. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Legge, J.D. 2003. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Mangandaralam, S. 1966. *In Memoriam Sutan Sjahrir: Perdjuangan dan Penderitaannya*. Bandung: Pantjasakti

- Melik, S. 1958. *Antara Marhaenisme dan Marxisme*. Jakarta: Jajasan Badan Penerbit.
- Mani, P.R.S. 1989. *Jejak Revolusi 1945: Sebuah Kesaksian Sejarah*. Terjemahan Lany Kristono. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Mintz, J.S. 2003. *Muhammad, Marx, Marhaen: Akar Sosialisme Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mrazek, R. 1996. *Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Terjemahan oleh Mochtar Pabotingi, dkk. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulyono, R. 2010. *Pemikiran Politik Sutan Sjahrir Tentang Sosialisme Kerakyatan Untuk Mencapai Negara Kesejahteraan*. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
- Nasution, A.H. 1977. *Sekitar Perang kemerdekaan Indonesia*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa bandung
- Nasution, A.H. 1996. *Sekitar Perang kemerdekaan Indonesia*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa bandung
- Nasution, S. 1995. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: BUMI AKSARA
- Poespoprodjo. 1991. *Logika Scientifika*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pramasanti, R., dkk. 2013. *Pemikiran Politik Sutan Sjahrir Tentang Sosialisme Sebuah Analisis Psikologi Politik*. Tidak Diterbitkan. *Jurnal*. Semarang: UNDIP.
- Pranoto, S W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ricklefs, M.C. 2010. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Terjemahan Tim Penerjemah Serambi. Jakarta: Serambi
- Ritzer, G. 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terjemahan oleh Alimandan. Jakarta: CV Rajawali
- Romansyah, R. 2013. *Pemikiran Sutan Sjahrir Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 1927 – 1947*. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember: UNEJ.
- Salim, L. 1966. *Bung Sjahrir: Pahlawan Nasional*. Medan: MASA DEPAN
- Santoso, L. 2014. *Sutan Sjahrir: Pemikir dan Kiprah Sang Pejuang Bangsa*. Yogyakarta: Palapa.
- Sjahrir, S. 2010. *Perjoeangan Kita*. Jakarta: Perjetakan Repoeblik Indonesia.

- Sjahrir, S. 1982. *Sosialisme Indonesia Pembangunan*. Jakarta: LEPPENAS.
- Sjahrir, S. 1990. *Renungan dan Perjuangan*. Terjemahan oleh H.B. Jassin. Jakarta: Djambatan dan Dian Rakyat.
- Tempo. 2017. *Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil*. Jakarta: KPG.
- Tjokroaminoto, HOS. 2010. *Islam dan Sosialisme*. Bandung: SEGA ARSY.
- Tobing, K.M.L. 1986. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: Linggarjati*. Jakarta: PT GUNUNG AGUNG
- Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Universitas Jember.



LAMPIRAN A

MATRIX PENELITIAN					
Tema	Judul	Permasalahan	Jenis dan sifat penelitian	Sumber data	Metode
Sejarah Pemikiran	Pemikiran Sutan Sjahrir Tentang Sosialisme Indonesia Tahun 1909-1960	<p>a. apa faktor yang melatar belakangi pemikiran Sutan Sjahrir tentang Sosialisme Indonesia tahun 1915-1942?</p> <p>b. bagaimana bentuk-bentuk pemikiran Sutan Sjahrir tentang Sosialisme Indonesia tahun 1929-1960?</p> <p>c. bagaimana usaha Sutan Sjahrir dalam mewujudkan Sosialisme Indonesia tahun 1945-1960?</p>	<p>Jenis penelitian: Penelitian sejarah</p> <p>Sifat Penelitian: Penelitian kepustakaan</p>	<p>a. buku yang relevan</p> <p>b. skripsi</p>	<p>Metode penelitian: Heuristik, kritik, interpretasi, historiografi</p> <p>Pendekatan: sosiologi pengetahuan</p> <p>Teori: teori hermeneutika, teori aksi</p>

LAMPIRAN B**Maklumat
Presiden Republik Indonesia^{*)}**

Sesudah mendengar pembicaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Majelis Permusyawaratan dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan bersama Dewan pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite nasional Pusat.

Menimbang bahwa di dalam keadaan yang genting ini perlu ada Badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia di sebelah pemerintah.

Menimbang selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan faham kedaulatan rakyat.

Memutuskan:

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara.

Serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Jakarta, 16 Oktober 1945

Wakil Presiden Republik Indonesia

Moh. Hatta

^{*)} Nasution, A.H. 1977. *Sekitar Perang kemerdekaan Indonesia*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung

LAMPIRAN C

Susunan Kabinet Sjahrir I^{*)}

Perdana Menteri	: Sutan Sjahrir
Menteri Dalam Negeri	: Sutan Sjahrir
Menteri Luar Negeri	: Sutan Sjahrir
Menteri Penerangan	: Amir Sjarifoeddin
Menteri Pertahanan	: Amir Sjarifoeddin
Menteri Agama	: H.M. Rasjidi
Menteri PU	: Putuhena
Menteri Pendidikan	: T.G. Mulia
Menteri Kemakmuran	: Darmawan Mangunkusumo
Menteri Sosial	: Sudarsono
Menteri Perhubungan	: Abdul Karim
Menteri Kehakiman	: Suwandi
Menteri Keuangan	: R.P.Surachman
Menteri Kesehatan	: Darmasetiawan

^{*)} Santoso, L. 2014. *Sutan Sjahrir: Pemikir dan Kiprah Sang Pejuang Bangsa*. Yogyakarta: Palapa.

LAMPIRAN D**Susunan Kabinet Sjahrir II^{*)}**

Perdana Menteri	: Sutan Sjahrir
Menteri Dalam Negeri	: Sutan Sjahrir
Menteri Luar Negeri	: Sutan Sjahrir
Menteri Penerangan	: Amir Sjarifoeddin
Menteri Pertahanan	: Amir Sjarifoeddin
Menteri Agama	: H.M. Rasjidi
Menteri PU	: Putuhena
Menteri Pendidikan	: Mohammad Sjafei
Menteri Kemakmuran	: Darmawan Mangunkusumo
Menteri Sosial	: Sudarsono
Menteri Perhubungan	: Abdul Karim
Menteri Kehakiman	: Suwandi
Menteri Keuangan	: R.P.Surachman
Menteri Kesehatan	: Darmasetiawan
Menteri Pertanian	: Mr. Rasat
Menteri Negara	: Wikana

^{*)} Kahin, G.M. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Terjemahan Tim Komunitas Bambu. Depok: Komunitas Bambu

LAMPIRAN E**Susunan Kabinet Sjahrir III^{*)}**

Perdana Menteri	: Sutan Sjahrir
Menteri Luar Negeri	: Sutan Sjahrir
Menteri Dalam Negeri	: Mohammad Roem
Menteri Penerangan	: Mohammad Natsir
Menteri Pertahanan	: Amir Sjarifoeddin
Menteri Agama	: Faturrachman
Menteri PU	: Putuhena
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	: Suwandi
Menteri Kemakmuran	: A.K. Gani
Menteri Sosial	: Maria Ulfah Santoso
Menteri Perhubungan	: Ir. Juanda
Menteri Kehakiman	: Susanto Tirtoprodjo
Menteri Keuangan	: Sjafruddin Prawiranegara
Menteri Kesehatan	: Darmasetiawan
Menteri Negara	: Wikana, Hamengku Buwono IX, Wachid Hasjim, Tan Pao Gwan, Setiabuddhi

^{*)} Kahin, G.M. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Terjemahan Tim Komunitas Bambu. Depok: Komunitas Bambu

LAMPIRAN F**NASKAH RENCANA PERSETUJUAN^{*)}**

PEMERINTAH BELANDA, dalam hal ini berwakilkan Komisi Jenderal dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini berwakilkan Delegasi Indonesia.

Oleh karena mengandung keinginan yang ikhlas hendak menetapkan perhubungan yang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan cara dan bentuk-bentuk yang baru, bagi kerja bersama dengan sukarela, yang merupakan jaminan sebaik-baiknya bagi kemajuan yang bagus, serta dengan kukuh-teguhnyanya daripada kedua negeri itu, di dalam masa datang, dan yang membukakan jalan kepada kedua bangsa itu untuk mendasarkan perhubungan antara kedua belah pihak atas dasar-dasar yang baru, menetapkan mufakat sebagian berikut, dengan ketentuan akan menganjurkan persetujuan ini selekas-lekasnya untuk memperoleh kebenaran daripada majelis-majelis perwakilan rakyatnya masing-masing.

Pasal 1

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, Sumatra. Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerja bersama antara kedua belah pihak dan dimasukkan pula ke dalam Daerah Republik. Untuk yang menyelenggarakan yang demikian itu maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan yang perlu-perlu, supaya, selambat-lambatnya pada waktu yang disebutkan dalam pasal 12, termasuknya daerah-daerah yang tersebut itu telah selesai.

^{*)} Tobing, K.M.L. 1986. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: Linggarjati*. Jakarta: PT GUNUNG AGUNG

Pasal 2

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menyelenggarakan segera berdirinya sebuah negara perserikatan dan dinamai Negara Indonesia Serikat.

Pasal 3

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia-Belanda seluruhnya, dengan ketentuan, bahwa, jika kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, setelah dimusyawarahkan dengan lain-lain bagian daerah pun juga, menyatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk ke dalam perikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu boleh diwujudkan semaca kedudukan istimewa terhadap Neagara Indonesia Serikat itu dan terhadap Kerajaan Belanda.

Pasal 4

- (1) Adapun negara-negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Borneo dan Timur Besar, yaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, untuk menyatakan kehendaknya, menurut aturan demokratis, supaya kedudukannya dalam Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan cara lain.
- (2) Dengan tidak menyalahi ketentuan di dalam pasal 3 tadi dari di dalam ayat ke (1) pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinya.

Pasal 5

- (1) Undang-Undang Dasar daripada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentukan negara, yang akan didirikan daripada wakil-wakil sekutu lain-lain yang akan termasuk kelak dalam Negara Indonesia Serikat itu, yang wakil-wakil itu ditunjukkan dengan jalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ayat yang berikut dalam pasal ini.
- (2) Kedua belah pihak akan bermusyawarah tentang cara turut campurnya dalam persidangan pembentuk negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daerah-daerah yang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh

golongan-golongan penduduk yang tidak ada atau tidak cukup perwakilannya, segala itu dengan mengingat tanggung jawab daripada Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Belanda dan Perintah Republik Indonesia untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan bersama daripada Negeri Belanda dan Indonesia, akan bekerja bersama untuk membentuk Persekutuan Belanda-Indonesia, yang dengan terbentuknya itu kerajaan Belanda, yang meliputi Negara Belanda, Hindia-Belanda, Suriname dan Curacao ditukar sifatnya menjadi persekutuan itu, yang terdiri dari satu pihak daripada kerajaan Belanda, yang meliputi Negeri Belanda, Suriname dan Curacao dan pada pihak lainnya daripada Negara Indonesia Serikat.
- (2) Yang tersebut di atas ini, tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian, berkenaan dengan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curacao satu dengan lainnya.

Pasal 7

- (1) Untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan tersebut di dalam pasal di atas ini, Persekutuan Belanda-Indonesia itu akan mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri.
- (2) Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Negara Indonesia Serikat; mungkin juga oleh majelis-majelis perwakilan rakyat negara-negara itu.
- (3) Adapun yang akan dianggap kepentingan-kepentingan bersama itu ialah kerja bersama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan dan seberapa perlu keuangan, serta juga hal-hal ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 8

Di puncak Persekutuan Belanda-Indonesia itu duduklah Raja Belanda. Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan Persekutuan itu atas nama Baginda Belanda.

Pasal 9

Untuk membela-pelihara kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negeri Belanda, dan kepentingan-kepentingan Kerajaan Belanda di Indonesia, maka Pemerintah masing-masingnya kelak mengangkat Komisaris Luhur.

Pasal 10

Anggar-anggar Persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain akan mengandung juga ketentuan-ketentuan tentang:

- a) pertanggung jawaban hak-hak kedua belah pihak yang satu terhadap yang lain dan jaminan-jaminan kepastian kedua belah pihak menepati kewajiban-kewajibannya yang satu kepada yang lain;
- b) hal kewarganegaraan untuk warga negara Belanda dan warga negara Indonesia, masing-masing di daerah lainnya;
- c) aturan cara bagaimana menyelesaikannya, apabila dalam alat-alat kelengkapan Persekutuan itu tidak dapat dicapai semufakat;
- d) aturan cara bagaimana dan dengan syarat-syarat apa alat-alat kelengkapan Kerajaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak atau kurang cukup mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri;
- e) pertanggung jawaban dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak-hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan, yang dimaksudkan juga oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 11

- (1) Anggar-anggar itu akan direncanakan kelak oleh suatu permusyawaratan antara wakil-wakil Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat yang hendak dibentuk itu.
- (2) Anggar-anggar itu terus berlaku, setelah dibenarkan oleh majelis-majelis perwakilan rakyat kedua belah pihak masing-masing.

Pasal 12

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaya berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 Januari 1949.

Pasal 13

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan-tindakan, agar supaya, setelah terbentuknya Persekutuan Belanda Indonesia Serikat diterima menjadi anggota di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 14

Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak-hak mereka yang dilakukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka, yang lagi berada dalam daerah kekuasaannya *de facto*. Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menyelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

Pasal 15

Untuk mengubah sifat Pemerintah Belanda, sehingga susunannya dan cara bekerjanya seboleh-bolehnya sesuai dengan bentuk susunan menurut hukum negara, yang direkakan itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan, supaya dengan segera dilakukan aturan-aturan undang-undang, agar supaya, sementara menantikan berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu, kedudukan Kerajaan Belanda dalam hukum negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Pasal 16

Dengan segera setelah persetujuan ini menjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan angkatan bala tentaranya masing-masing. Kedua belah pihak akan bermusyawarah tentang sampai seberapa dan lambat-cepatnya melakukan pengurangan itu; demikian juga tentang kerja-bersama dalam hal ketentaraan.

Pasal 17

- (1) Untuk kerja-bersama yang dimaksudkan dalam persetujuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, hendak diwujudkan

sebuah badan, yang terdiri daripada delegasi-delegasi yang ditunjuk oleh tiap-tiap pemerintah itu masing-masingnya, dengan sebuah sekretariat bersama.

- (2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetujuan ini, yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi yang tersebut itu, akan menyerahkan keputusan kepada *arbitrage*. Dalam hal itu persidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan secara memutuskan, yang diangkat dengan semufakat antara dua pihak delegasi itu, atau, jika tidak berhasil semufakat itu, diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan Internasional.

Pasal Penutup

Persetujuan ini dikarangkan dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua-dua naskah itu sama kekuatannya.

Jakarta, 15 Nopember 1946.

Schermerhorn	Sjahrir
Van Mook	Roem
Van Poll	Soesanto
De Boer	Gani

LAMPIRAN G



Gambar 1. Sutan Sjahrir muda ketika menjadi mahasiswa di Amsterdam
(Sumber: Anwar, 2011)



Gambar 2. Penandatanganan Linggarjati yang diwakili Schermerhorn (Belanda) dan Sutan Sjahrir (Indonesia) yang disaksikan Lord Killearn
(Sumber: Tobing, 1986)